

**PENGARUH MODAL SOSIAL DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN
PERDESAAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN BREBES, BANYUMAS,
PATI, TEGAL, BATANG, DAN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH**

Disertasi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Doktor

Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi



Disusun oleh:

LESTA KAROLINA BR SEBAYANG

(19/450157/SEK/00629)

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
INTISARI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Motivasi Penelitian	22
1.5 Manfaat Penelitian	23
1.6 Kontribusi Penelitian	24
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
2.1 Kemiskinan di Perdesaan	27
2.2 Modal Sosial	32
2.2.1 Definisi Modal Sosial.....	32
2.2.2 Determinan Modal Sosial.....	35
2.3 Modal Sosial dan Kemiskinan di Perdesaan.....	43
2.4 Kerangka Pemikiran Konseptual	49
2.5 Hipotesis Penelitian	51
2.5.1 Hubungan antara Koperasi dengan Kemiskinan Perdesaan.....	51
2.5.2 Hubungan antara Musyawarah dengan Kemiskinan Perdesaan..	51
2.5.3 Hubungan antara Partisipasi Gotong Royong dengan Kemiskinan Perdesaan.....	52
2.5.4 Hubungan antara Partisipasi Menjaga Lingkungan dengan Kemiskinan perdesaan	52
2.5.5 Hubungan langsung antara pemerintahan dan kemiskinan.....	53

2.5.6	Peran Moderasi Pemerintahan Desa antara Koperasi dan Kemiskinan Perdesaan	53
2.5.7	Peran Moderasi Pemerintahan Desa antara Musyawarah dan Kemiskinan Perdesaan	54
2.5.8	Peran Moderasi Pemerintahan Desa antara partisipasi Gotong Royong dan Kemiskinan Perdesaan.....	55
2.5.9	Peran Moderasi Pemerintahan Desa antara Partisipasi Menjaga Lingkungan dan Kemiskinan Perdesaan	56
BAB III METODE PENELITIAN		58
3.1	Data dan Sumber Data	58
3.2	Pemilihan Sampel	62
3.3	Alat Analisis.....	64
3.3.1	<i>Structural Equation Model – Partial Least Square</i> (SEM-PLS)	64
3.3.2	Model SEM PLS Modal Sosial dengan Kemiskinan	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		74
4.1	Gambaran Umum Kemiskinan dan Modal Sosial	74
4.2	Hasil Analisis SEM-PLS.....	83
4.2.1	Uji <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	83
4.2.2	Uji <i>Collinearity</i> (VIF)	85
4.2.3	Uji <i>Discriminant Validity</i>	86
4.2.4	Uji Koefisien Determinasi (<i>R-Squared</i>).....	86
4.2.5	Effect Size (f^2).....	87
4.2.6	<i>Predictive Relevance</i> (Q^2)	91
4.2.7	Uji Signifikansi Pengaruh Langsung	93
4.2.8	Uji Signifikansi Pengaruh Jalur Moderasi	97
4.3	Pembahasan.....	99
4.3.1	Pengaruh Langsung Modal Sosial Terhadap Kemiskinan di Perdesaan.....	99
4.3.1.1	Pengaruh Koperasi terhadap Kemiskinan di Perdesaan..	99
4.3.1.2	Pengaruh Musyawarah terhadap Kemiskinan di Perdesaan	111

4.3.1.3 Pengaruh Partisipasi Gotong Royong terhadap Kemiskinan di Perdesaan.....	117
4.3.1.4 Pengaruh Partisipasi Menjaga Lingkungan terhadap Kemiskinan di Perdesaan.....	121
4.3.2 Pengaruh Langsung Pemerintahan Desa Terhadap Kemiskinan di Perdesaan.....	128
4.3.3 Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kemiskinan di Perdesaan Melalui Pemerintahan Desa	129
4.3.3.1 Pengaruh Koperasi Terhadap Kemiskinan di Perdesaan melalui Pemerintahan Desa	130
4.3.3.2 Pengaruh Musyawarah Terhadap Kemiskinan di Perdesaan melalui Pemerintahan Desa	132
4.3.3.3 Pengaruh Partisipasi Gotong Royong Terhadap Kemiskinan di Perdesaan melalui Pemerintahan Desa	133
4.3.3.4 Pengaruh Partisipasi Menjaga Lingkungan Terhadap Kemiskinan di Perdesaan melalui Pemerintahan Desa	135
4.4 Logika Empiris Modal Sosial, Kemiskinan Desa, dan Peran Moderasi Pemerintahan Desa.....	139
BAB V SIMPULAN	146
5.1 Simpulan	146
5.2 Saran	148
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	149
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN.....	171
LAMPIRAN 1. Kuesioner Podes	171
LAMPIRAN 2. Dokumen Penelitian	175
2.1. Permohonan Data di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	175
2.2. Permohonan Data di Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Batang dan Kudus.....	176

LAMPIRAN 3.1	Hasil Analisis SEM-PLS	184
3.1. Path Coefficient (Direct Effect).....		184
3.2. Total Effects		186
3.3. Outer Loadings		187
3.4. Outer Weights		190
LAMPIRAN 4.1	Observasi Lapangan	194

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2018 –2023	8
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa tahun 2018 – 2023	10
Tabel 1. 3 Deskripsi Modal Sosial Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Kudus, dan Batang Tahun 2018 dan 2020	16
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Modal Sosial dan Kemiskinan.....	44
Tabel 3. 1 Variabel, Sumber Data, dan Definisi Operasional.....	61
Tabel 3. 2 Hasil penghitungan nilai Mean dan SD	63
Tabel 3. 3 Karakteristik Model SEM-PLS	66
Tabel 3. 4 Karakteristik Data untuk Model SEM-PLS	67
Tabel 4. 1 Profil Kabupaten Brebes, Pati, Kudus, Batang, Tegal, Banyumas	75
Tabel 4. 2 Karakteristik Perdesaan di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang dan Kudus tahun 2018 dan 2020.....	80
Tabel 4. 3 Hasil Nilai Average Variance Extracted (AVE)	83
Tabel 4. 4 Evaluasi Kolinieritas (VIF).....	85
Tabel 4. 5 Discriminant Validity.....	86
Tabel 4. 6 Hasil Koefisien Determinasi SEM.....	86
Tabel 4. 7 Hasil f ² SEM.....	87
Tabel 4. 8 Hasil Q ² SEM	92
Tabel 4. 9 Hasil Pengaruh Langsung	93
Tabel 4. 10 Hasil Jalur Moderasi	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 (%) (BPS Provinsi Jawa Tengah 2018-2023).....	11
Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin di 29 Kabupaten Tahun 2018 -2023	15
Gambar 2. 1 Dimensi Modal Sosial (Narayan & Cassidy, 2001)	36
Gambar 2. 2 Hubungan Modal Sosial dalam Penelitian dengan Dimensi Modal Sosial Narayan dan Cassidy (2001)	38
Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual Modal Sosial dengan Kemiskinan di Perdesaan	49
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran Model SEM PLS antara Modal Sosial dan Kemiskinan Perdesaan	50
Gambar 3. 1 Konseptual Persamaan Struktural Modal Sosial dan Kemiskinan Dengan Mediasi Pemerintahan Desa	71
Gambar 4. 1 Hasil Estimasi Model SEM-PLS Pengaruh langsung dan Efek Moderasi.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Kuesioner Podes	171
LAMPIRAN 2. Dokumen Penelitian	175
2.1. Permohonan Data di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	175
2.2. Permohonan Data di Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Batang dan Kudus	176
LAMPIRAN 3.1 Hasil Analisis SEM-PLS	184
3.1. Path Coefficient (Direct Effect)	184
3.2. Total Effects	186
3.3. Outer Loadings	187
3.4. Outer Weights.....	190
LAMPIRAN 4.1 Observasi Lapangan	194

DAFTAR ISTILAH

AVE	<i>Average Variance Extracted</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMdes	Badan Usaha Milik Desa
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
GK	Garis Kemiskinan
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	Garis Kemiskinan Non-Makanan
ILO	<i>International Labour Organization</i>
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KP	Koperasi Simpan Pinjam
KUD	Koperasi Unit Desa
ML	<i>Maximum Likelihood</i>
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Podes	Potensi Desa
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SD	Sekolah Dasar
SEM PLS	<i>Structural Equation Modeling–Partial Least Square</i>
SMP	Sekolah Menengah Pertama
UU	Undang-Undang
VIF	<i>Variance Inflation Factor</i>

INTISARI

Penelitian ini menganalisis hubungan antara modal sosial, pemerintahan desa, dan kemiskinan perdesaan pada 1.637 desa di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Modal sosial dalam penelitian ini direpresentasikan melalui empat dimensi, yaitu koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan. Penelitian ini menggunakan data sekunder PODES dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dan 2020 yang dianalisis dengan pendekatan SEM-PLS. Tujuan penelitian menjelaskan menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung antara modal sosial terhadap kemiskinan desa, pengaruh langsung pemerintahan desa terhadap kemiskinan, serta pemerintahan desa sebagai variabel moderasi antara modal sosial dan kemiskinan perdesaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi modal sosial memiliki hubungan yang berbeda terhadap kemiskinan desa. Koperasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga keberadaan koperasi dapat membantu memperluas akses ekonomi, permodalan, dan kegiatan usaha produktif masyarakat desa. Musyawarah juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang partisipatif dapat membantu penyusunan program pembangunan desa yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, partisipasi gotong royong dan partisipasi menjaga lingkungan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini tidak dimaknai bahwa gotong royong dan kepedulian lingkungan menyebabkan kemiskinan, tetapi menunjukkan bahwa kedua bentuk partisipasi tersebut cenderung lebih kuat muncul pada desa yang menghadapi keterbatasan sumber daya, persoalan infrastruktur, tekanan sosial-ekonomi, atau kerentanan lingkungan. Dengan demikian, gotong royong dan partisipasi menjaga lingkungan dapat dipahami sebagai respons sosial masyarakat desa dalam menghadapi kondisi kemiskinan.

Pemerintahan desa hanya memoderasi hubungan antara musyawarah dan kemiskinan, sedangkan hubungan koperasi, gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan terhadap kemiskinan tidak dimoderasi secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa lebih berperan sebagai fasilitator musyawarah dan perencanaan pembangunan partisipatif. Penelitian ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan desa tidak cukup hanya melalui bantuan ekonomi, tetapi juga perlu didukung oleh penguatan modal sosial, forum musyawarah yang inklusif, koperasi yang kuat, pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

Kata kunci: modal sosial, pemerintahan desa, koperasi, musyawarah, gotong royong, kemiskinan perdesaan.

ABSTRACT

This study examines the relationship between social capital, village government, and rural poverty across 1,637 villages in the regencies of Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, and Kudus, Central Java Province. Social capital is indicated through four dimensions: cooperatives, deliberation (*musyawarah*), participation in mutual cooperation (*gotong royong*), and participation in environmental conservation.

Secondary data from PODES and the Central Java Provincial Social Service for the years 2018 and 2020 were analysed using the SEM-PLS approach. The study aims to investigate both the direct and indirect effects of social capital on village poverty, the direct impact of village government on poverty, and the moderating role of village governance in the relationship between social capital and rural poverty.

Findings show that each dimension of social capital exhibits a distinct relationship with village poverty. Cooperatives exert a negative and significant effect, indicating that the presence of cooperatives can enhance economic access, capital availability, and community-based productive enterprises. Deliberation (*musyawarah*) similarly demonstrates a negative and significant effect, suggesting that participatory decision-making processes facilitate the design of village development programs that better reflect community needs.

Conversely, participation in mutual cooperation (*gotong royong*) and environmental stewardship exhibits a positive and significant association with poverty. This does not imply causation; rather, these forms of engagement tend to be more prominent in villages confronted with limited resources, infrastructural deficits, socio-economic pressures, or environmental vulnerabilities. Therefore, mutual cooperation and environmental participation are interpreted as community-driven social responses to adverse conditions.

Village government was found to moderate only the relationship between deliberation (*musyawarah*) and poverty, while its moderating effect on cooperatives, mutual cooperation, and participation in environmental conservation was not statistically significant. These results underscore the role of village government as a facilitator for deliberative processes and participatory development planning.

The study concludes that alleviating rural poverty requires more than economic interventions; it necessitates strengthening social capital, fostering inclusive deliberative forums, reinforcing cooperatives, and ensuring responsive village government that effectively addresses the needs of marginalized populations.

Keywords: social capital, village government, cooperatives, deliberation, mutual cooperation, participation in environmental conservation, rural poverty

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu mendasar yang banyak dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia (Saragih, 2015). Kondisi ini terlihat lebih menonjol di wilayah pedesaan, di mana tingkat kemiskinan tidak hanya lebih tinggi tetapi juga kondisi yang dihadapi cenderung lebih berat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Selain itu, masyarakat miskin di pedesaan umumnya memiliki tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat miskin di kota (Khan, 2000). Balisacan, Edillon, dan Piza (2005) melakukan penelitian di Asia Tenggara dan menemukan bahwa lebih dari 70% penduduk miskin berada di wilayah pedesaan. Di negara seperti Vietnam dan Kamboja, sebagian besar penduduk miskin, yakni sekitar 90%, masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Sementara itu, di Indonesia terjadi penurunan tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Di wilayah perkotaan, angka kemiskinan berkurang dari 20% pada tahun 1987 menjadi 14% pada tahun 2002. Di sisi lain, wilayah pedesaan juga mengalami penurunan dari 45% pada tahun 1984 menjadi 21% pada tahun 2002. Kondisi serupa juga terjadi di Filipina, di mana tingkat kemiskinan di daerah pedesaan menurun dari 53% pada tahun 1988 menjadi 47% pada tahun 2000.

Nasution *et al.* (2015) mengungkapkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang belum memadai. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kesempatan ekonomi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2012 sekitar 63,25% dari total penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang lebih terfokus, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber mata pencaharian, serta penguatan modal sosial di wilayah pedesaan.

Suttie (2020) dalam penelitiannya di Afrika menjelaskan bahwa pada tahun 2014 sekitar 60% penduduk masih bermukim di wilayah perdesaan, dengan tingkat kemiskinan yang terkonsentrasi di kawasan tersebut. Namun, seiring dengan laju urbanisasi yang pesat, persentase ini diperkirakan akan menurun menjadi 44% pada tahun 2050. Secara global, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan (17,2%) lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan di wilayah perkotaan (5,3%). Selain itu, sekitar 79% dari populasi yang hidup dalam kemiskinan ekstrem secara global berada di daerah pedesaan. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh kurangnya investasi dalam infrastruktur dan layanan di wilayah perdesaan, yang terus memperkuat kesenjangan antara desa dan kota. Pada situasi ini, modal sosial berperan penting sebagai sarana untuk mengurangi dampak kemiskinan dengan cara memperkuat ikatan sosial, mendorong kerja sama antarindividu, serta membuka peluang akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya ekonomi.

Beberapa penelitian empiris telah mengungkap adanya keterkaitan antara modal sosial dan kemiskinan. Grootaert (1999) melakukan penelitian di perdesaan Indonesia. Fokus penelitian pada beberapa indikator seperti modal sosial (diukur melalui tingkat keaktifan di kegiatan sosial), pengeluaran RT per kapita, total anggota keluarga, jenjang pendidikan kepala keluarga, jenis kelamin, usia, status pernikahan, pekerjaan utama yang dijalani, serta kepemilikan tempat tinggal, serta akses terhadap infrastruktur seperti penerangan dan pasar. Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai survei (Susenas, MSBP, dan Podes) untuk menganalisis karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga dan tingkat keterlibatan mereka dalam organisasi sosial. Pada penelitian ini, modal sosial diukur melalui beberapa dimensi yang mencerminkan partisipasi dalam kehidupan asosiasi lokal, tingkat heterogenitas internal asosiasi, serta partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan kegiatan kolektif. Berdasarkan hasil penelitian, modal sosial terbukti memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Secara khusus, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan keanggotaan dalam asosiasi/kelompok yang heterogen secara internal membantu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan memperbaiki akses terhadap kredit serta aset yang dimiliki RT. Modal sosial juga terbukti membantu rumah tangga yang lebih miskin mendapatkan manfaat yang setara dengan yang lebih kaya. Hasil ini menunjukkan bahwa modal sosial dapat menjadi indikator penting mengatasi kemiskinan.

Birungi dan Hassan (2011) melakukan penelitian di Uganda dengan mengukur hubungan modal sosial dengan kemiskinan di perdesaan. Model yang

digunakan adalah model *Multinomial Logit* (MNL). Modal sosial yang dimaksud pada penelitian meliputi partisipasi dalam berbagai organisasi berbasis komunitas, seperti kelompok produksi, koperasi simpan pinjam, kelompok petani, dan kelompok perempuan. Hubungan antara modal sosial dan kemiskinan di desa sangat signifikan. Hasil studi mengindikasikan bahwa keterlibatan dalam organisasi sosial memberikan peluang lebih besar bagi petani untuk mempelajari pengelolaan tanah dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sebaliknya, kemiskinan cenderung mengurangi akses dan partisipasi dalam modal sosial karena keterbatasan sumber daya dan aset. Oleh karena itu, peningkatan modal sosial dapat memperkuat kapasitas komunitas untuk bertindak bersama dalam mengatasi tantangan kemiskinan.

Knack (1999) melakukan kajian dengan menggunakan data beberapa negara dengan pendekatan model regresi. Modal sosial yang digunakan ada dua (2) yaitu pemerintah dan masyarakat. Modal sosial pemerintah mencakup kelembagaan formal seperti penegakan hukum, kepastian hukum dan kebebasan masyarakat yang mendukung kerja sama secara kolektif di tingkat negara. Sedangkan modal sosial masyarakat meliputi norma-norma sosial, kepercayaan umum, jaringan informal, dan keanggotaan dalam kelompok untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama di masyarakat. Hasil kajian empiris menunjukkan adanya hubungan antara modal sosial dan kemiskinan, di mana tingginya modal sosial sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta distribusi pendapatan yang semakin seimbang. Modal sosial yang efektif, baik melalui kelembagaan formal maupun

norma sosial, dapat memperkuat insentif untuk produksi dan investasi sehingga pengurangan kemiskinan dapat tercapai.

Hasil penelitian Grootaert (1999) di Indonesia dan Narayan *et al.* (1999) di Bolivia mengindikasikan bahwa modal sosial pada level rumah tangga belum menunjukkan dampak yang berarti terhadap kondisi kemiskinan. Namun demikian, modal sosial tetap memiliki peranan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan modal manusia maupun modal fisik yang dimiliki rumah tangga. Narayan dan Pritchett (1997) menemukan pengaruh modal sosial 4-10 kali lebih kuat di Tanzania; Grootaert (1999) menunjukkan bahwa pengaruhnya dua kali lipat di Indonesia terhadap kemiskinan. Whiteley (2000) menyimpulkan bahwa dampaknya setara antara modal sosial dengan modal manusia terhadap kemiskinan.

Nasution *et al.* (2015) melakukan analisis terhadap hubungan sebab-akibat antara modal sosial dan tingkat kemiskinan di pedesaan Indonesia dengan menggunakan pendekatan model simultan *Two Stage Probit Least Squares* (2SPLS). Modal sosial yang dimaksud pada penelitian ini meliputi partisipasi dalam kegiatan sosial, keberadaan organisasi sosial di tingkat desa, serta hubungan yang terbentuk melalui interaksi sosial tersebut. Modal sosial ini berperan sebagai mekanisme yang memfasilitasi kerja sama, pertukaran informasi, dan kepercayaan antar anggota masyarakat, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan keterjangkauan terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Hubungan antara modal sosial dan kemiskinan di pedesaan adalah bahwa peningkatan modal sosial dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Partisipasi

pada kegiatan sosial dan keanggotaan dalam organisasi sosial dapat memperluas jaringan sosial, membuka akses terhadap program bantuan, serta memacu pembangunan komunitas, yang kesemuanya berdampak positif terhadap kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan di daerah perdesaan.

Secara umum, budaya di perdesaan Indonesia sangat kental dengan gotong royong dan musyawarah begitu juga halnya di perdesaan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan gotong royong, merujuk pada praktek kerja sama atau saling membantu ketika individu-individu berkumpul secara kolaboratif demi kepentingan masyarakat. Kegiatan gotong royong merefleksikan adanya modal sosial yang kuat serta tertanam dalam masyarakat (Dewi *et al.*, 2002; Wikaningrum & Mas'ud, 2020). Esensi gotong royong terletak pada nilai-nilai bekerja sama, solidaritas dan kesediaan secara sukarela untuk berkontribusi demi kepentingan bersama (Hodriani *et al.*, 2019).

Musyawarah sendiri merupakan ciri utama bagi masyarakat perdesaan, yang berfungsi sebagai wadah untuk berkumpul, mendiskusikan isu-isu lokal dan membuat keputusan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Musyawarah ini tidak hanya bersifat administrasi, tetapi juga memiliki potensi untuk mengembangkan modal sosial yang merupakan peran penting bagi pembangunan di perdesaan (Chen *et al.*, 2024). Musyawarah di desa mencerminkan modal sosial karena menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengatasi masalah secara kolektif, berbagi informasi berharga, dan mengembangkan hubungan antara individu yang dapat memperkuat tatanan sosial masyarakat (Skerratt dan Hall, 2011; Opore, 2007). Selain itu, pertemuan seperti musyawarah ini mendorong

pengambilan keputusan partisipatif dan inklusivitas, memperkuat nilai-nilai bersama yang mendukung upaya-upaya kolektif untuk pembangunan masyarakat (Ostrom, 1990).

Kepercayaan dapat dibangun di antara individu melalui berbagai cara yang menjadi landasan modal sosial, seperti menciptakan kesetaraan dalam masyarakat sehingga semua anggota dapat merasakan manfaat bersama (Fernandez & Harris, 1992). Flora *et al.* (n.d.) dan Keyes *et al.* (1996) menyatakan bahwa selain modal manusia dan keuangan, organisasi sosial juga dapat berperan dalam membentuk modal sosial yang turut mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Keyes *et al.* (1996) melakukan studi di Eropa Barat dan menemukan bahwa kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas umum, seperti balai desa dan pusat aktivitas komunitas, dapat meningkatkan pertumbuhan modal sosial.

Modal sosial sering diposisikan sebagai variabel dalam kajian sosiologis karena merujuk pada pola hubungan antarindividu dalam suatu komunitas. Dalam perspektif ini, modal sosial dipahami sebagai entitas yang bersifat relasional bukan kepemilikan individu semata, melainkan sumber daya kolektif yang muncul dari jaringan interaksi sosial. Namun demikian, sejumlah pandangan lain menekankan bahwa modal sosial juga mencerminkan kapasitas individu dalam memperoleh manfaat melalui keterlibatan dalam struktur atau interaksi sosial tertentu (Portes, 1998). Modal sosial dibentuk melalui berbagai interaksi sosial yang bersumber dari nilai-nilai budaya, norma sosial, dan praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat (Rustiadi dan Nasution, 2017).

Secara khusus, kemiskinan di Indonesia masih banyak ditemukan di daerah pedesaan. Data pada tabel 1.1 yang menggambarkan jumlah dan persentase penduduk miskin di berbagai pulau selama periode 2018–2023 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Di antara seluruh wilayah, Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, baik secara total maupun proporsinya. Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pulau Jawa terus menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, meskipun tingkat persentase kemiskinannya tidak menempati posisi tertinggi.

Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa mencapai 13,19 juta jiwa, kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 14,75 juta jiwa akibat dampak pandemi COVID-19. Setelah itu, jumlahnya menurun secara bertahap hingga mencapai 13,62 juta jiwa pada 2023. Namun demikian, persentase kemiskinan di Jawa justru relatif moderat, berada di kisaran 9,6% pada tahun 2023, menunjukkan bahwa meskipun jumlah absolut penduduk miskin tinggi, proporsinya terhadap total populasi lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2018 –2023

Pulau		Sumatera	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	2018	5.919,30	13.190,20	2.038,07	973,17	2.424,92	1.128,89
	2019	5.772,40	12.555,91	1.992,05	961,52	2.395,44	1.108,54
	2020	6.066,18	14.752,04	2.116,49	1.016,12	2.471,42	1.127,45
	2021	5.862,65	14.023,53	2.093,05	975,41	2.383,22	1.165,78
	2022	5.763,42	13.936,59	2.099,23	995,86	2.409,49	1.158,67
	2023	5.669,17	13.621,32	2.086,13	963,47	2.428,30	1.130,13
Persentase penduduk miskin (%)	2018	10,15	9,81	13,47	11,96	9,75	17,08
	2019	9,82	9,35	13,38	5,85	9,49	17,01
	2020	9,70	10,06	13,12	5,74	9,37	16,70
	2021	10,01	10,48	13,53	6,05	9,61	17,06
	2022	9,37	9,76	13,12	5,80	9,40	16,41
	2023	9,15	9,60	13,11	5,66	9,51	16,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Maluku dan Papua menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi secara persentase, yaitu sebesar 17,08% pada 2018 dan masih berada di angka 16,43% pada 2023, meskipun jumlah penduduk miskinnya jauh lebih sedikit dibandingkan Jawa. Pulau Bali dan Nusa Tenggara juga memiliki persentase kemiskinan yang relatif tinggi, sekitar 13,11% pada 2023, sementara Pulau Kalimantan konsisten menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional, hanya 5,66% pada 2023. Sumatera dan Sulawesi berada pada posisi menengah, dengan tingkat kemiskinan sekitar 9–10% selama periode yang sama. Secara keseluruhan, tren nasional menunjukkan penurunan kemiskinan pasca pandemi di hampir seluruh pulau, tetapi ketimpangan antarwilayah tetap tinggi. Jawa menanggung beban jumlah penduduk miskin terbesar, sementara kawasan timur Indonesia (Maluku dan Papua) masih menghadapi kemiskinan struktural dengan persentase yang tinggi.

Berikutnya, kajian kemiskinan diarahkan pada Pulau Jawa. Berdasarkan Tabel 1.2, DKI Jakarta pusat kegiatan ekonomi di Indonesia mencatat jumlah penduduk miskin yang relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 372,26 ribu jiwa. Namun, angka ini mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 477,83 ribu jiwa pada tahun 2023, mengindikasikan adanya dinamika sosial-ekonomi yang perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, Jawa Barat menunjukkan angka kemiskinan yang cukup besar. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 3,53 juta jiwa dan terus meningkat hingga 3,89 juta jiwa pada tahun 2023. Selain dari sisi jumlah, persentase penduduk miskin di Jawa Barat juga tetap tinggi, mencerminkan tantangan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa tahun 2018 – 2023

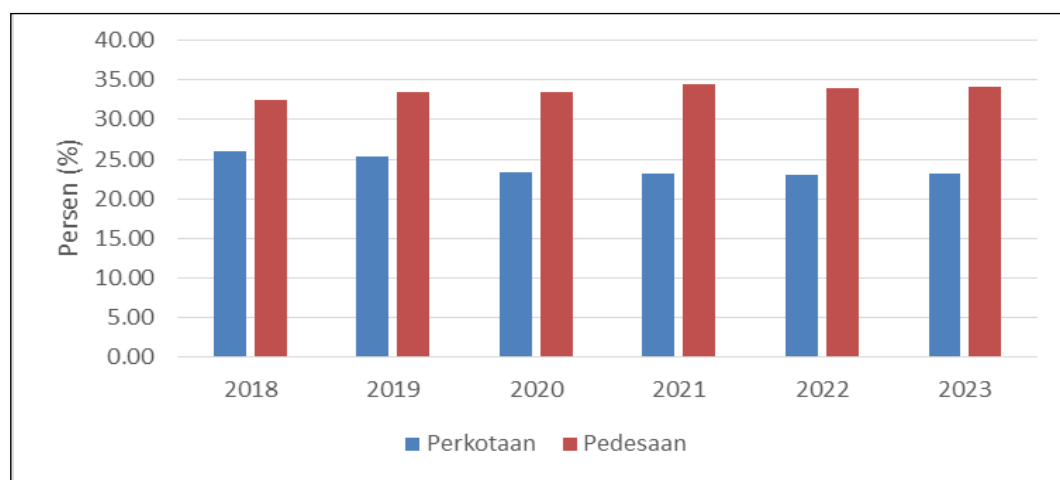
Provinsi di Jawa		DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	2018	372,26	3.539,40	3.867,42	450,25	4.292,15	668,74
	2019	362,30	3.375,89	3.679,40	440,89	4.056,00	641,42
	2020	496,84	4.188,52	4.119,93	503,14	4.585,97	857,64
	2021	498,29	4.004,86	3.934,01	474,49	4.259,60	852,28
	2022	494,93	4.053,62	3.858,23	463,63	4.236,51	829,66
	2023	477,83	3.888,60	3.791,5	448,47	4.188,81	826,13
Persentase penduduk miskin (%)	2018	3,55	7,25	11,19	11,81	10,85	5,25
	2019	3,42	6,82	10,58	11,44	10,20	4,94
	2020	4,69	8,43	11,84	12,80	11,46	6,63
	2021	4,67	7,97	11,25	11,91	10,59	6,50
	2022	4,61	7,98	10,98	11,49	10,49	6,24
	2023	4,44	7,62	10,77	11,04	10,35	6,17

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2025

Tabel 1.2 menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dari 3,8 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 3,79 juta jiwa pada tahun 2023, belum memberikan dampak yang berarti untuk mengurangi kemiskinan di provinsi tersebut. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi menandakan perlunya upaya yang lebih berkelanjutan dan terarah. Berbeda dengan hal tersebut, DI Yogyakarta menunjukkan pola yang cenderung stabil. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 450,25 ribu jiwa, kemudian turun menjadi 448,47 ribu jiwa pada tahun 2023. Di sisi lain, Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi menunjukkan penurunan dari 4,29 juta jiwa di tahun 2018 menjadi 4,19 juta jiwa di tahun 2023.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Berdasarkan data, Jawa Timur secara konsisten menempati posisi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, diikuti Jawa Barat, sedangkan Jawa Tengah berada pada urutan ketiga dengan kontribusi berkisar antara 27%–29% dari total penduduk miskin di Pulau Jawa. Meskipun secara kuantitatif Jawa Timur dan Jawa Barat menunjukkan angka absolut

kemiskinan yang lebih besar. Namun, jika dilihat dari tingkat kemiskinan (*poverty rate*) di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Keadaan ini mencerminkan struktur ekonomi daerah yang masih berfokus pada sektor pertanian sebagai sektor utama. Berdasarkan data BPS (2020), kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 9,3%, menandakan peranan besar sektor primer dalam perekonomian wilayah tersebut. Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki jumlah desa yang lebih banyak dibandingkan dua provinsi lainnya, yaitu sebanyak 8.562 desa, yang menunjukkan karakter wilayah yang lebih agraris dan berorientasi pada ekonomi perdesaan. Selanjutnya, kemiskinan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Jawa Tengah ditinjau berdasarkan gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 (%) (BPS Provinsi Jawa Tengah 2018-2023)

Gambar 1.1 menggambarkan tren persentase penduduk miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2018 hingga 2023. Secara umum, terlihat adanya perbedaan perkotaan dan perdesaan, tingkat

kemiskinan di perdesaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di perdesaan berada di kisaran 33%, sedangkan di perkotaan sekitar 25%. Grafik memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Faktor utama yang memperburuk kemiskinan di wilayah perdesaan antara lain adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang ekonomi, serta infrastruktur yang belum memadai. Menurut Bank Dunia (2017), kemiskinan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketersediaan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Keterbatasan dalam mengakses kedua sektor tersebut berimplikasi pada rendahnya peluang keluarga miskin untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Kesehatan yang buruk serta pendidikan yang tidak memadai memperkuat lingkaran kemiskinan, karena anak-anak dari keluarga miskin mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi diri dan memperoleh penghasilan yang layak di masa depan. Sofianto *et al.* (2024) meneliti 263 desa di Provinsi Jawa Tengah dan menemukan bahwa dari sisi sarana dan prasarana pendidikan, sebagian besar desa sudah tergolong cukup memadai. Namun, fasilitas untuk jenjang pendidikan lanjutan masih perlu ditingkatkan. Secara umum, infrastruktur layanan pendidikan dasar di perdesaan sudah baik, tetapi akses terhadap pendidikan lanjutan masih terbatas. Sementara itu, layanan kesehatan dasar di sejumlah desa masih memerlukan perhatian dan peningkatan, karena masih ada desa dengan kondisi

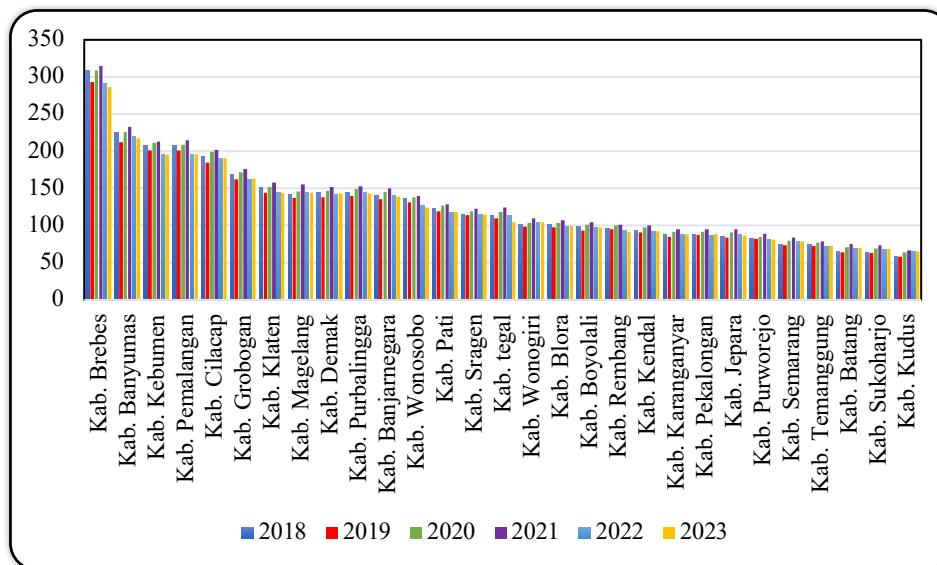
pelayanan yang buruk bahkan sangat buruk. Penguatan fasilitas serta sumber daya kesehatan di tingkat desa juga perlu ditingkatkan.

Peningkatan angka kemiskinan di wilayah perdesaan menunjukkan adanya tantangan besar dalam upaya penanggulangannya. Ketimpangan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan antara wilayah perdesaan dan perkotaan menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi kemiskinan. Keterbatasan infrastruktur terutama pendidikan dan kesehatan di daerah perdesaan rentan mengalami stagnasi ekonomi, yang pada akhirnya memperdalam tingkat kemiskinan.

Keberagaman jumlah dan status desa di 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya kompleksitas dalam permasalahan kemiskinan. Berdasarkan Gambar 1.2, Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang memerlukan perhatian khusus karena jumlah penduduk miskinnya tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, menandakan perlunya intervensi yang lebih terarah dalam peningkatan akses dan pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Brebes dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kabupaten Banyumas juga memperlihatkan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, berada di atas rata-rata provinsi. Jumlah penduduk miskin di Banyumas tahun 2018 sebesar 226,23 ribu jiwa, dan meskipun mengalami sedikit penurunan, jumlah tersebut tetap tinggi dengan 216,5 ribu jiwa pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan, meskipun tantangan pengurangan kemiskinan masih signifikan. Sementara itu, beberapa kabupaten lain seperti Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati,

Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Batang juga mencatatkan tren peningkatan jumlah penduduk miskin selama periode 2018 hingga 2023. Meskipun peningkatan yang terjadi relatif lebih rendah dibandingkan Kabupaten Brebes dan Banyumas dan jumlah penduduk miskin masih berada di bawah rata-rata provinsi, kondisi tersebut tetap mencerminkan perlunya perumusan strategi yang lebih efektif serta perhatian yang lebih intensif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara keseluruhan, data ini menggarisbawahi bahwa perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten di Jawa Tengah cukup signifikan, sehingga pendekatan yang lebih spesifik dan berbasis karakteristik daerah diperlukan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di provinsi ini.

Pada Gambar 1.2, jumlah penduduk miskin ditampilkan dengan urutan berdasarkan kabupaten, mulai dari wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi hingga yang terendah. Kabupaten Brebes dan Banyumas menjadi penting untuk diteliti dikarenakan jumlah penduduk miskin jauh di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Brebes dan Banyumas layak menjadi fokus penelitian karena jumlah penduduk miskinnya berada jauh di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Banyumas yang memiliki persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi, yaitu sebesar 13,50% pada tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi 13,26% pada tahun 2020. Selain itu, kabupaten lain seperti Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Batang juga menunjukkan peningkatan dalam jumlah penduduk miskin dan persentasenya pada kedua tahun tersebut, namun besaran persentase kemiskinan masih di bawah nilai Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin di 29 Kabupaten Tahun 2018 -2023

Penurunan jumlah penduduk miskin tidak terlalu signifikan di Kabupaten Brebes sebesar 420 jiwa atau turun sebesar 0,12%. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas sebesar 226,2 ribu jiwa menjadi 225 ribu jiwa atau penurunan sebanyak 360 jiwa atau turun 0,17%. Kabupaten Tegal masuk kategori memiliki jumlah masyarakat miskin sedang, yaitu sebesar 114,1 ribu jiwa di tahun 2018 dan pada tahun 2020 menjadi 117,5 ribu jiwa atau naik sebesar 2,89%. Kabupaten Pati termasuk dalam kategori kemiskinan tingkat menengah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati mencapai 123,9 ribu jiwa di tahun 2018, dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 127,4 ribu jiwa (kenaikan sebesar 2,74%). Tahun 2018, Kabupaten Kudus dan Batang memiliki jumlah penduduk miskin masing-masing sebesar 60 ribu jiwa dan 66,1 ribu jiwa dan tahun 2020 di Kabupaten Kudus dan Batang juga mengalami kenaikan jumlah orang miskin masing-masing naik 6,5% dan 6,3%.

Kemiskinan di perdesaan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan faktor non ekonomi seperti kekuatan modal sosial masyarakat. Menurut Putnam (1993), modal sosial merupakan jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang dapat memfasilitasi koordinasi serta kerja sama untuk keuntungan bersama. Modal sosial memiliki peran penting dalam memperkuat kohesi sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan mekanisme dukungan informal yang dapat membantu rumah tangga miskin bertahan dalam kondisi keterbatasan (Coleman, 1988; Woolcock & Narayan, 2000). Pada konteks perdesaan, keberadaan gotong royong, musyawarah, partisipasi lingkungan, serta kelembagaan ekonomi seperti koperasi merupakan bentuk nyata dari modal sosial yang berpotensi mendukung strategi pengentasan kemiskinan. Tabel 1.3 menunjukkan modal sosial di Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Kudus, dan Batang di tahun 2018 dan 2020.

Tabel 1. 3 Deskripsi Modal Sosial Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Kudus, dan Batang Tahun 2018 dan 2020

Kabupaten	Tahun	Jumlah Desa	Musyawarah (Jumlah / desa)	Desa yang memiliki koperasi	Gotong Royong (%)	Desa Aktif Gotong Royong	Partisipasi Lingkungan (%)	Desa aktif Partisipasi Lingkungan
Brebes	2018	292	6	76	71,57	209	4,45	13
	2020	292	7	87	70,54	206	4,79	14
Banyumas	2018	301	7	92	95,34	287	13,28	40
	2020	301	8	76	96,3	290	17,6	53
Tegal	2018	281	6	58	72,95	205	9,25	26
	2020	281	7	74	75,44	212	10,32	29
Pati	2018	401	6	143	89,27	358	8,97	36
	2020	401	7	101	88,77	356	11,97	48
Kudus	2018	123	5	65	91,86	113	17,88	22
	2020	123	5	62	95,12	117	18,69	23
Batang	2018	239	7	73	87,02	208	13,80	33
	2020	239	8	48	94,14	225	10,04	24

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2020, diolah 2025

Tabel 1.3 memperlihatkan dimensi modal sosial di enam kabupaten yang menunjukkan dinamika sosial yang cukup menarik. Partisipasi gotong royong secara

umum berada pada tingkat yang tinggi dan cenderung stabil atau meningkat, khususnya di Batang yang mengalami kenaikan signifikan dari 87,02% pada tahun 2018 menjadi 94,14% pada tahun 2020, serta di Kudus yang naik dari 91,86% menjadi 95,12% pada periode yang sama. Namun demikian, Brebes dan Pati justru mengalami sedikit penurunan yang dapat dihubungkan dengan perubahan sosial-ekonomi atau pergeseran pola kehidupan masyarakat perdesaan.

Musyawarah memperlihatkan tren positif di hampir seluruh kabupaten, di mana Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, dan Batang mengalami peningkatan satu poin dalam skor musyawarah, sedangkan Kudus tetap stabil di angka lima. Peningkatan ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas deliberasi di tingkat desa, yang mungkin didorong oleh regulasi pemerintah serta praktik partisipatif dalam pengambilan keputusan. Partisipasi lingkungan menunjukkan variasi antarwilayah. Kabupaten Banyumas dan Pati mencatat kenaikan yang cukup berarti, masing-masing dari 13,28% menjadi 17,60% dan dari 8,97% menjadi 11,97%. Sementara itu, Batang mengalami penurunan dari 13,80% menjadi 10,0%, menunjukkan kemungkinan berkurangnya fokus masyarakat pada isu-isu lingkungan di daerah tersebut.

Sementara itu, dimensi koperasi sebagai representasi kelembagaan ekonomi desa, menunjukkan pola peningkatan jumlah desa yang memiliki koperasi di Brebes dan Tegal yakni dari 76 menjadi 87 desa di Brebes, serta dari 58 menjadi 74 desa di Tegal. Sebaliknya, Banyumas, Pati, Kudus, dan Batang justru mengalami penurunan yang cukup tajam, di Pati (143 desa turun menjadi 101 desa) dan Batang (73 desa turun menjadi 48 desa). Secara umum, gambaran ini memperlihatkan

bahwa modal sosial di kabupaten-kabupaten penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun, variasi ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, mengingat masih tingginya angka kemiskinan di beberapa kabupaten seperti Brebes, Banyumas, dan Pati. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan sosial dengan capaian ekonomi.

Kondisi modal sosial dan kemiskinan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah menunjukkan variasi yang menarik. Kabupaten Brebes dan Banyumas, misalnya, memiliki tingkat gotong royong dan musyawarah yang tinggi, disertai dengan peningkatan partisipasi masyarakat, meskipun penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi relatif kecil, masing-masing hanya sebesar 0,12% dan 0,17%. Sementara itu, Kabupaten Tegal memperlihatkan perbaikan pada hampir semua indikator modal sosial, termasuk koperasi, tetapi jumlah penduduk miskin justru bertambah 2,89%.

Kabupaten Pati, Kudus, dan Batang menunjukkan pola berbeda, meskipun gotong royong dan musyawarah tetap kuat, jumlah koperasi desa menurun cukup nyata. Pada periode yang sama, ketiga kabupaten ini justru mencatat kenaikan jumlah penduduk miskin, yaitu 2,74% di Pati, 6,5% di Kudus, dan 6,3% di Batang. Gambaran ini memperlihatkan bahwa modal sosial di tingkat lokal memiliki variasi yang belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi kemiskinan.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini ditujukan pada Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus, yang memiliki variasi karakteristik geografis, sosial-ekonomi, dan budaya yang beragam. Hal ini bertujuan memberikan pandangan komprehensif mengenai kemiskinan di berbagai wilayah

di Jawa Tengah. Pada tahun 2018, situasi ekonomi dianggap dalam kondisi normal sedangkan pada tahun 2020 terjadi kondisi ekonomi yang ekstrem akibat pandemi Covid-19. Namun, jika ditinjau dari karakter wilayah dengan kondisi penduduknya bekerja di sektor pertanian atau agraris justru mengalami penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Brebes dan Banyumas dari tahun 2018 ke 2020 sebesar 0,12% dan 0,17%, sedangkan untuk Kabupaten Tegal dan Pati mengalami kenaikan berkisar 2% disebabkan karakter wilayah kombinasi antara agraris dan industri. Kenaikan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi di Kabupaten Batang dan Kudus, dengan persentase sekitar 6%, yang dipengaruhi oleh dominasi sektor industri dalam perekonomian daerah tersebut.

Penekanan analisis pada tahun 2018 dan 2020 dilakukan untuk mengacu pada data Potensi Desa (Podes) yang relevan dan mendukung analisis berbasis data mikro. Pemilihan titik tahun ini dilakukan dengan memperhatikan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam periode tersebut, khususnya dalam konteks perkembangan kemiskinan di wilayah perdesaan. Fokus utama diberikan pada Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Batang, Tegal, dan Kudus, mengingat karakteristik kemiskinan di perdesaan tersebut menunjukkan pola dan tantangan tersendiri yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil di lapangan serta menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah.

Berdasarkan uraian di atas, kabupaten yang menjadi sampel penelitian, yaitu Kabupaten Brebes dan Banyumas yang mewakili kemiskinan tinggi dengan jumlah

penduduk miskin di atas nilai rata-rata Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pati yang mewakili kemiskinan sedang, serta Kabupaten Kudus dan Batang mewakili daerah dengan tingkat kemiskinan rendah, dengan jumlah penduduk miskinnya berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 dan 2020. Bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Kudus, dan Batang mengindikasikan bahwa faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh penting terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui peran modal sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan, meskipun berbagai program pengentasan telah diimplementasikan. Beberapa kabupaten seperti Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Kudus, dan Batang tetap menunjukkan angka kemiskinan yang relatif tinggi. Keadaan ini menekankan pentingnya analisis yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek selain ekonomi yang dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang diyakini memiliki kontribusi penting adalah modal sosial, yang mencakup dimensi gotong royong, partisipasi dalam koperasi, musyawarah desa, serta jaringan sosial yang terbentuk di masyarakat.

Beragam pendekatan teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Coleman (1988) dan Putnam (1993), menunjukkan bahwa modal sosial dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan efisiensi kolektif, serta mendorong kepercayaan dan norma sosial yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian empiris juga mengindikasikan bahwa

modal sosial berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan melalui mekanisme akses terhadap sumber daya, penguatan solidaritas sosial, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam lembaga lokal.

Namun demikian, sebagian besar kajian terdahulu masih terbatas pada pengukuran modal sosial di tingkat rumah tangga (RT), sementara pemahaman mengenai modal sosial pada level komunitas atau desa masih jarang dilakukan. Padahal, pada level komunitas, interaksi sosial yang lebih luas dapat memberikan gambaran penting mengenai bagaimana modal sosial berperan dalam membentuk kesejahteraan ekonomi secara kolektif. Pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung modal sosial yang terdiri dari koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan terhadap kemiskinan di perdesaan?
2. Bagaimana pengaruh langsung pemerintahan desa terhadap kemiskinan di perdesaan?
3. Bagaimana pemerintahan desa sebagai pemediasi pada pengaruh modal sosial meliputi koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan terhadap kemiskinan di perdesaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Pemahaman secara mendalam pengaruh modal sosial beserta dimensinya terhadap kemiskinan di perdesaan dan tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Batang, dan Kudus di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung antara modal sosial yang terdiri dari koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan terhadap kemiskinan di perdesaan.
2. Menganalisis pengaruh langsung pemerintahan desa ke kemiskinan perdesaan.
3. Menganalisis pemerintahan desa sebagai variabel mediasi pada hubungan antara modal sosial yang terdiri dari koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan dengan kemiskinan di perdesaan.

1.4 Motivasi Penelitian

Kemiskinan di perdesaan terus menjadi salah satu masalah dalam pembangunan, karena sifatnya yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Salah satu solusi potensial untuk mengatasinya adalah dengan memanfaatkan peran aktif masyarakat desa melalui modal sosial. Modal sosial seperti partisipasi gotong-royong, musyawarah, partisipasi menjaga lingkungan dan koperasi desa mencakup elemen-elemen seperti kepercayaan, kerja sama, dan dukungan timbal balik, merupakan aset penting yang dapat menggerakkan sumber daya lokal, meningkatkan ketahanan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Namun, efektivitas modal sosial sebagai solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan perdesaan memerlukan pengkajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana modal sosial dapat dioptimalkan dalam berbagai konteks lokal. Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa, menghadapi

tantangan serius terkait tingginya angka kemiskinan. Pemilihan sampel perdesaan dari beberapa kabupaten di provinsi ini, seperti Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus, didasarkan pada variasi tingkat kemiskinan dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah yang mencerminkan keragaman kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut.

Data yang digunakan di penelitian adalah data mikro yang diperoleh dari Podes (BPS Indonesia), Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah dan sumber lainnya, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai dinamika modal sosial dan perannya dalam pengentasan kemiskinan di tingkat perdesaan. Kemiskinan di perdesaan masih menjadi tantangan yang kompleks dan memerlukan solusi dengan melibatkan peran masyarakat desa. Modal sosial merupakan aset penting bagi masyarakat perdesaan. Dorongan terjalinnya kepercayaan, kerja sama, dan saling mendukung, modal sosial mampu menggerakkan sumber daya lokal, meningkatkan daya tahan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan mengenai hubungan pengaruh langsung dan tidak langsung modal sosial yang meliputi partisipasi gotong royong, musyawarah, partisipasi menjaga lingkungan, dan keberadaan koperasi terhadap kemiskinan perdesaan. Selain itu,

penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai peran pemerintahan desa sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut, khususnya pada konteks perdesaan di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Kudus, dan Batang di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi pemerintahan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam memahami bagaimana modal sosial memengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan dapat lebih optimal dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta memperkuat praktik-praktik sosial seperti koperasi, gotong royong, musyawarah, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa yang lebih efektif, khususnya yang mengintegrasikan peran modal sosial dan keterlibatan pemerintah desa dalam upaya pengurangan kemiskinan di perdesaan.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini dari sisi metodologi adalah penggunaan pendekatan analisis hubungan langsung dan tidak langsung melalui model *Structural Equation Modeling–Partial Least Square* (SEM-PLS). Metode SEM-PLS digunakan untuk menganalisis hubungan antara modal sosial, pemerintahan desa, dan kemiskinan di perdesaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu

mengakomodasi model dengan variabel laten serta indikator yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Selain itu, SEM-PLS memungkinkan identifikasi indikator yang paling representatif dalam mengukur konstruksi modal sosial, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara aspek sosial dan kemiskinan perdesaan. Karakteristik data perdesaan yang heterogen, termasuk perbedaan antar desa serta variasi dalam praktik modal sosial, menuntut penggunaan metode yang fleksibel dan robust dalam mengestimasi hubungan antar variabel tersebut.

Kontribusi dari sisi empiris dalam penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan antara modal sosial dan kemiskinan dengan memasukkan pemerintahan desa sebagai variabel mediasi, yang masih relatif terbatas dikaji secara komprehensif di Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengungkapan mekanisme pengaruh modal sosial terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peran pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa variasi dalam praktik modal sosial yang mencakup dimensi koperasi, musyawarah, gotong royong, dan kepedulian menjaga lingkungan berpengaruh terhadap kemiskinan di perdesaan. Peran pemerintahan desa dalam memfasilitasi dan mengoptimalkan modal sosial tersebut menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya dampak terhadap penurunan kemiskinan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya bukti empiris mengenai hubungan antara modal sosial dan kemiskinan, tetapi juga memberikan dasar analitis bagi perumusan kebijakan pembangunan perdesaan yang lebih efektif, dan partisipatif di perdesaan Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Kudus dan Batang di Provinsi Jawa Tengah.

1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian terbatas di desa 6 (enam) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Kudus dan Batang. Ukuran kemiskinan di perdesaan terbatas dengan jumlah penduduk miskin dan penggunaan dimensi modal sosial yang terbatas yang bersumber dari data Podes-BPS di perdesaan 6 kabupaten yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Kudus dan Batang di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dan 2020. Batasan lainnya yang berkaitan dengan rekomendasi kebijakan terkait modal sosial dan kemiskinan menurut Nyangena dan Sterner (2008) kebijakan tidak dapat diimplementasikan terkait beberapa hal, yaitu: (1) sejarah dan budaya masyarakat setempat yang berkaitan dengan modal sosial; (2) ada perbaikan penilaian modal sosial pada penelitian selanjutnya agar kebijakan lebih responsif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan di Perdesaan

Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak serta memiliki akses terbatas terhadap peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemahaman ini memiliki hubungan erat dengan teori lingkaran kemiskinan (*Poverty Cycle Theory*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Teori tersebut menegaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya pendapatan, melainkan merupakan hasil dari rangkaian sebab-akibat yang saling memperkuat dan sulit diputus. Pada kerangka ini, kemiskinan dipandang sebagai proses berulang: pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan minim, tabungan yang kecil membatasi investasi, investasi yang terbatas menurunkan produktivitas, dan produktivitas yang rendah kembali mempertahankan pendapatan pada tingkat yang rendah.

Jika dikaitkan, konsep kemiskinan menekankan sifat multidimensi dari masalah ini, sedangkan teori lingkaran kemiskinan menawarkan penjelasan mekanisme ekonomi yang menghubungkan dan memperkuat dimensi-dimensi tersebut. Pada wilayah perdesaan, misalnya, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan (dimensi sosial) berdampak pada rendahnya produktivitas kerja (dimensi ekonomi), sehingga masyarakat terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Dengan demikian, teori ini memberikan pemahaman mengapa kemiskinan di perdesaan sering bersifat kronis dan membutuhkan intervensi yang menyeluruh, mencakup peningkatan pendapatan, pengembangan modal manusia, perbaikan infrastruktur, serta perluasan akses pasar. Berdasarkan BPS (2020), kemiskinan diukur dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam konsep ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan pokok, khususnya kebutuhan pangan dan non-pangan, yang dinilai berdasarkan tingkat pengeluaran.

Penduduk Miskin merupakan individu yang pengeluaran per kapitanya per bulan di batas bawah garis kemiskinan. Menurut BPS, garis kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) dihitung sebagai total dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Individu dengan pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM mencerminkan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sementara itu, GKNM mencakup kebutuhan dasar non-pangan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, yang terdiri dari 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis di perdesaan.

Haughton & Khandker (2009) dan World Bank (2000) menyatakan kemiskinan merupakan kekurangan dalam kesejahteraan.¹ Pandangan konvensional

¹ Konsep kesejahteraan sulit dan beraneka ragam yang membutuhkan kejelasan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, konsep tersebut melahirkan berbagai pendekatan yang menggambarkan kesejahteraan sehingga teori pengukuran kemiskinan memanfaatkan pendekatan kesejahteraan (*well-being*) dengan menggunakan analisis data yang berbeda.

mengaitkan kesejahteraan terutama dengan menguasai komoditas, jadi masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan atau konsumsi yang cukup untuk mempertahankan standar hidup dasar. Kemiskinan juga mungkin terkait dengan jenis konsumsi tertentu, misalnya: orang bisa jadi miskin kepemilikan rumah atau miskin makanan atau miskin kesehatan. Dimensi kemiskinan ini sering kali dapat diukur secara langsung, contohnya melalui pengukuran malnutrisi atau tingkat melek huruf. Pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kesejahteraan dan kemiskinan menekankan pada kemampuan individu untuk berpartisipasi dan berfungsi dalam masyarakat. Masyarakat yang berada di kondisi miskin seringkali keterbatasan pada kemampuan yang mendasar, penghasilan atau pendidikan yang rendah, kualitas kesehatan yang rendah, tidak berdaya, dan juga terbatas dalam memiliki kebebasan politik.

Kemiskinan dalam perspektif multidimensi mengacu pada perampasan martabat manusia, peluang dan kepuasan dalam arti pangan, gizi, tenaga, pendidikan, kesehatan, lalu lintas, dan pendapatan (Alkire dan Foster, 2011; Chen dan Ravallion, 2008). Sach (2003) menjelaskan bahwa masyarakat miskin akan tetap miskin dikarenakan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk produktif. Sach mengklasifikasikan kemiskinan dalam 3 kategori yakni kemiskinan ekstrem (absolut), moderat dan relatif. Kemiskinan ekstrem artinya keadaan kebutuhan dasar suatu rumah tangga untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Rumah tangga yang berada dalam kemiskinan ekstrem menderita kelaparan kronis, kurangnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, kekurangan air minum layak konsumsi

(bersih) dan sanitasi yang sehat, dan tidak mampu memberikan Pendidikan kepada beberapa atau semua anak di dalam keluarga/RT yang kurang mampu/miskin. Kemiskinan moderat merupakan situasi di mana rumah tangga atau keluarga hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai kondisi ketika pendapatan rumah tangga lebih rendah dari persentase rata-rata pendapatan nasional.

Menurut Sen (1985) kemiskinan tidak hanya berarti memiliki pendapatan yang lebih rendah dari orang lain, namun juga berhubungan dengan kemampuan individu atau masyarakat dalam menyelesaikan masalah keterbatasan dalam akses fasilitas publik. Menurut Chambers (1987), kemiskinan terkait dengan isu-isu kesenjangan sosial, keterbatasan sumber daya seperti air, perumahan, pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan (sanitasi), pendidikan, dan sarana transportasi. Muyeed (1982) mengamati beberapa indikator kuantitatif yang dianggap memiliki hubungan sebab-akibat yang erat dengan tujuan pembangunan desa serta pengembangan desa sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, sebagai berikut:

1. Pembangunan tidak lagi dianggap sebagai proses yang netral secara politik berdasarkan teori-teori ilmu sosial yang diterapkan berbagai kekuatan sosial-ekonomi yang bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat perdesaan yang miskin tetapi pada saat yang sama menjaga keharmonisan dan semangat kerja sama dalam masyarakat.
2. Kebijakan pembangunan nasional harus mencakup perencanaan pembangunan perdesaan. Negara berkembang yang didominasi perdesaan

(75% atau lebih populasi yang tinggal di daerah perdesaan dan 50% atau lebih pendapatan nasional berasal dari sektor perdesaan). Upaya pembangunan nasional harus diarahkan ke perdesaan. Pembangunan perdesaan sebagai dasar pembangunan nasional.

3. Konsep pembangunan perdesaan yang fokus pada pengentasan kemiskinan berlandaskan pada pemahaman baru mengenai produksi dan produktivitas, penggunaan teknologi yang tepat, investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, aspek ini juga meliputi pembentukan serta pemerataan pendapatan, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, serta kesetaraan peluang, yang keseluruhannya bertujuan untuk menekan tingkat kemiskinan
4. Seperti halnya pertumbuhan GNP, peningkatan produksi pangan dalam suatu negara kehilangan maknanya jika sebagian besar penduduk tidak memiliki sarana untuk membeli pangan. Jadi, sekalipun diproduksi secara nasional dalam jumlah yang cukup, hal itu tidak dapat mengurangi masalah kelaparan di tingkat lokal jika masalah pengangguran tidak diselesaikan secara bersamaan.
5. Masalah produksi dan pengangguran terkait erat dengan pilihan teknologi tepat guna. Pertimbangan serius harus diberikan untuk menyesuaikan jenis teknologi dengan jenis organisasi manusia yang dimaksudkan untuk penerapannya. Contohnya adalah koperasi dan diharuskan untuk bekerja secara kolektif melalui loyalitas dan komitmen kelompok.

6. Pembangunan perdesaan anti-kemiskinan harus mengikuti prinsip partisipasi rakyat dan pengambilan keputusan sehingga mobilisasi sumber daya lokal yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat tercapai. Sebagai strategi pengelolaan, hal ini membutuhkan kebijakan desentralisasi dalam struktur nasional dan pembentukan lembaga yang sesuai di akar rumput untuk mendorong partisipasi lokal.

Menurut Banerjee dan Duflo (2006), kemiskinan tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan, tetapi mencerminkan ketiadaan sejumlah kemampuan dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sosial secara layak. Kemiskinan mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal karena rendahnya pendapatan, serta keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan untuk mengatasi penyakit. Selain itu, kemiskinan juga dapat terlihat dari tidak adanya kesempatan memperoleh pendidikan, keterlibatan dalam proses politik, atau menjalankan peran sosial di masyarakat.

2.2 Modal Sosial

2.2.1 Definisi Modal Sosial

Teori dasar dari modal sosial dikemukakan oleh Bourdieu, Coleman dan Putnam. Gagasan utama dari Bourdieu (1986) berkaitan dengan distribusi dan kontrol ruang sosial. Modal sosial diartikan sebagai potensi yang dimiliki oleh individu/kelompok dalam suatu interaksi, baik bersifat aktual maupun potensial. Sumber daya ini terjalin melalui hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan telah terstruktur secara kelembagaan. Putnam (1993) menyatakan bahwa modal

sosial terdiri dari aspek-aspek seperti hubungan sosial, norma, dan kepercayaan dalam suatu komunitas, yang mendorong kolaborasi serta tindakan kolektif untuk kepentingan bersama. Modal sosial yang dikombinasikan dengan modal manusia dan modal fisik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun modal sosial memiliki keunikan karena dapat meningkatkan manfaat investasi dalam modal fisik dan modal manusia.

Putnam berfokus pada asosiasi "horizontal" dimana para anggota memiliki hubungan satu sama lain atas dasar kesetaraan. Putnam (2000) membagi modal sosial menjadi 2 yaitu: *Bonding social capital* adalah hubungan antar anggota kelompok dan *Bridging social capital* merupakan hubungan antara individu/anggota suatu kelompok dengan individu/kelompok lain di luar kelompok tersebut. Menurut Coleman (1988), modal sosial merupakan aspek yang berhubungan dengan sistem sosial dan tanggung jawab yang mendukung serta mempermudah aktivitas individu. Pandangan tentang modal sosial diperluas dengan memasukkan hubungan vertikal yang ditandai oleh struktur hierarki dan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Modal sosial diartikan sebagai aset atau sumber daya dalam tatanan sosial yang berperan penting bagi individu dalam meningkatkan produktivitas, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan tertentu.

Ada tiga bentuk modal sosial, yaitu: (1) *obligations dan expectations* (kewajiban dan ekspektasi) yang didasarkan pada kepercayaan dalam lingkungan sosial dan tingkat kewajiban yang berlaku; (2) saluran informasi – memperoleh informasi melalui hubungan sosial; (3) Norma sosial yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif serta mendorong dampak positif. North (1990))

memperluas konsep modal sosial dengan mencakup hubungan serta struktur kelembagaan yang diakui secara resmi, seperti pemerintahan, rezim politik, sistem peradilan, dan penegakan hukum. Selain itu, memasukkan batasan yang tidak resmi, seperti adat istiadat, tradisi, dan norma ‘tabu’.² Namun, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat pengaruh ini memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai norma-norma perilaku yang berakar pada budaya, serta bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan aturan formal. Knack (1999; 2002) membagi modal sosial menjadi 2 jenis, yaitu modal sosial yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat. Menurut Knack, modal sosial pemerintah terdiri dari kelembagaan, hukum, dan hak-hak sipil yang memengaruhi kapasitas individu dalam bekerja sama guna mencapai tujuan bersama, sedangkan modal sosial sipil terdiri dari nilai-nilai umum, norma, jaringan informal, dan partisipasi dalam kelompok. Meskipun terdapat berbagai definisi dan interpretasi tentang konsep modal sosial, semakin banyak yang sepakat bahwa modal sosial merujuk pada kapasitas individu atau kelompok dalam memperoleh manfaat melalui keterlibatan dalam jaringan sosial atau struktur sosial lainnya (Portes, 1998). Jika ditinjau dari perspektif struktur sosial yang lebih luas, Modal sosial adalah konsep yang berlaku pada berbagai level, yaitu mikro, meso, dan makro. Pada level makro, modal sosial seperti pemerintahan, sistem hukum, dan organisasi/partai politik.

Sementara itu, pada tingkat mikro, modal sosial merujuk pada jaringan serta norma yang mengatur hubungan antara individu, rumah tangga, dan komunitas.

² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tabu adalah yang dianggap suci (tidak boleh disentuh, diucapkan, dan sebagainya), pantangan, larangan

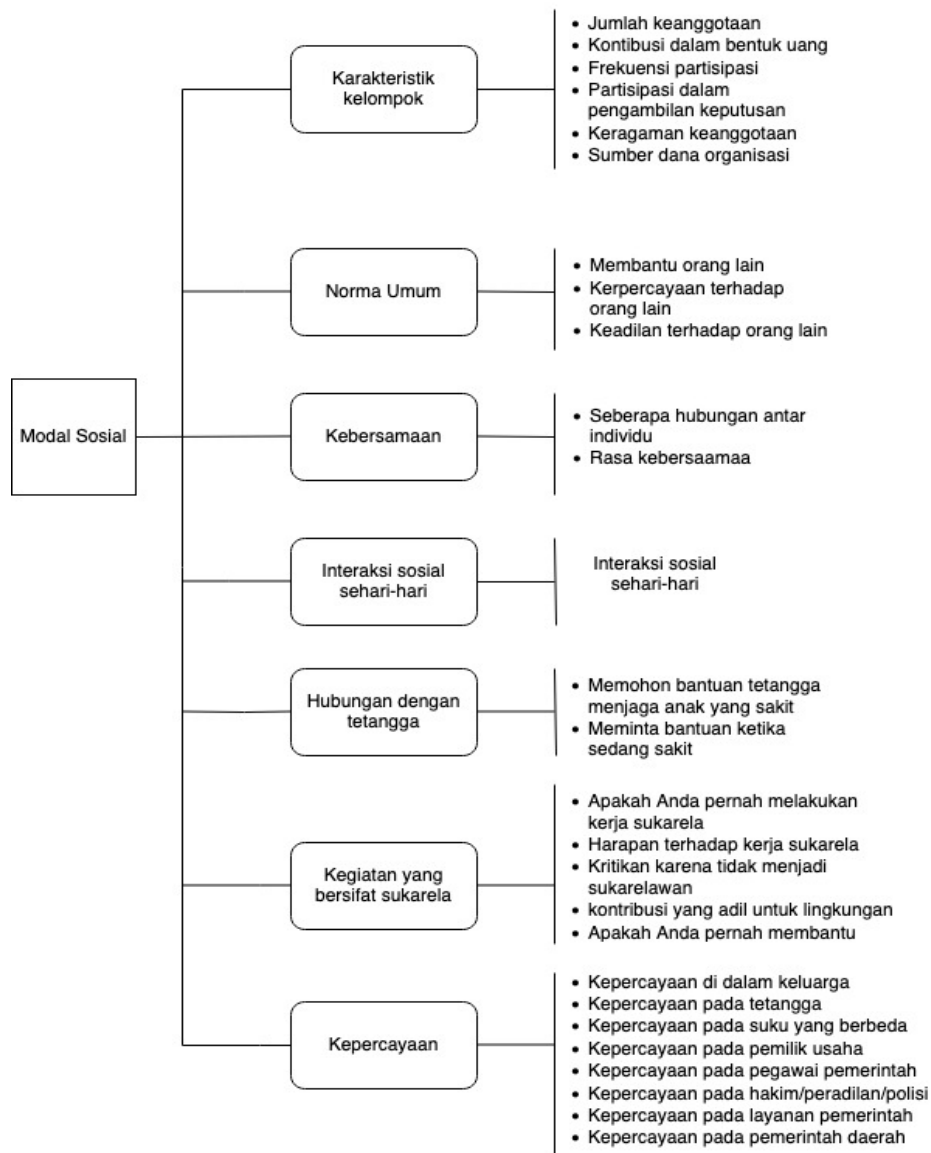
Jaringan ini sering kali (meskipun tidak selalu) terorganisasi melalui pembentukan asosiasi atau kelembagaan lokal.³ Sesuai dengan literatur yang ada, ditemukan bahwa modal sosial dapat dipahami dengan berbagai definisi. Namun, dalam penafsirannya, sebagian besar definisi mencakup setidaknya satu unsur kepercayaan, norma, kerja sama, dan keanggotaan dalam asosiasi jaringan di suatu masyarakat.

2.2.2 Determinan Modal Sosial

Modal sosial menciptakan lingkungan yang mendukung terjalannya kerja sama antar individu. Hubungan dalam bentuk apapun efektif dan bertahan lama, dimensi modal sosial seperti jaringan, peran, aturan, hukum, nilai dan norma, serta sikap dan keyakinan harus diperhatikan.

Dimensi sosial ditunjukkan pada gambar 2.1 di atas merupakan aspek-aspek yang diklasifikasikan dalam dimensi modal sosial, yang didasarkan pada pandangan Narayan dan Cassidy (2001) serta mencerminkan pendapat dari berbagai ahli lainnya. Dimensi modal sosial mencakup karakteristik kelompok, norma umum, kebersamaan, interaksi sosial, hubungan dengan tetangga, kegiatan yang bersifat sukarela, dan kepercayaan dengan argumen para pakar lain mengenai dimensi modal sosial.

³ Kelembagaan lokal didefinisikan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Uphoff (1993). Kelembagaan lokal adalah kompleksitas norma dan perilaku yang terjadi secara terus menerus seiring untuk mencapai tujuan secara bersama

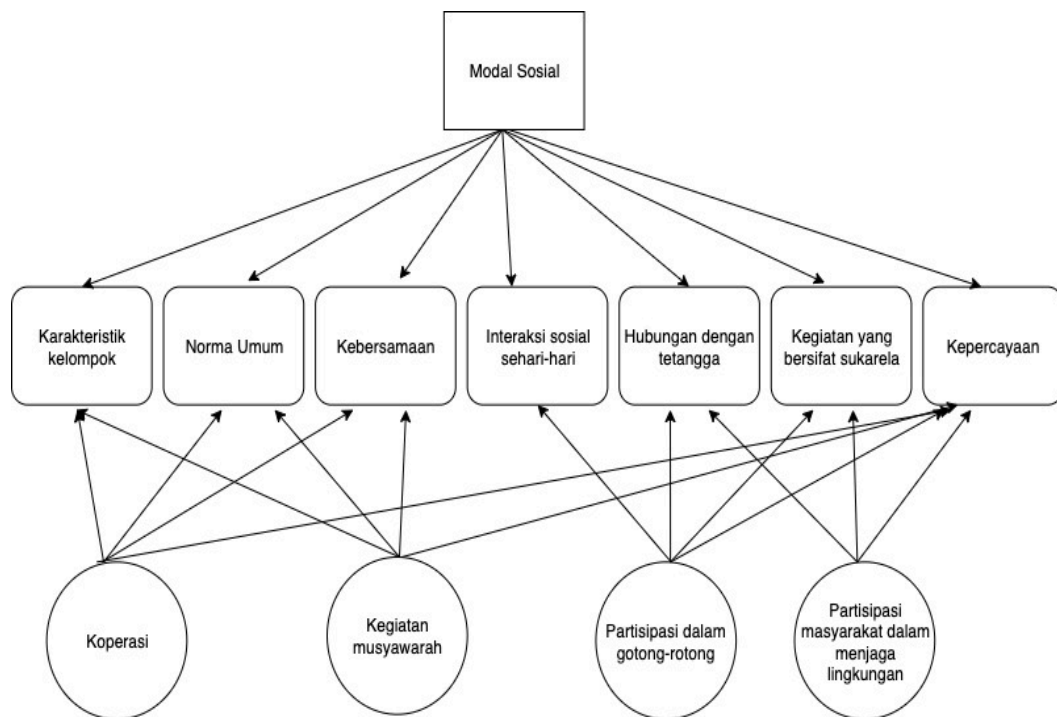


Gambar 2. 1 Dimensi Modal Sosial (Narayan & Cassidy, 2001)

Tradisi lokal di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kolektif, yang direpresentasikan melalui praktik-praktik seperti gotong royong (Bowen, 1986; Koentjaraningrat, 1961), rukun warga dan musyawarah (Bowen, 1986), serta kerja bakti (Beard, 2005). Praktik-praktik ini merupakan bentuk nyata dari modal sosial

lokal, karena membangun *trust*, *reciprocity*, *social networks*, dan *collective action*, sesuai dengan kerangka teori modal sosial. Gotong royong dan kerja bakti menegaskan norma timbal balik dan solidaritas, sementara rukun warga dan musyawarah memperkuat jaringan sosial dan koordinasi kolektif. Integrasi ini menunjukkan bahwa modal sosial lokal tidak hanya menjadi indikator empiris dari keterikatan sosial masyarakat, tetapi juga menegaskan relevansi teori Grooetaert (2001), Narayan & Cassidy (2001), dan Knack & Keefer (1997) dalam konteks budaya lokal Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memvalidasi praktik sosial lokal sebagai modal sosial yang berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat dan potensi pengurangan kemiskinan perdesaan.

Dimensi resiprositas dalam modal sosial secara khas tercermin dalam nilai-nilai sosiobudaya gotong-royong, yang merepresentasikan bentuk saling membantu yang bersifat timbal balik, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Nilai ini masih berfungsi sebagai norma sosial yang dominan dan memainkan peran penting sebagai determinan utama dalam pembentukan modal sosial di masyarakat Indonesia (Bowen, 1986). Berikut hubungan dimensi modal sosial penelitian dengan dimensi sosial yang dikemukakan oleh Narayan dan Cassidy (2001).



Gambar 2. 2 Hubungan Modal Sosial dalam Penelitian dengan Dimensi Modal Sosial Narayan dan Cassidy (2001)

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa lembaga ekonomi di perdesaan dalam hal ini adalah koperasi memenuhi karakteristik kelompok, norma umum, kebersamaan dan kepercayaan. Koperasi di perdesaan yang mencerminkan kegiatan berkelompok atau bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk oleh individu atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan nilai kekeluargaan. Koperasi adalah organisasi yang dibangun atas dasar kerja sama untuk mencapai kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya (Torgerson *et al.*, 1999). Sejalan dengan pandangan tersebut, *International Cooperative Alliance* (ICA) menjelaskan bahwa koperasi merupakan lembaga yang bersifat otonom yang

dibentuk secara sukarela oleh sekelompok orang guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama melalui suatu usaha yang dimiliki bersama serta dikelola secara demokratis. Berdasarkan landasan nilai kebersamaan dan partisipasi anggota, koperasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan maupun akumulasi modal semata. Prinsip tersebut telah tercermin sejak lahirnya koperasi modern melalui pendirian Rochdale Society of *Equitable Pioneers di Rochdale*, Inggris Utara, pada tahun 1844 oleh 28 pekerja pengrajin di industri kapas (Fairbairn, 1994).

Kegiatan musyawarah memenuhi dimensi karakteristik kelompok karena berkaitan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan. musyawarah di perdesaan adalah proses pengambilan keputusan bersama melalui diskusi terbuka yang melibatkan seluruh warga desa, dimana setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah ini berlandaskan pada prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan dengan keputusan yang diambil secara mufakat (Koentjaraningrat, 1985). Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa musyawarah desa sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang partisipatif.

Kegiatan lainnya seperti partisipasi masyarakat desa dalam gotong royong dan menjaga lingkungan memenuhi dimensi interaksi sosial, hubungan dengan tetangga, kegiatan yang bersifat sukarela dan kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Menurut Koentjaraningrat (1985), penggunaan tenaga manusia secara sukarela tanpa imbalan untuk proyek atau pekerjaan yang

memberikan manfaat bagi masyarakat atau mendukung pembangunan. Bowen (1986) juga menyatakan bahwa gotong royong merupakan salah satu bentuk modal sosial yang mempererat kohesi sosial serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas kolektif, seperti pembangunan desa, kegiatan keagamaan, dan pengelolaan sumber daya bersama. Kegiatan seperti ikut serta dalam menjaga lingkungan dapat dikaitkan dengan dimensi modal sosial yang dikemukakan oleh Narayan & Cassidy (2001), yaitu dimensi ikatan sosial dan norma.

Grootaert (1999) menjelaskan bahwa gotong royong juga berfungsi sebagai mekanisme pertukaran pengetahuan dan sumber daya sosial, yang membantu individu maupun keluarga dalam memperluas akses terhadap peluang ekonomi serta mengurangi risiko sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan kemiskinan. Dengan demikian, gotong royong tidak hanya menjadi nilai budaya, tetapi juga merupakan bentuk modal sosial produktif yang berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gotong royong memiliki peran yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui kegiatan bersama, gotong royong mempermudah pelaksanaan dan pemeliharaan berbagai proyek pembangunan lokal, termasuk infrastruktur dasar, yang didukung oleh adanya jaringan sosial yang kuat serta tingkat kepercayaan tinggi antaranggota komunitas. Partisipasi masyarakat dalam praktik gotong royong cenderung lebih efektif dalam kelompok yang homogen secara sosial, misalnya yang memiliki kesamaan latar belakang keluarga, budaya, atau agama. Homogenitas ini memperkuat solidaritas dan kemampuan masyarakat untuk

melakukan aksi kolektif yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan.

Partisipasi kolektif lainnya dapat tercermin pada kegiatan menjaga lingkungan. Melalui aktivitas menjaga lingkungan, masyarakat tidak hanya memperkuat ikatan sosial di antara mereka, tetapi juga memperkuat norma-norma yang mendorong perilaku pro-sosial dan keberlanjutan lingkungan, yang pada gilirannya meningkatkan solidaritas dan kerja sama di tingkat lokal. Pengelolaan lingkungan dapat dipahami sebagai modal sosial karena melibatkan pembangunan hubungan, kepercayaan, norma, dan kelembagaan yang memfasilitasi kerjasama kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut Pretty dan Smith (2004), modal sosial mencakup unsur-unsur tersebut yang membentuk aset sosial yang mendukung keberlanjutan pengelolaan lingkungan, hubungan yang saling percaya dan norma bersama mempermudah masyarakat dalam mengambil keputusan kolektif, berbagi pengetahuan, serta menyusun aturan yang mendukung konservasi secara berkelanjutan. Dengan memperkuat modal sosial, masyarakat mampu meningkatkan partisipasi aktif dan mengelola sumber daya alam secara kolektif, yang sulit dicapai hanya melalui regulasi formal atau melalui insentif ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari modal sosial karena keberhasilannya bergantung pada hubungan sosial, norma, dan kelembagaan yang terbentuk di antara masyarakat lokal.

Selanjutnya, Pretty dan Smith (2004) terdapat enam jenis partisipasi yang dapat digunakan untuk memahami berbagai tingkat keterlibatan masyarakat

pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya/ lingkungan, khususnya kegiatan menjaga lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

1. *Passive participation*: masyarakat hanya diberitahu tentang keputusan yang telah diambil atau kegiatan yang telah dilakukan, tanpa dilibatkan secara aktif dalam prosesnya.
2. *Consultative participation*: masyarakat diundang untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat, tetapi tidak memiliki peran langsung dalam pengambilan keputusan.
3. *Conventional participation*: masyarakat dilibatkan secara formal dan biasanya dalam proses di mana mereka memberi masukan agar kebijakan atau proyek dapat diterima, tetapi keputusan tetap diambil oleh pihak luar.
4. *Cooperative participation*: masyarakat bekerja sama secara aktif dengan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dalam proyek tertentu dengan peran yang lebih besar.
5. *Interactive participation*: masyarakat terlibat dalam analisis bersama, pengembangan rencana aksi, dan pembentukan atau penguatan lembaga atau kelompok lokal.
6. *Self-mobilization*: masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara independen dan mengendalikan cara pengelolaan sumber daya serta kegiatan terkait.

Konsep ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang beragam, dari hanya diberi informasi hingga bertindak secara mandiri, serta

menekankan perlunya memilih tingkat keterlibatan yang tepat untuk mendukung keberhasilan konservasi atau pengelolaan lingkungan (Pretty, 1995b).

2.3 Modal Sosial dan Kemiskinan di Perdesaan

Keterkaitan modal sosial dengan kemiskinan telah dibuktikan oleh berbagai penelitian di negara-negara berkembang. Narayan (1999) menyatakan modal sosial berkontribusi pada terciptanya kemakmuran dan pengurangan kemiskinan. Modal sosial yang tercermin dalam jaringan sosial, kepercayaan, dan norma dapat membantu mengurangi kemiskinan. Salah satu alasannya adalah karena informasi tentang teknologi dan pasar dapat disebarkan dengan lebih efektif, sehingga mengurangi kegagalan pasar dalam hal akses informasi. Hal ini kemudian berkontribusi pada penurunan biaya transaksi, seperti biaya untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi, pasar, dan kelayakan kredit dari pihak yang terlibat dalam kontrak, serta lainnya.

Osei dan Zhuang (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel modal sosial, inovasi sosial, dan kewirausahaan perempuan berpengaruh pada pengentasan kemiskinan di perdesaan, dan metode yang digunakan *Structural Equation Modelling (SEM)* dengan menggunakan sampel 333 wanita pengusaha di sektor agribisnis Distrik Selatan Sekyere di Ghana. Temuan dari pengusaha perempuan perdesaan yang memanfaatkan modal sosial baik dari jaringan sosial formal maupun informal menunjukkan ada pengurangan kemiskinan perdesaan. Dampak inovasi sosial dan modal sosial berhubungan terhadap pengentasan kemiskinan menunjukkan koefisien positif dan rekomendasi ada kebijakan terkait

pemberdayaan perempuan di perdesaan. Berikut penelitian sebelumnya hubungan antara modal sosial dengan kemiskinan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu Modal Sosial dan Kemiskinan

No	Peneliti	Variabel	Metodologi	Temuan
1	Chen, <i>et al.</i> (2024)	1. Local Resources (Sumber Daya Lokal): Diukur dengan lima item yang mengacu pada kapasitas dan sumber daya yang tersedia di komunitas. 2. Asset Mobilization (Mobilisasi Aset): Mengacu pada upaya komunitas untuk mengorganisasi sumber dayanya agar digunakan secara ekonomi. 3. Citizens' Participation (Partisipasi Warga): Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. 4. Rural Poverty Alleviation (Pengurangan Kemiskinan Perdesaan). 5. Government Policies (Kebijakan Pemerintah): Sebagai variabel moderasi, diukur melalui lima item yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait pembangunan dan pengurangan kemiskinan.	<i>Structural Equation Model</i>	1. Sumber daya lokal, mobilisasi aset, dan partisipasi warga semuanya secara positif dan signifikan berpengaruh pada pengurangan kemiskinan di perdesaan. 2. Kebijakan pemerintah secara signifikan memperkuat hubungan antara mobilisasi aset dan pengurangan kemiskinan, namun tidak signifikan untuk hubungan antara sumber daya lokal atau partisipasi warga dengan pengurangan kemiskinan. 3. Hasil ini mengindikasikan bahwa strategi melibatkan komunitas dan kebijakan yang mendukung mobilisasi aset sangat penting untuk keberhasilan pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan Ghana.
2	Harrison, <i>et al.</i> (2019)	Dependent Variables: <i>Poverty rate</i> (persentase populasi di suatu daerah yang hidup di bawah garis kemiskinan).	Persamaan simultan	Semakin tinggi tingkat modal sosial dalam suatu masyarakat, semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi.
		Independent Variables: <i>Social Capital Level</i> (Indeks yang mencerminkan tingkat modal sosial suatu daerah yang mencakup berbagai indikator seperti keanggotaan organisasi, tingkat partisipasi pemilih, dan tingkat respon sensus).		Penelitian juga menemukan bahwa kemiskinan dapat menjadi penghalang bagi pembentukan modal sosial. Masyarakat yang mengalami kemiskinan lebih tinggi cenderung memiliki modal sosial yang relatif rendah.
		Variabel Kontrol: - Persentase populasi non-kulit putih - Persentase populasi di bawah 19 tahun - Persentase populasi di atas 65 tahun - Persentase rumah tangga yang menikah dengan anak		Selain modal sosial, kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya.

No	Peneliti	Variabel	Metodologi	Temuan
		- Persentase populasi yang memiliki gelar sarjana - Persentase angkatan kerja yang menganggur - Persentase perempuan dalam angkatan kerja - Diversitas industri - Pekerjaan di sektor keuangan, asuransi, dan <i>real estate</i> - Tingkat kenyamanan alam		
3	Nasution, <i>et al.</i> (2015)	Variabel Dependen: pengeluaran rumah tangga sebagai proksi kemiskinan, dan modal sosial diwujudkan dengan partisipasi dalam kegiatan sosial.	Model simultan menggunakan <i>Two-Stage Probit Least Squares</i> (2SPLS)	Penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang diukur melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, memiliki dampak positif terhadap pengeluaran rumah tangga, yang pada mengurangi kemiskinan.
		Variabel Independen: - Ukuran rumah tangga - Pendidikan kepala rumah tangga - Tahun pendidikan formal - Jenis kelamin kepala rumah tangga (pria = 1, wanita = 0) - Usia kepala rumah tangga - Status pernikahan kepala rumah tangga (menikah = 1, tidak menikah = 0) - Pekerjaan utama (sektor pertanian = 1, lainnya = 0) - Kepemilikan rumah - Luas lantai rumah - Sumber pencahayaan rumah (listrik = 1, lainnya = 0) - Keberadaan pasar (permanen=1, 0=lainnya) - Jumlah organisasi sosial di desa		Pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial.
				Terdapat hubungan positif antara pendidikan dan partisipasi dalam kegiatan sosial, serta antara ukuran rumah tangga dan partisipasi dalam kegiatan sosial.
				Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan rumah dan jumlah organisasi sosial di daerah perdesaan berhubungan positif dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
				Hasil menunjukkan bahwa intervensi dalam pendidikan dan pengembangan infrastruktur sosial dapat meningkatkan modal sosial dan mengurangi kemiskinan di daerah perdesaan Indonesia.
4	Sunil dan Pradyot (2019)	Variabel Dependen: - Status Kemiskinan - <i>Chronic poor</i> (selalu miskin pada 2004–2005 dan 2011–2012) - <i>Ascended out of poverty</i> (keluar dari kemiskinan)	<i>Livelihoods Approach</i> (SLA)	Status Kemiskinan: 25.26% rumah tangga teridentifikasi sebagai <i>chronic poor</i> , 45.24% sebagai <i>transient poor</i> (<i>ascended+descended</i>), dan 29.50% sebagai <i>non-poor</i> .

No	Peneliti	Variabel	Metodologi	Temuan
		- <i>Descended into poverty</i> (jatuh ke dalam kemiskinan) - <i>Non-poor</i> (tidak miskin)	<i>Multinomial Logit Model</i> (MLM)	Ukuran keluarga yang lebih besar dan proporsi anggota yang tergantung meningkatkan kemungkinan tetap dalam kemiskinan. Pendidikan yang lebih tinggi dan kepemilikan tanah berhubungan negatif dengan kemiskinan. Partisipasi dalam kelompok sosial dan kegiatan non-pertanian berkontribusi pada peningkatan kemungkinan keluar dari kemiskinan. Remitansi juga berperan dalam membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan. Rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan non-pertanian memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan.
		Variabel Independen: - Ukuran rumah tangga Pendidikan kepala rumah tangga - Remitansi Kepemilikan lahan - Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di berbagai sector - Partisipasi dalam kelompok social - Lokasi geografis (utara, pesisir, selatan Odisha) - Akses ke modal sosial dan fasilitas kredit		
5	Osei dan Zhuang (2020)	Variabel Dependen: Kemiskinan	- <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) - <i>Logit Model Estimation</i>	<i>Relational Social Capital</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kewirausahaan dan pengentasan kemiskinan. <i>Social Innovation</i> juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kewirausahaan dan pengentasan kemiskinan. Modal sosial, tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan kewirausahaan, tetapi berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan kewirausahaan wanita menunjukkan peran mediasi parsial yang signifikan antara modal sosial dan pengentasan kemiskinan. <i>Social Innovation</i> juga berperan sebagai mediasi antara <i>Relational Social Capital</i> dan pengentasan kemiskinan serta antara <i>Structural Social Capital</i> dan pengentasan kemiskinan.
		Variabel Independen: - Struktur modal sosial (ukuran jaringan sosial, keberagaman hubungan) - <i>Relational Social Capital</i> (kepercayaan, kewajiban, dan rasa saling menghormati) - <i>Social Innovation</i> (ide baru, solusi sosial, interaksi sistem sosial) - Pertumbuhan wirausaha perempuan		

No	Peneliti	Variabel	Metodologi	Temuan
6	Abdul-Hakim, <i>et al.</i> (2010)	Variabel Dependen: Kemiskinan (dikategorikan menjadi " <i>Poor</i> " = 1, " <i>Non-poor</i> " = 0, berdasarkan garis kemiskinan pendapatan di Terengganu)	<i>Model regresi logit</i>	- Koefisien untuk SOCC adalah -0.1177 dan signifikan pada level 1%, menunjukkan bahwa peningkatan modal sosial berhubungan dengan penurunan probabilitas kemiskinan. - Variabel HUMC dan AGE juga signifikan dengan koefisien negatif untuk HUMC dan positif untuk AGE, menunjukkan bahwa peningkatan modal manusia dan usia berpengaruh terhadap kemiskinan. - Ukuran keluarga (HHSIZE) memiliki koefisien positif yang signifikan, menunjukkan bahwa semakin besar ukuran keluarga, semakin tinggi probabilitas kemiskinan. - Penelitian menyimpulkan bahwa modal sosial memainkan peran penting dalam menentukan kemiskinan di kalangan rumah tangga di daerah perdesaan, dan strategi pengentasan kemiskinan perlu lebih memperhatikan aspek modal sosial. - Kebijakan <i>antipoverty</i> yang menargetkan pertumbuhan pekerjaan dan pengembangan modal sosial di daerah dengan kemiskinan tinggi dapat lebih efektif.
		Variabel Independen: - <i>Social Capital</i> (SOCC): Indeks yang mencakup dimensi kelompok dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi kolektif dan kerja sama, informasi dan komunikasi, kohesi sosial, serta pemberdayaan dan aksi politik. - <i>Human Capital</i> (HUMC): Jumlah tahun pendidikan kepala rumah tangga - <i>Physical Capital</i> (PHYC): Nilai aset fisik rumah tangga dalam Ringgit Malaysia. - Umur - Jenis Kelamin (GEN; laki-laki = 1, perempuan = 0) - Status Pernikahan (MARST; menikah = 1, lainnya = 0) - Ukuran Rumah Tangga (HHSIZE) - Jumlah Tanggungan (DEPEND) - Kiriman Uang dari Anggota Keluarga di Luar Rumah Tangga (REMITT)		
7	Crandall dan Weber (2004)	Variabel Dependen: Perubahan tingkat kemiskinan pada tingkat kawasan (<i>tract-level poverty rate changes</i>) antara tahun 1990–2000.	- Regresi OLS - <i>Spatial econometric model</i> - <i>First-order queen contiguity</i>	- Pertumbuhan pekerjaan berpengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, dengan efek yang lebih besar di <i>tract</i> dengan tingkat kemiskinan tinggi.
		Variabel Independen: - <i>Employment Growth</i>: Pertumbuhan pekerjaan di tingkat <i>county</i>.		

No	Peneliti	Variabel	Metodologi	Temuan
		- Modal Sosial: Indeks modal sosial berdasarkan variabel seperti aktivitas asosiasi, kriminalitas, dan partisipasi pemilu. - <i>Adjacency to High Poverty Tracts</i>: Proporsi kawasan tetangga dengan tingkat kemiskinan tinggi ($\geq 30\%$).		- Modal sosial memberikan manfaat lebih dalam mengurangi kemiskinan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. - <i>Tract level poverty</i> yang berada di dalam "pocket of poverty" mengalami perlambatan dalam pengurangan kemiskinan. - Penelitian menunjukkan adanya <i>spillover spasial</i>, dimana pengurangan kemiskinan di satu <i>tract</i> mempengaruhi <i>tract</i> tetangga. - Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor lokal dan hubungan spasial dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan.
8	Grootaert dan Narayan (2004)	Variabel Dependen: Kesejahteraan rumah tangga (diukur melalui pengeluaran rumah tangga per kapita). Variabel Independen: Modal social diukur menggunakan berbagai dimensi, seperti: Keanggotaan dalam kelompok agrarian, Jumlah keanggotaan dalam asosiasi lokal lainnya, Indeks heterogenitas keanggotaan organisasi, Tingkat partisipasi dalam rapat, Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Kontribusi finansial atau tenaga untuk asosiasi, Orientasi komunitas.	- Regresi OLS - Regresi kuantitatif. - Model instrumental variables untuk mengatasi kemungkinan hubungan timbal balik antara modal sosial dengan kesejahteraan.	- Penelitian mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara modal sosial dan kesejahteraan rumah tangga. - Keanggotaan aktif dalam agraria meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sebesar. - Keanggotaan dalam asosiasi lokal lainnya meningkatkan kesejahteraan sebesar 5.3%.11.5%. - Modal sosial lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan di kelompok masyarakat dengan lahan lebih kecil (≤ 1 hektar). - Efek modal sosial terhadap kesejahteraan rumah tangga dua kali lebih besar dibandingkan modal manusia (pendidikan).

No	Peneliti	Variabel	Metodologi	Temuan
9	Grootaert (1999)	Variabel Dependen: - Kesejahteraan rumah tangga, diukur dari pengeluaran rumah tangga per kapita. - Kemiskinan (<i>Poverty</i>)	Model regresi OLS (<i>Ordinary Least Squares</i>) digunakan untuk menganalisis dampak modal sosial pada kesejahteraan rumah tangga.	Penelitian menunjukkan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga dan tingkat kemiskinan di Indonesia.
			Model probit digunakan untuk mengestimasi kemungkinan menjadi miskin.	Modal sosial berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan rumah tangga dibandingkan dengan modal fisik dan pendidikan.
		Variabel Independen: Modal sosial (<i>Social Capital</i>)		Hasil juga menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam pengaruh modal sosial antara rumah tangga miskin dan non-miskin.
		Kepadatan keanggotaan (<i>Density of Membership</i>)		Penelitian ini menegaskan pentingnya keberadaan asosiasi lokal dan partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
		Indeks heterogenitas (<i>Heterogeneity Index</i>)		
		Kehadiran pertemuan (<i>Meeting Attendance</i>)		
		Partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan		
		Pembayaran iuran (<i>Dues Payment</i>)		
		Orientasi komunitas dari asosiasi		

Modal sosial merupakan konsep penting dalam menjelaskan hubungan antara kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan. Dalam kajian klasik, modal sosial banyak merujuk pada pemikiran Bourdieu (1986), Coleman (1988), dan Putnam (1993; 2000). Bourdieu (1986) memandang modal sosial sebagai sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dan dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan tertentu. Coleman (1988) menjelaskan modal sosial sebagai bagian dari struktur sosial yang dapat memfasilitasi tindakan individu maupun kolektif. Sementara itu, Putnam (1993; 2000) menekankan modal

sosial sebagai jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara modal sosial dan kemiskinan perdesaan, kajian yang menggunakan dimensi lokal sesuai karakter masyarakat desa Indonesia masih terbatas. Modal sosial dalam konteks Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan, tetapi juga dari praktik sosial yang hidup dalam masyarakat, seperti gotong royong dan musyawarah. Kedua praktik tersebut sangat melekat dalam kehidupan desa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, namun belum banyak ditempatkan sebagai dimensi modal sosial yang diuji secara empiris dalam hubungannya dengan kemiskinan.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep modal sosial yang lebih sesuai dengan konteks desa Indonesia. Modal sosial dalam penelitian ini direpresentasikan melalui empat dimensi, yaitu koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan. Keempat dimensi ini dipilih karena mencerminkan bentuk kerja sama, partisipasi, kelembagaan lokal, dan tanggung jawab sosial masyarakat desa.

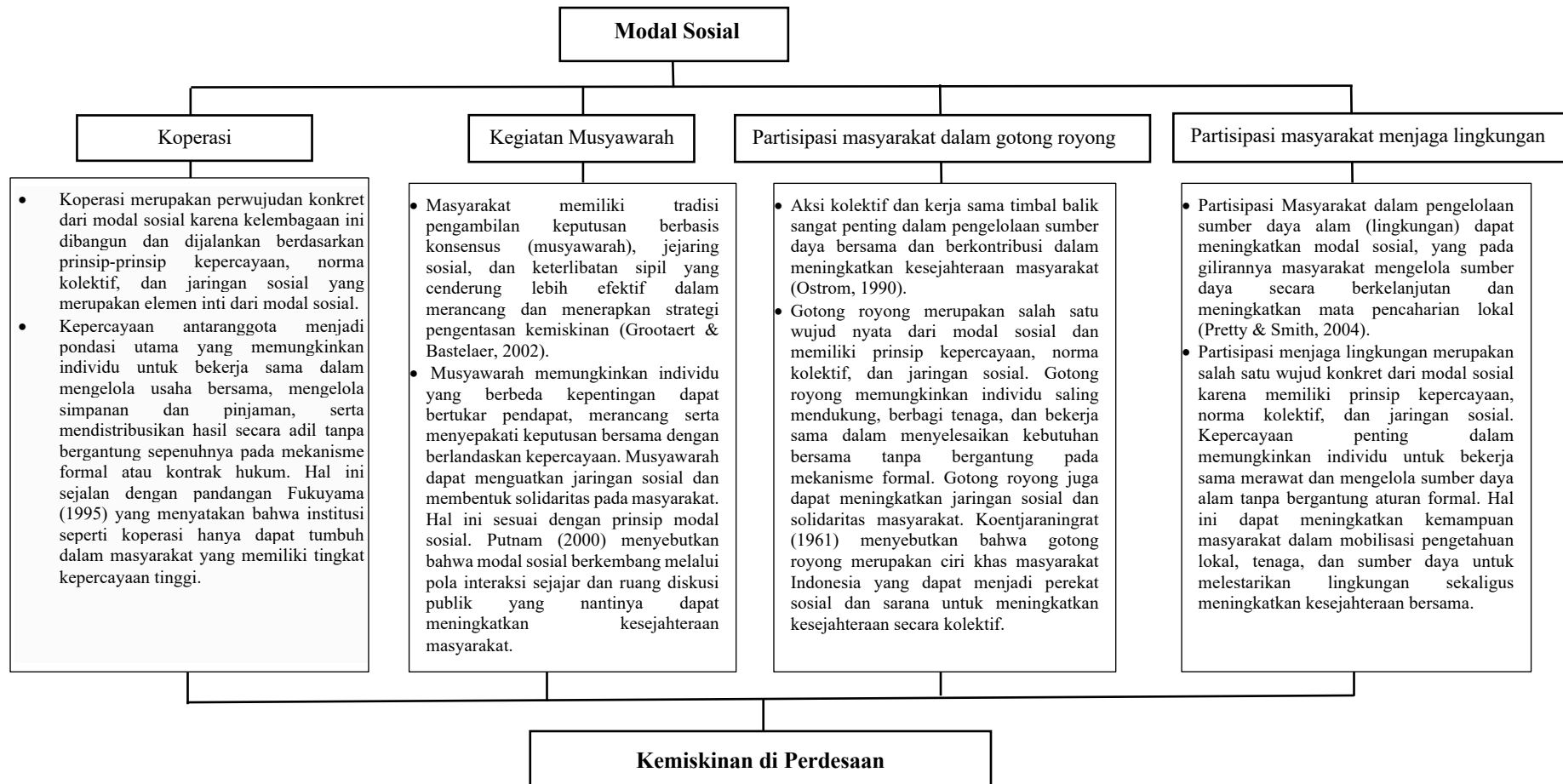
Koperasi diposisikan sebagai dimensi ekonomi kolektif. Koperasi mencerminkan kerja sama masyarakat dalam memperkuat akses ekonomi, permodalan, kegiatan usaha, dan solidaritas ekonomi lokal. Melalui koperasi, masyarakat desa memiliki wadah untuk mengembangkan kegiatan produktif dan memperkuat kemampuan ekonomi secara bersama-sama.

Musyawarah diposisikan sebagai dimensi deliberatif. Musyawarah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, membahas kebutuhan desa, menentukan prioritas pembangunan, dan membangun kesepakatan bersama. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, musyawarah penting karena dapat membantu pemerintah desa merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Partisipasi gotong royong diposisikan sebagai dimensi aksi kolektif. Gotong royong menunjukkan kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama secara sukarela dalam menyelesaikan persoalan bersama. Praktik ini dapat membantu masyarakat menghadapi keterbatasan sumber daya, misalnya dalam pembangunan fasilitas desa, perbaikan lingkungan, atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi menjaga lingkungan diposisikan sebagai dimensi tanggung jawab sosial-ekologis. Dimensi ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, kelestarian, dan keberlanjutan lingkungan desa. Lingkungan yang terjaga dapat mendukung kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber penghidupan di desa.

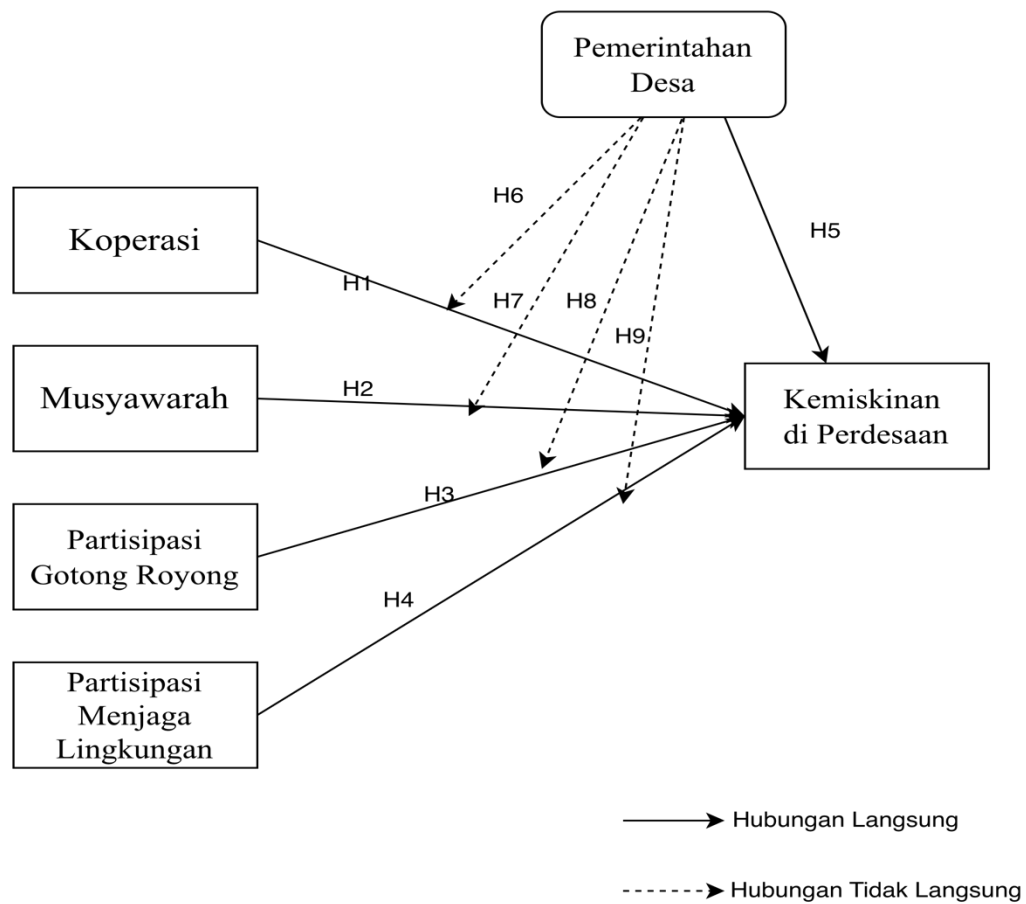
Selain mengembangkan dimensi modal sosial, penelitian ini juga memasukkan pemerintahan desa sebagai variabel moderasi. Pemerintahan desa dipandang penting karena memiliki peran dalam mengelola pembangunan, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan menghubungkan aspirasi warga dengan kebijakan desa. Dengan adanya pemerintahan desa, hubungan antara modal sosial dan kemiskinan dapat menjadi lebih kuat atau lebih lemah, tergantung pada kondisi pemerintahan desa.

Oleh karena itu, model konseptual dalam penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh langsung koperasi, musyawarah, gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan terhadap kemiskinan, tetapi juga menguji peran pemerintahan desa dalam memoderasi hubungan tersebut. Kerangka ini menjadi dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

2.4 Kerangka Pemikiran Konseptual



Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual Modal Sosial dengan Kemiskinan di Perdesaan



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran Model SEM PLS antara Modal Sosial dan Kemiskinan Perdesaan

Kerangka pemikiran ditunjukkan pada gambar 2.4 bahwa penelitian ini didasarkan pada kerangka yang mengukur modal sosial melalui dimensinya yang memiliki keterkaitan dengan kemiskinan di wilayah perdesaan. Lokasi penelitian yang digunakan adalah perdesaan di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang dan Kudus.

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Hubungan antara Koperasi dengan Kemiskinan Perdesaan

Menurut Cahyono *et al.* (2020), koperasi berfungsi sebagai agen pembangunan ekonomi desa yang memperkuat kapasitas pemerintahan desa melalui peningkatan partisipasi ekonomi warga dan kemandirian fiskal. Selain masalah partisipasi, peraturan dan kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam pengembangan koperasi di daerah perdesaan. Menurut Juliansyah (2021), meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung koperasi, implementasi di tingkat lokal seringkali masih lemah. Banyak koperasi di daerah perdesaan mengalami kesulitan dalam mengakses program bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Perbaikan regulasi dan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar koperasi di daerah perdesaan dapat berkembang dengan lebih baik (Majee & Hoyt, 2011).

H₁: Koperasi berpengaruh signifikan pada kemiskinan perdesaan

2.5.2 Hubungan antara Musyawarah dengan Kemiskinan Perdesaan

Uphoff (1992) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, institusi lokal dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan mendorong pembangunan kapasitas yang berkelanjutan, sehingga secara langsung berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

H₂: Musyawarah berpengaruh signifikan pada kemiskinan perdesaan.

2.5.3 Hubungan antara Partisipasi Gotong Royong dengan Kemiskinan Perdesaan

Bowen (1986) menjelaskan program-program pembangunan desa yang berlandaskan konsep gotong royong bertujuan untuk memperkuat kelembagaan . desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui kegiatan kolektif. Program seperti Inpres Desa, yang memberikan dana kepada desa untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi, secara implisit bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas desa.

Konsep gotong royong sering digunakan sebagai simbol budaya yang melekat pada kehidupan desa dan diterapkan dalam program pembangunan untuk memperkuat solidaritas sosial. Kendati demikian, ia juga menekankan bahwa dalam praktiknya, istilah ini telah diselewengkan dan digunakan sebagai alat politik dan administratif yang mungkin tidak selalu mencerminkan realitas kebutuhan desa, termasuk pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, gotong royong dalam konteks pemerintahan desa dapat mendukung usaha pengentasan kemiskinan apabila program yang berbasis gotong royong benar-benar diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

H₃: Partisipasi gotong royong berpengaruh signifikan pada kemiskinan perdesaan.

2.5.4 Hubungan antara Partisipasi Menjaga Lingkungan dengan Kemiskinan perdesaan

World Summit For Social Development (1995) menyebutkan bahwa kemiskinan sesungguhnya tidak semata-mata disebabkan masalah-masalah internal orang miskin seperti rendahnya pendapatan, rendahnya posisi tawar,

budaya hidup yang tidak mendukung kemajuan dan rendahnya kemampuan orang miskin dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan.

H4: Partisipasi menjaga lingkungan berpengaruh signifikan pada kemiskinan perdesaan.

2.5.5 Hubungan langsung antara pemerintahan dan kemiskinan

North (1990) menekankan peran aturan formal dan informal dalam membentuk perilaku ekonomi. Pemerintahan desa menentukan aturan main di tingkat desa seperti pengelolaan dana desa, akses lahan, dan distribusi bantuan sosial yang secara langsung memengaruhi peluang ekonomi rumah tangga miskin. Kelembagaan desa yang efektif dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan akses kelompok miskin terhadap sumber daya produktif.

Chambers (1994) menyebutkan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal cenderung lebih berkelanjutan dan berpihak pada kelompok miskin. Pemerintahan desa menjadi aktor kunci dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat perdesaan, khususnya kelompok rentan, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi yang efektif meningkatkan relevansi program dan memperbesar dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan.

H5: Pemerintahan desa berpengaruh signifikan pada kemiskinan di perdesaan.

2.5.6 Peran Moderasi Pemerintahan Desa antara Koperasi dan Kemiskinan Perdesaan

Koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang dibentuk oleh masyarakat untuk memperkuat kemandirian fiskal serta mendorong partisipasi produktif warga. Menurut Cahyadi *et al.* (2020), pembentukan badan usaha milik

desa dapat dipandang setara dengan koperasi masyarakat desa yang berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi lokal. Ketika koperasi berjalan secara efektif, lembaga ini mampu meningkatkan kapasitas ekonomi desa, memperluas peluang pendapatan bagi warga, dan secara langsung berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Dari sisi sosial, keberadaan koperasi juga memperkuat keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat desa. Bentuk partisipasi ini mengubah posisi pemerintah desa dari sekadar pengelola sumber daya ke arah peran yang lebih strategis sebagai fasilitator pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Dinamika tersebut menumbuhkan kepercayaan sosial (*social trust*) dan mempererat jejaring kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, serta lembaga ekonomi lokal (Putnam, 1993).

H₆: Pemerintahan desa memoderasi hubungan antara koperasi dan kemiskinan perdesaan.

2.5.7 Peran Moderasi Pemerintahan Desa antara Musyawarah dan Kemiskinan Perdesaan

Musyawarah desa berperan penting dalam membangun hubungan saling percaya antara masyarakat dan pemerintah desa, yang menurut Antlöv (2003) menjadi salah satu syarat utama keberhasilan desentralisasi dan pembangunan perdesaan. Melalui partisipasi yang tulus dalam forum musyawarah, warga desa dapat berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menyalurkan sumber daya secara adil dan efisien,

tetapi juga mendukung keberlanjutan program pembangunan yang berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Menurut Hakim *et al.* (2025), praktik musyawarah berfungsi sebagai mekanisme inti dalam memperkuat demokrasi lokal yang partisipatif dan inklusif. Melalui forum ini, masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memiliki ruang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas serta efektivitas tata kelola lokal. Sejalan dengan hal tersebut, Asenbaum *et al.* (2024) menegaskan bahwa tata kelola lokal yang berbasis pada prinsip demokrasi partisipatif dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Namun demikian, Shammas (2024) mengingatkan bahwa penerapan prosedur formal yang terlalu kaku dalam proses pengambilan keputusan dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan kesejahteraan. Keadilan prosedural yang terlalu formalistik dapat mengurangi keluwesan pemerintah desa dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya terkait isu kemiskinan dan akses sosial.

H₇: Pemerintahan desa memoderasi hubungan antara musyawarah dan kemiskinan perdesaan.

2.5.8 Peran Moderasi Pemerintahan Desa antara partisipasi Gotong Royong dan Kemiskinan Perdesaan

Menurut Putnam (1993), partisipasi kolektif dan jaringan sosial seperti gotong royong menjadi fondasi bagi terbangunnya kepercayaan dan efektivitas

pemerintahan lokal. Selanjutnya, Ostrom (2000) menegaskan bahwa tindakan kolektif (*collective action*) seperti gotong royong merupakan mekanisme sosial yang dapat memperkuat tata kelola komunitas, terutama dalam pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources*). Pemerintahan desa yang mampu memfasilitasi dan mengorganisir kegiatan gotong royong akan memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih kuat, karena kolaborasi antara warga dan pemerintah menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan desa.

H₈: Pemerintahan desa memoderasi hubungan antara partisipasi gotong royong dan kemiskinan perdesaan.

2.5.9 Peran Moderasi Pemerintahan Desa antara Partisipasi Menjaga Lingkungan dan Kemiskinan Perdesaan

Uphoff (1992) menjelaskan bahwa keterkaitan yang harmonis antara institusi lokal dan pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada institusi lokal melalui pengakuan resmi, penyediaan sumber daya, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurutya, institusi lokal seperti kelompok masyarakat atau organisasi sukarela memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dan tindakan sesuai dengan kondisi sosial serta ekologis di wilayahnya, sehingga lebih efektif dalam mengelola sumber daya alam dan menjalankan kebijakan lingkungan. Uphoff juga menekankan bahwa pemerintah sebaiknya berperan sebagai fasilitator dan pendukung, bukan mengambil alih peran institusi lokal sepenuhnya, agar

lembaga-lembaga tersebut dapat beroperasi secara mandiri, menegakkan norma, dan menjaga praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

H₉: Pemerintahan desa memoderasi hubungan antara partisipasi menjaga lingkungan dan kemiskinan perdesaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari survei potensi desa (Podes) tahun 2018 dan 2020 yang dipublikasikan oleh BPS dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Data sekunder lainnya diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), data yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (BAPPEDA Jateng), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Data Podes merupakan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai potensi, karakteristik, dan kondisi sosial-ekonomi setiap desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Data Podes dilakukan secara periodik setiap 3 tahun sekali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Potensi Desa (PODES) tahun 2018 dan 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). PODES dipilih karena memuat informasi mengenai karakteristik desa/kelurahan, antara lain kondisi infrastruktur, akses layanan dasar, fasilitas sosial-ekonomi, kelembagaan desa, aksesibilitas wilayah, dan potensi pembangunan desa. Dengan cakupan tersebut, PODES dinilai relevan untuk menganalisis hubungan struktural antarvariabel berbasis wilayah melalui pendekatan SEM-PLS.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa. Oleh karena itu, seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian tidak menggambarkan kondisi individu atau rumah tangga, melainkan karakteristik objektif wilayah administratif. Konsekuensinya, hasil penelitian harus ditafsirkan pada level desa/kelurahan dan tidak dapat secara langsung digeneralisasi pada level individu. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan interpretasi berupa *ecological fallacy*, yaitu penarikan kesimpulan individual berdasarkan data agregat wilayah.

Penggunaan data PODES tahun 2018 dan 2020 dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelayanan dasar (Pendidikan dan kesehatan) dimensi modal sosial di perdesaan Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Batang dan Kudus. Namun, karena hanya menggunakan dua titik waktu, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai analisis longitudinal penuh. Hasil model SEM-PLS lebih tepat dimaknai sebagai hubungan asosiatif-struktural antar konstruk pada periode pengamatan, bukan sebagai bukti kausalitas yang mutlak. Selain itu, tahun 2020 memiliki konteks khusus karena beririsan dengan periode awal pandemi COVID-19, sehingga perubahan kondisi desa pada periode tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati.

Pada penelitian ini, indikator PODES digunakan untuk membangun konstruk berbasis kondisi objektif wilayah, seperti infrastruktur, akses pelayanan dasar, dan karakteristik dimensi modal sosial. Oleh karena itu, konstruk yang dibangun dari data PODES tidak dipahami sebagai konstruk perseptual atau psikologis, melainkan sebagai konstruk struktural berbasis wilayah. Pemilihan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian teori, relevansi

substantif, dan kelayakan statistik. Mengingat banyak indikator PODES berbentuk kategorik, ordinal, atau dummy, maka penentuan model pengukuran dalam SEM-PLS dilakukan secara hati-hati, terutama dalam membedakan indikator reflektif dan formatif.

Dengan demikian, data PODES 2018 dan 2020 digunakan sebagai sumber data utama karena mampu menyediakan dasar empiris yang sistematis untuk menganalisis karakteristik desa. Namun, keterbatasan data sebagai data sekunder agregat tetap diperhatikan, khususnya terkait keterbatasan dalam menjelaskan perilaku individu, kualitas layanan, mekanisme sosial, serta perubahan kausal antarwaktu.

Berdasarkan karakteristik tersebut, penggunaan data PODES 2018 dan 2020 dalam penelitian ini dipandang sesuai dengan tujuan analisis yang berfokus pada hubungan struktural antarvariabel berbasis wilayah. Namun, karena PODES merupakan data sekunder agregat pada level desa/kelurahan, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menjelaskan perilaku individu, melainkan untuk mengidentifikasi pola hubungan antar konstruk yang merepresentasikan kondisi objektif wilayah. Oleh karena itu, interpretasi hasil SEM-PLS dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan karakteristik, cakupan, dan keterbatasan data PODES sebagai sumber data penelitian. Berikut penjelasan sumber data yang digunakan pada penelitian.

Tabel 3. 1 Variabel, Sumber Data, dan Definisi Operasional

Variabel	Simbol	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Sumber Data
Kemiskinan	KP1	Jumlah penduduk miskin	Banyaknya penduduk pada setiap desa yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penduduk miskin atau penduduk dengan kondisi kesejahteraan sosial rendah	Jiwa	Dinas Sosial Provinsi Jember Tengah
	KP2	Fasilitas Kesehatan	Jumlah sarana kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas, posyandu, poskesdes, polindes	Unit	Podes 2018-2020
	KP3	Fasilitas pendidikan	Jumlah lembaga Pendidikan setara Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) (unit)	Unit	Podes 2018-2020
Modal Sosial:					
1. Koperasi	KOP1	Jumlah KUD aktif	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang berstatus aktif dan menjalankan kegiatan usaha.	Unit	Podes 2018-2020
	KOP2	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam aktif	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang berstatus aktif dan menjalankan kegiatan usaha.	Unit	Podes 2018-2020
2. Musyawarah	MUS1	Keaktifan dalam kegiatan musyawarah	Keaktifan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa	Dummy Partisipasi aktif-1; tidak aktif-0	Podes 2018-2020
	MUS2	Jumlah kegiatan musyawarah	Frekuensi kegiatan musyawarah desa yang diselenggarakan dalam satu tahun/periode pengamatan	Kali	Podes 2018-2020
3. Partisipasi Gotong Royong	GR1	Keaktifan Gotong Royong	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong.	Kategori (1-3) Ada, sebagian besar warga terlibat – 1, Ada, sebagian kecil warga terlibat – 2, Tidak ada kebiasaan – 3	Podes 2018-2020

	GR2	Ruang Publik		Keberadaan fasilitas ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk aktivitas sosial dan kemasyarakatan	Kategori (1-3) Ada, dikelola – 1, Ada, tidak dikelola – 2, Tidak ada – 3	Podes 2018 2020
4. Partisipasi Menjaga Lingkungan	PL1	Jumlah anggota keluarga	rata-rata	Rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di desa	Orang per keluarga	Statistik Kecamatan
	PL2	Tempat Sampah	Pengelolaan	Keberadaan sistem pengelolaan sampah di desa	Kategori (1-2) Ada – 1, Tidak ada – 2	Podes 2018 2020
Pemerintahan Desa	PD	Jumlah pemerintahan desa	perangkat	Jumlah Kepala desa, sekretaris desa dan pelaksana teknis yang bertugas di desa	Kategori (1-4) 3 orang -1, 41 hingga 80-2, 81 hingga 119 -3, 120 hingga 158 -4, dan 159 hingga 197-5	Podes 2018 2020

3.2 Pemilihan Sampel

Tahapan pertama akan dilakukan di perdesaan di kabupaten dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) Kemiskinan didominasi di perdesaan, 2) Program-program pengentasan kemiskinan di perdesaan pada dasarnya sama di seluruh Indonesia, yang membedakan ada di karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing desa, 3) Di Pulau Jawa, kemiskinan tertinggi di perdesaan ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 2018 dan 2020, 4) jumlah desa tertinggi juga ada di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Alasan selanjutnya, perubahan persentase penduduk miskin di perdesaan Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dibanding di Jawa Timur pada tahun 2018 dan 2020, di Provinsi Jawa Tengah naik 0,4% sedangkan Provinsi Jawa Timur turun 0,05%. Di Provinsi Jawa Tengah status desa berkembang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2020) sehingga pemilihan sampel yang diambil adalah Provinsi Jawa Tengah. Tahapan kedua, karakteristik desa di Kabupaten Provinsi Jawa Tengah yang lebih bervariasi. Dari seluruh desa, penelitian akan mengambil sampel dengan teknik sampel acak distratifikasi (*stratified random sample*).

Pengukuran sampel diperkuat juga secara statistik dengan melakukan penstrataan. Teknik ini merupakan metode pengambilan sampel yang digunakan ketika populasi objek penelitian tidak homogen, sehingga diperlukan penstrataan untuk memastikan sampel dapat menggambarkan populasi secara tepat (Mantra dan Kasto, 1981). Kabupaten akan dikelompokkan pada 3 kategori yaitu kategori miskin tinggi, miskin sedang dan rendah. Nilai rata-rata dan standar deviasi diperoleh sebagai indikator pengkategorian tinggi, sedang dan rendah. Menurut Azwar (2012), penentuan kategori didasarkan pada asumsi bahwa skor populasi subjek terdistribusi secara normal. Distribusi normal ini dibagi menjadi enam bagian atau enam satuan standar deviasi.

Tabel 3. 2 Hasil penghitungan nilai Mean dan SD

Kategori	Kabupaten	Jumlah desa
Rendah ($X < M - 1SD$)	Kudus	123
	Batang	239
Sedang ($M - 1SD \leq X < M + 1SD$)	Pati	401
	Tegal	281
Tinggi	Brebes	292

$(M + 1SD \leq X)$	Banyumas	301
--------------------	----------	-----

Sumber: Hasil perhitungan, 2025

Tabel 3.2 menunjukkan hasil kategori sesuai pengukuran nilai *mean* dan standar deviasi jumlah penduduk miskin di 29 kabupaten kemudian dipilih 6 Kabupaten sebagai berikut: Kabupaten Kudus dan Batang mewakili penduduk miskin rendah. Kabupaten Pati dan Tegal mewakili jumlah penduduk miskin kategori sedang. Kategori penduduk miskin tinggi diwakili Kabupaten Brebes dan Banyumas. Penelitian ini menggunakan unit analisis di tingkat desa. Rincian desa di masing-masing kabupaten sesuai dengan tercantum di tabel 6 dengan total sebanyak 1.637 desa.

3.3 Alat Analisis

3.3.1 *Structural Equation Model – Partial Least Square (SEM-PLS)*

SEM-PLS digunakan dalam menganalisis hubungan kausalitas antara variabel yang bersifat laten. Variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, melainkan harus diwakili melalui beberapa indikator. SEM mengintegrasikan konsep dan data yang diperoleh dari pengalaman dengan memformulasikan kesalahan dalam pengamatan, mencampurkan antara konsep dan fakta dalam analisis, menguji teori dengan bukti (pengujian hipotesis) serta menciptakan teori dan informasi (pembangunan teori) (Fornell, 1982). Analisis SEM-PLS menggunakan software SmartPLS 4, kegunaannya adalah untuk menguji hubungan struktural antar variabel laten, menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung (mediasi), mengevaluasi model pengukuran dan model struktural secara bersamaan, serta menangani variabel manifes dengan

jenis data campuran, termasuk dummy.

Pada umumnya estimasi parameter dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) dilakukan menggunakan pendekatan *Covariance-Based SEM* (CB-SEM) dengan metode *Maximum Likelihood* (ML). Pendekatan ini mensyaratkan ukuran sampel yang relatif besar, data berdistribusi normal multivariat, serta model yang didukung oleh landasan teori yang kuat. Namun, dalam penelitian ini digunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) karena memiliki beberapa keunggulan metodologis. Pertama, PLS-SEM tidak mensyaratkan normalitas multivariat yang ketat sehingga lebih sesuai untuk data sosial-ekonomi yang sering kali tidak berdistribusi normal. Kedua, PLS-SEM mampu memberikan estimasi yang stabil pada ukuran sampel yang relatif terbatas dibandingkan CB-SEM. Ketiga, metode ini berorientasi pada prediksi (*prediction-oriented*) dan mampu memaksimalkan varians konstruk endogen, sehingga sangat sesuai untuk menganalisis hubungan antarvariabel yang kompleks dan bersifat eksploratif. Selain itu, PLS-SEM dapat digunakan untuk menguji model yang melibatkan banyak indikator dan konstruk laten secara simultan, serta tetap menghasilkan estimasi yang robust ketika model penelitian masih dalam tahap pengembangan teori. Dengan karakteristik tersebut, PLS-SEM dipandang sebagai metode yang tepat untuk menganalisis hubungan antara dimensi modal sosial dengan kemiskinan yang melibatkan variabel-variabel laten. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hair *et al.* (2017) bahwa SEM-PLS direkomendasikan ketika tujuan penelitian berfokus pada pengembangan teori, prediksi hubungan antar konstruk, ukuran sampel relatif terbatas, serta ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas multivariat.

Pada SEM-PLS, model terdiri atas dua bagian utama, yaitu model struktural (internal) yang merepresentasikan hubungan antar konstruk laten, dan model pengukuran (eksternal) yang menunjukkan keterkaitan antara konstruk

dengan indikator-indikatornya. Asumsi yang ada dalam SEM diantaranya yaitu :

1. Linieritas: hubungan antar variabel bersifat linier.
2. Kolinieritas : beberapa variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen
3. Model Rantai kausal: terdapat model kausal yang mengarah pada variabel endogen
4. Data metrik skala interval: variabel yang diamati memiliki data skala interval
5. Rekursi: arah panah searah dan tidak boleh memiliki keterkaitan.

Model SEM-PLS memiliki sejumlah karakteristik yang dapat dilihat dari jumlah indikator, model pengukuran, tingkat kompleksitas, serta jenis hubungan yang digunakan dalam model. Salah satu keunggulan pendekatan SEM-PLS adalah kemampuannya dalam mengestimasi hubungan dua arah (*nonreciprocal*) maupun hubungan timbal balik (*reciprocal*), seperti dijelaskan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Karakteristik Model SEM-PLS

Aspek	Keterangan
Jumlah item/indikator dalam setiap variabel laten/konstruk	Konstruk dapat diukur menggunakan jumlah indikator yang fleksibel, baik sedikit maupun banyak. SEM-PLS mampu mengakomodasi penggunaan indikator dalam jumlah besar (lebih dari 50), berbeda dengan CB-SEM yang memiliki keterbatasan. Penggunaan indikator tunggal juga masih dimungkinkan.
Hubungan antara variabel laten/konstruk dan indikatornya	SEM-PLS dapat digunakan untuk model pengukuran baik yang bersifat reflektif maupun formatif. Sebaliknya, CB-SEM umumnya hanya terbatas pada model reflektif.

Aspek	Keterangan
Kompleksitas model	SEM-PLS mampu mengestimasi model dengan tingkat kompleksitas tinggi, termasuk model yang memiliki banyak jalur hubungan.
Jenis model struktural	SEM-PLS hanya dapat mengestimasi hubungan satu arah (<i>recursive</i>). Hubungan timbal balik (<i>nonrecursive</i>) tidak dapat dianalisis dengan metode ini, sedangkan CB-SEM memiliki kemampuan tersebut.

Sumber: Hair, *et al.* (2017)

Selain itu, dalam penerapan model SEM-PLS, terdapat beberapa persyaratan data yang perlu diperhatikan, seperti ukuran sampel, distribusi data, keberadaan data hilang (*missing values*), serta jenis skala pengukuran yang digunakan.

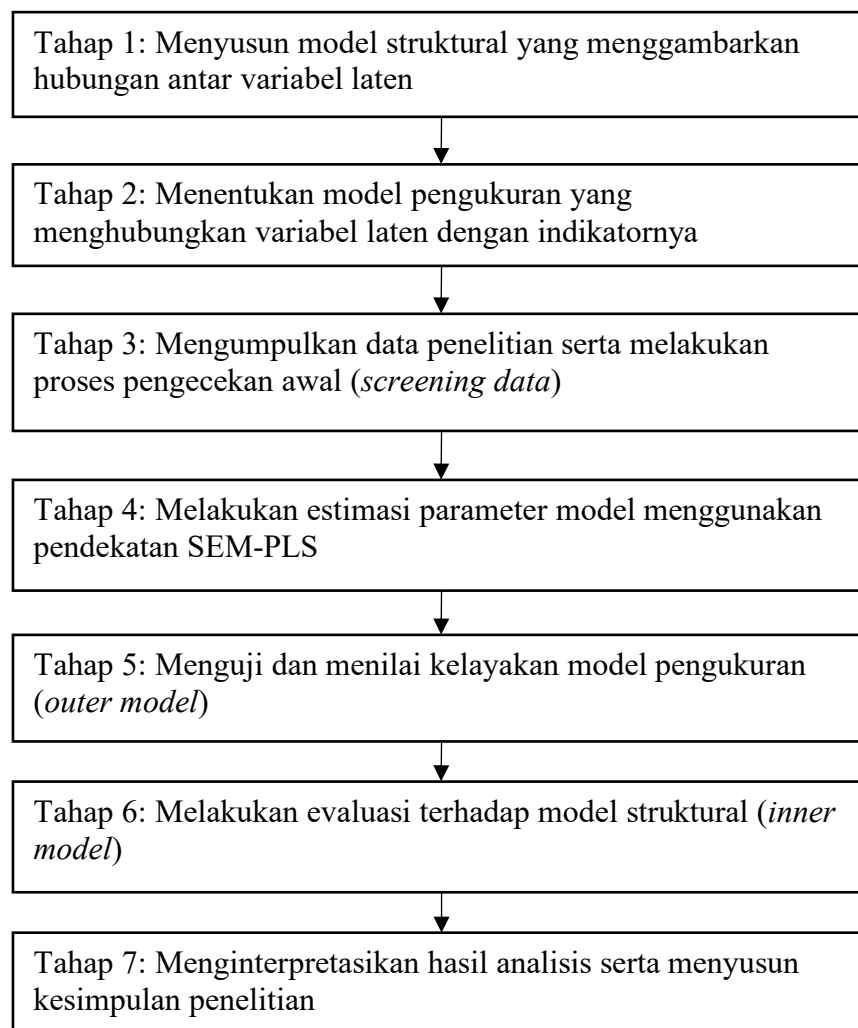
Tabel 3. 4 Karakteristik Data untuk Model SEM-PLS

Aspek	Keterangan
Ukuran sampel (sample size)	SEM-PLS tetap dapat digunakan meskipun ukuran sampel relatif kecil (sekitar 35–50 observasi). Metode ini juga mampu menghasilkan tingkat <i>statistical power</i> yang memadai pada sampel terbatas. Namun, penggunaan sampel yang lebih besar (di atas 250) akan meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil estimasi.
Distribusi data	Pendekatan SEM-PLS tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu karena bersifat nonparametrik. Oleh karena itu, metode ini tetap dapat digunakan meskipun data tidak berdistribusi normal, termasuk dalam kondisi ekstrem.
Data yang tidak lengkap (<i>missing values</i>)	SEM-PLS relatif tahan terhadap keberadaan data yang tidak lengkap selama jumlahnya masih dalam batas yang dapat ditoleransi (sekitar $\leq 15\%$ dari total data atau $\leq 5\%$ per indikator). Penanganan <i>missing values</i> dapat dilakukan dengan teknik seperti <i>mean replacement</i> atau <i>nearest neighbor</i> .
Skala pengukuran	SEM-PLS dapat digunakan untuk berbagai jenis skala, baik metrik maupun non-metrik (ordinal). Variabel kategorik seperti <i>binary/dummy</i> juga dapat digunakan, terutama untuk variabel laten eksogen. Namun,

Aspek	Keterangan
	penggunaannya terbatas untuk variabel laten endogen, sehingga dalam analisis multigrup disarankan menggunakan variabel biner

Sumber: Hair, *et al.* (2017)

Tahapan analisis dalam pendekatan SEM-PLS mengacu pada beberapa langkah sistematis yang dijelaskan oleh Hair *et al.* (2017), yang mencakup proses perancangan model hingga interpretasi hasil penelitian.



3.3.2 Model SEM PLS Modal Sosial dengan Kemiskinan

Variabel dan indikator yang dikaji pada penelitian ini sebagai berikut.

A. Dimensi Modal Sosial terdiri dari:

1. Koperasi
 - a. Jumlah KUD aktif (KOP1)
 - b. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam aktif (KOP2)
2. Musyawarah
 - a. Keaktifan dalam kegiatan musyawarah (MUS1)
 - b. Jumlah kegiatan musyawarah (MUS2)
3. Partisipasi Gotong Royong
 - a. Keaktifan Gotong Royong (GR1)
 - b. Ruang Publik (GR2)
4. Partisipasi Menjaga Lingkungan
 - a. Jumlah rata-rata anggota keluarga (PL1)
 - b. Keberadaan pengelolaan sampah (PL2)

B. Kemiskinan di Perdesaan

1. Jumlah penduduk miskin (KP1)
2. Jumlah fasilitas kesehatan (KP2)
3. Jumlah fasilitas Pendidikan (KP3)

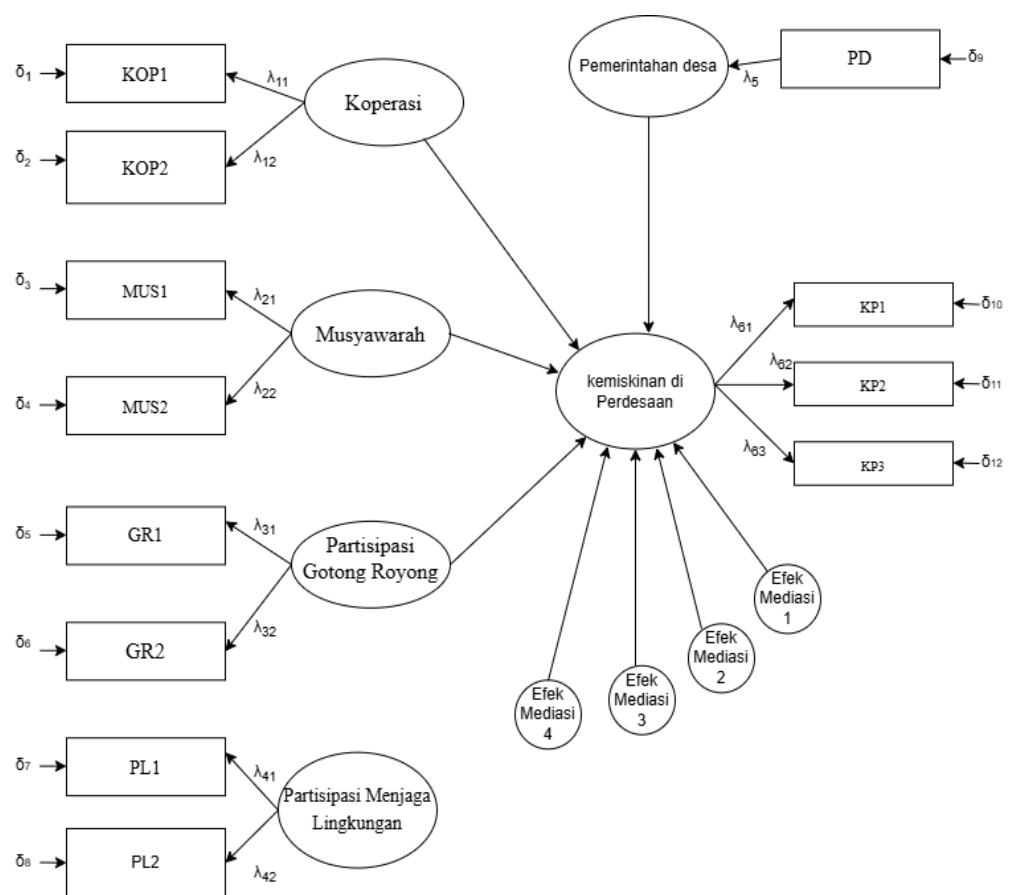
C. Pemerintahan Desa: jumlah perangkat pemerintahan desa (PD).

Kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu keadaan ketika rumah tangga berada dalam keterbatasan yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Kebutuhan dasar tersebut tidak hanya mencakup aspek ekonomi

seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga meliputi keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap layanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang memadai (BPS, 2022). Teori *basic needs* menjelaskan bahwa keterbatasan infrastruktur dasar seperti kesehatan dan pendidikan memperkuat kemiskinan karena menghambat peningkatan kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja (Todaro & Smith, 2020). Selain itu, jumlah penduduk miskin secara langsung mencerminkan kapasitas desa dalam mengatasi kerentanan ekonomi (World Bank, 2021). Pemerintahan desa yang efektif memainkan peran penting dalam pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan lokal. Jarak layanan publik mencerminkan tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas pemerintahan (Nugroho, 2020). Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan anggota melalui peningkatan akses permodalan dan usaha masyarakat (Hendar & Kusnadi, 2017). Keberadaan koperasi aktif meningkatkan aktivitas ekonomi desa dan peluang kerja sehingga berpotensi mengurangi kemiskinan (ILO, 2020). Musyawarah desa adalah praktik demokrasi partisipatoris dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Ketersediaan sarana musyawarah dan intensitas pelaksanaannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat adaptasi kebijakan dengan kebutuhan warga (Wahyudi, 2019).

Desa dengan musyawarah aktif menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif (Fitriani, 2021). Gotong royong merupakan modal sosial berbasis kolektivitas yang melibatkan kesukarelaan warga untuk kerja bersama dalam memenuhi kebutuhan bersama (Koentjaraningrat, 2009). Partisipasi gotong royong yang tinggi

mencerminkan kuatnya kohesi sosial dan menjadi kekuatan pembangunan yang menekan biaya publik (Putnam, 2000). Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan dalam organisasi kemasyarakatan seperti anggota keluarga memperkuat modal sosial dan kapasitas pemberdayaan keluarga (Mardiana, 2020). Partisipasi aktif kegiatan lingkungan dapat meningkatkan kesehatan dan ketahanan sosial warga sehingga menurunkan risiko kemiskinan (UNDP, 2021).



Gambar 3. 1 Konseptual Persamaan Struktural Modal Sosial dan Kemiskinan Dengan Mediasi Pemerintahan Desa

Modal sosial di masyarakat desa tercermin melalui berbagai praktik kolektif seperti keberadaan dan aktivitas koperasi, pelaksanaan musyawarah desa, keterlibatan di kegiatan gotong royong, serta partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berbagai unsur tersebut memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Koperasi, misalnya, berperan dalam memperkuat kapasitas ekonomi warga, yang pada akhirnya turut mendorong proses pembangunan desa secara lebih berkelanjutan (ILO, 2020; Hendar & Kusnadi, 2017).

Musyawarah desa meningkatkan kualitas tata kelola melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa (Fitriani, 2021; Wahyudi, 2019). Partisipasi gotong royong memperkuat kepercayaan sosial dan kemampuan koordinasi pemerintah dengan masyarakat (Putnam, 2000; Koentjaraningrat, 2009). Selain itu, peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kegiatan pemberdayaan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik desa, khususnya bidang kesehatan dan permukiman (UNDP, 2021).

Pemerintahan desa yang berjalan secara efektif diharapkan dapat memperluas akses masyarakat ke layanan dasar, khususnya pada sektor infrastruktur kesehatan dan pendidikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan (Nugroho, 2020; World Bank, 2022). Modal sosial juga dapat menurunkan kemiskinan secara langsung melalui penguatan solidaritas, fasilitasi informasi dan peluang ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah (Grootaert & Van Bastelaer, 2002; Woolcock, 2010).

Oleh karena itu, pemerintahan desa dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh modal sosial terhadap tingkat kemiskinan (Ansell & Gash, 2018; Heliandi, 2022). Dengan demikian, dalam penelitian ini pemerintahan desa ditempatkan sebagai variabel mediasi yang

menghubungkan pengaruh modal sosial dengan tingkat kemiskinan (Ansell & Gash, 2018; Heliandi, 2022). Modal sosial tidak hanya berkontribusi secara langsung tetapi juga melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa sebagai saluran formal dalam menekan tingkat kemiskinan masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengolahan dan analisis data, disertai dengan pembahasan atas temuan yang dihasilkan. Penyajian hasil dilakukan dengan mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mempermudah pemahaman mengenai peran dan kontribusi setiap variabel yang dikaji. Analisis data pada penelitian ini menggunakan SEM-PLS (*Structural Equation Modeling – Partial Least Squares*). Analisis SEM-PLS digunakan untuk menganalisis pengaruh modal sosial secara langsung terhadap kemiskinan serta pengaruh secara tidak langsungnya dengan menambahkan variabel moderasi pemerintahan desa.

Pada bagian pertama, dipaparkan gambaran umum yang mencakup karakteristik modal sosial dan kemiskinan di masing-masing desa Kabupaten Banyumas, Brebes, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus. Selanjutnya, ditampilkan hasil estimasi SEM-PLS untuk menguji pengaruh empat dimensi modal sosial yaitu koperasi, musyawarah, gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan terhadap kemiskinan melalui mediasi pemerintahan desa.

4.1 Gambaran Umum Kemiskinan dan Modal Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ada di perdesaan Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus pada periode tahun 2018 dan 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder

yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta data Podes yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2018 dan 2020.

Tabel 4. 1 Profil Kabupaten Brebes, Pati, Kudus, Batang, Tegal, Banyumas

Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kondisi Geografis	Mata Pencanharian
Brebes	2.040.000	Luas wilayah luas ($\pm 1.769,6$ km ²). Sebagian besar dataran rendah di pantura, ada pula lereng/pegunungan di bagian selatan/barat daya, berbatasan dengan Jawa Barat dan Laut Jawa di utara.	Dominan pertanian berupa padi dan bawang merah (terkenal sebagai sentra bawang). Perikanan pesisir di beberapa kecamatan. Perdagangan & jasa lokal juga menyerap tenaga kerja.
Pati	1.359.364	Terletak di pantura Jawa Tengah (berbatasan Laut Jawa di utara). Mayoritas dataran rendah dan pesisir. Memiliki 21 kecamatan. Luas $\pm 1.503,7$ km ² .	Didominasi pertanian (petani/petani buruh), serta kegiatan perikanan di wilayah pesisir. Sektor informal dan perdagangan lokal juga signifikan.
Kudus	874.632	Kabupaten relatif kecil (± 425 km ²), datar dengan lahan produktif, posisi strategis di Pantura Jawa Tengah.	Manufaktur (industri kretek/rokok) merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, disusul sektor jasa/perdagangan dan pertanian.
Batang	841.004	Kombinasi pantai (Pantura), dataran rendah, dan wilayah pegunungan/lereng di selatan. Luas ± 857 km ² .	pertanian & perkebunan (padi, jagung, komoditas lokal), perikanan di pesisir, serta sektor industri/perdagangan di kawasan pantura.
Tegal	1.620.000	Terletak barat laut Jawa Tengah, wilayah mencakup pesisir utara (Pantura) dan daratan rendah sampai dataran tinggi kecil, memiliki 18 kecamatan. Luas $\pm 880-984$ km ² .	Pertanian dan industri pengolahan tercatat menyumbang porsi besar (kontributor utama PDRB daerah), disertai perdagangan dan jasa.
Banyumas	1.850.000	Dataran rendah, perbukitan, lereng Gunung Slamet di selatan. Luas $\pm 1.335-1.391$ km ² .	Pertanian (padi), perkebunan (kopi, karet) besar di wilayah agraris, selain itu sektor jasa, pendidikan, pariwisata (Purwokerto/Baturaden) juga menyerap banyak tenaga kerja.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel 4.1 merupakan profil singkat dari enam kabupaten yang diteliti, Kabupaten Brebes merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar

dibandingkan kelima kabupaten yang lainnya yakni sebesar 2.040.000 jiwa penduduk. Kabupaten Brebes juga memiliki wilayah yang paling luas yakni sekitar 1.769,6 km² dan mata pencahariaanya didominasi oleh pertanian. Jumlah penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Banyumas sebesar 1.850.000 jiwa dengan luas wilayah terbesar ketiga yakni sekitar 1.335–1.391 km². Mata pencaharian di Kabupaten Banyumas didominasi pertanian dan perkebunan. Kabupaten Tegal merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga yakni sebesar 1.620.000 jiwa dengan luas wilayah terbesar ke empat dengan luas 880–984 km². Mata pencaharian Kabupaten Tegal terlihat dari pertanian dan industri pengolahan yang tercatat sebagai penyumbang terbesar di PDRB. Kabupaten Pati memiliki jumlah penduduk sebesar 1.359.364 jiwa dengan luas wilayah seluas 1.503,7 km². Mata pencaharian didominasi pertanian serta ada kegiatan perikanan di wilayah pesisir. Kabupaten Kudus dan Batang memiliki jumlah penduduk masing-masing sebesar 874.632 jiwa dan 841.004 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Kudus relatif kecil hanya sekitar 425 km², namun mata pencaharian didominasi oleh manufaktur di bidang industri kretek dan rokok. Kabupaten Batang memiliki luas wilayah 857 km² dengan mata pencaharian didominasi bidang pertanian dan perkebunan.

Di sisi lain, kabupaten dengan jumlah desa paling banyak adalah Kabupaten Pati yaitu 401 desa dan yang paling sedikit adalah Kabupaten Kudus dengan jumlah desa 123 desa. Jumlah penduduk paling besar antara keenam Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Brebes dengan total seluruh penduduknya pada tahun 2020 adalah 2 juta jiwa dan paling rendah adalah Kabupaten Batang dengan total penduduknya sebesar 690 ribu jiwa.

Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, tingkat kemiskinan di daerah ini masih tergolong tinggi. Pada periode sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Brebes mencapai sekitar 1,3 juta jiwa atau setara dengan 70,23%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sekitar 1,1 juta jiwa dengan proporsi sebesar 55,76%. Jika dilihat dari distribusinya, terdapat beberapa kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 50%, antara lain Brebes, Banyumas, dan Batang. Sebaliknya, wilayah dengan persentase di bawah 50% meliputi Kabupaten Tegal, Pati, dan Kudus. Di antara seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Kudus menunjukkan tingkat kemiskinan paling rendah, yakni sekitar 25,87%.

Di sisi lain pada bagian modal sosial terdapat gotong royong, musyawarah, partisipasi menjaga lingkungan, dan koperasi. Kabupaten paling aktif dalam kegiatan gotong royong adalah Kabupaten Banyumas dengan persentase desa yang aktif dalam kegiatan gotong royong sebesar 96,30% pada tahun 2020, di mana jumlah desa yang aktif dalam kegiatan gotong royong sebanyak 298 desa.

Kabupaten yang memiliki persentase desa aktif paling rendah dalam kegiatan gotong royong adalah Kabupaten Brebes dengan persentase sebesar 70,54% pada tahun 2020, di mana jumlah desa yang aktif dalam kegiatan gotong royong sebanyak 206 desa dari 292 desa. Kabupaten dengan kegiatan musyawarah paling banyak adalah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Batang, keduanya memiliki rata-rata jumlah kegiatan musyawarah per desanya sebanyak 8 kegiatan pada tahun 2020. Kabupaten yang memiliki kegiatan musyawarah paling sedikit di

setiap desanya adalah Kabupaten Kudus dengan jumlah rata-rata kegiatan musyawarah di masing-masing desanya 5 kegiatan.

Partisipasi menjaga lingkungan desa yang paling banyak adalah Kabupaten Banyumas dengan jumlah desa aktif dalam menjaga lingkungan sebanyak 53 desa pada tahun 2020, sedangkan berdasarkan persentasenya yang paling besar adalah di Kabupaten Kudus dengan jumlah desa aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan sebanyak 23 desa dari total keseluruhan 123 desa. Kabupaten dengan partisipasi menjaga lingkungan paling rendah adalah Kabupaten Brebes dengan persentase desa yang aktif sebesar 4,79% pada tahun 2020 dengan total desa aktif 14 desa dari total keseluruhan desa 292 desa di Kabupaten Brebes.

Kabupaten yang memiliki koperasi paling banyak adalah Kabupaten Pati dengan jumlah desa yang memiliki koperasi adalah 143 desa pada tahun 2018, akan tetapi bila berdasarkan persentase, kabupaten yang memiliki persentase koperasi paling besar adalah Kabupaten Kudus dengan persentase sebesar 52,84% pada tahun 2018. Di sisi lain, kabupaten yang memiliki koperasi di masing-masing desanya paling sedikit ada di Kabupaten Batang dengan jumlah desa yang memiliki koperasi sebanyak 48 desa pada tahun 2020 dan dengan persentase paling rendah yakni sebesar 20,08%.

Pelayanan dasar terdiri dari infrastruktur kesehatan dan infrastruktur Pendidikan di perdesaan. Partisipasi desa dalam proyek pembangunan mencerminkan peran modal sosial dalam mendukung proses perencanaan, pembiayaan, hingga pelaksanaan infrastruktur di tingkat lokal. Bentuk keterlibatan ini mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan serta fasilitas dasar,

yang pada gilirannya mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan menurunkan tingkat kemiskinan (Grootaert, 1999). Narayan & Pritchett (1999) menyebutkan bahwa infrastruktur yang baik dapat menguatkan asosiasi lokal dan aksi kolektif, karena dapat menurunkan biaya transaksi pengorganisasian dan mendorong interaksi berulang di antara anggota. Infrastruktur kesehatan yang paling banyak di enam kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kudus, di mana masing-masing desanya setidaknya memiliki 6 infrastruktur kesehatan di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan di Kabupaten Kudus cukup memadai. Di sisi lain, Kabupaten Batang memiliki infrastruktur kesehatan yang paling sedikit yakni hanya 2 per desanya. Infrastruktur pendidikan setiap desa di enam Kabupaten cukup memadai, hanya saja masih terdapat beberapa yang tidak memiliki pendidikan jenjang SD dan SMP. Kabupaten yang desanya masih tidak memiliki infrastruktur pendidikan paling banyak berada di Kabupaten Pati tahun 2020 yakni 6 desa yang tidak memiliki infrastruktur pendidikan. Kabupaten Brebes memiliki infrastruktur pendidikan yang cukup memadai, di tahun 2020 memiliki kisaran 2-7 SD dan SMP per desanya. Berikut deskripsi karakteristik perdesaan yang dijadikan obyek penelitian.

Tabel 4. 2 Karakteristik Perdesaan di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang dan Kudus tahun 2018 dan 2020

No	Kabupaten	Tahun	Karakteristik Desa		Kemiskinan Tingkat Kemiskinan	Modal Sosial				Infrastruktur	
			Jumlah Desa	Jumlah Penduduk		Koperasi	Musyawarah	Partisipasi Gotong-royong	Partisipasi Menjaga Lingkungan	Kesehatan	Pendidikan
1	Brebes	2018	292	1869555	1313051 (70,23%)	216 desa yang tidak memiliki koperasi dan sisanya 76 memiliki koperasi (26,02%)	6	209 desa yang aktif gotong-royong dan 83 desa yang tidak aktif (71,57%)	279 desa yang tidak aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan dan 13 desa yang aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan (4,45%)	Desa memiliki setidaknya 4 fasilitas kesehatan	Rata-rata desa memiliki fasilitas SD dan SMP. Mayoritas desa memiliki 2-7 (SD dan SMP)
		2020	292	2014503	1123400 (55,76%)	205 desa yang tidak memiliki koperasi dan 87 desa memiliki koperasi (29,79%)	7	206 desa yang aktif dan 86 memiliki aktivitas gotong-royong yang tidak aktif (70,54%)	278 desa yang tidak aktif berpartisipasi menjaga lingkungan dan 14 desa yang memiliki keaktifan dalam menjaga lingkungan (4,79%)	Desa memiliki setidaknya 4 fasilitas kesehatan	terdapat 1 desa yang tidak memiliki sekolah jenjang SD dan SMP. Fasilitas pendidikan (SD dan SMP) berkisar 2-6 per desa
2	Banyumas	2018	301	1591470	792598 (49,80%)	209 desa yang tidak memiliki koperasi dan sisanya 92 memiliki koperasi (30,56%)	7	287 desa yang aktif dalam kegiatan gotong-royong dan 14 desa yang tidak aktif (95,34%)	261 desa yang tidak aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan dan 40 desa yang aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan (13,28%)	terdapat 3 desa yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan setidaknya desa memiliki 3 fasilitas kesehatan	Rata-rata desa memiliki fasilitas SD dan SMP. Mayoritas desa memiliki 1-5 (SD dan SMP)
		2020	301	1536336	807315 (52,54%)	225 desa tidak memiliki koperasi dan sisanya 76 desa memiliki koperasi (25,24%)	8	298 desa memiliki keaktifan dalam gotong-royong dan 3 desa yang tidak aktif (96,30%)	248 desa yang tidak berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan dan 53 desa yang berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan (17,60%)	Desa memiliki setidaknya 3 fasilitas kesehatan	Rata-rata desa memiliki fasilitas SD dan SMP. Mayoritas desa memiliki 1-4 (SD dan SMP)
3	Tegal	2018	281	1507236	708380 (46,99%)	222 desa tidak memiliki koperasi dan sisanya 58 desa memiliki koperasi (20,64%)	6	205 desa memiliki keaktifan dalam gotong-royong dan 76 lainnya tidak aktif (72,95%)	255 desa tidak aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan dan 26 desa aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan (9,25%)	Desa memiliki setidaknya 3 fasilitas kesehatan	Rata-rata desa memiliki fasilitas SD dan SMP. Mayoritas desa memiliki 1-6 (SD dan SMP)

No	Kabupaten	Tahun	Karakteristik Desa		Kemiskinan	Modal Sosial				Infrastruktur	
			Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Tingkat Kemiskinan	Koperasi	Musyawarah	Partisipasi Gotong-royong	Partisipasi Menjaga Lingkungan	Kesehatan	Pendidikan
		2020	281	1571582	688854 (43,83%)	207 desa tidak memiliki koperasi dan sisanya 74 desa memiliki koperasi (26,33%)	7	212 desa memiliki keaktifan dalam gotong-royong dan 66 lainnya tidak aktif (75,44%)	252 desa tidak aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan dan 29 desa turut aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan (10,32%)	Desa memiliki setidaknya 5 fasilitas kesehatan	Rata-rata desa memiliki fasilitas SD dan SMP. Mayoritas desa memiliki 1-4 (SD dan SMP)
4	Pati	2018	401	1251378	599227 (47,88%)	258 desa tidak memiliki koperasi dan sisanya 143 lainnya memiliki koperasi (35,66%)	6	358 desa aktif dalam kegiatan gotong royong dan sisanya 43 desa tidak aktif dalam gotong royong (89,27%)	365 desa tidak aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan dan 36 desa lainnya aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan (8,97%)	Desa memiliki setidaknya 3 fasilitas kesehatan	terdapat 2 desa yang tidak memiliki sekolah jenjang SD dan SMP. Fasilitas pendidikan (SD dan SMP) berkisar 1-5 per desa
		2020	401	1306931	608132 (46,53%)	300 desa tidak memiliki koperasi dan sisanya 101 desa memiliki koperasi (25,18%)	7	356 desa aktif dalam kegiatan gotong royong dan 45 desa lainnya tidak aktif dalam gotong royong (88,77%)	353 desa tidak aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan dan 48 lainnya aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan (11,97%)	Desa memiliki setidaknya 3 fasilitas kesehatan	terdapat 6 desa yang tidak memiliki sekolah jenjang SD dan SMP. Fasilitas pendidikan (SD dan SMP) berkisar 1-3 per desa
5	Kudus	2018	123	817271	220411 (26,96%)	58 desa tidak memiliki koperasi dan sisanya 65 desa memiliki koperasi (52,84%)	5	113 desa aktif dalam kegiatan gotong royong dan 10 lainnya tidak aktif dalam kegiatan gotong royong (91,86%)	101 desa tidak aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan dan 22 lainnya aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan (17,88%)	Desa setidaknya memiliki 6 fasilitas kesehatan	Rata-rata desa memiliki fasilitas SD dan SMP. Mayoritas desa memiliki 2-6 (SD dan SMP)
		2020	123	809317	209433 (25,87%)	61 desa tidak memiliki koperasi dan sisanya 62 lainnya memiliki koperasi (50,40%)	5	117 desa aktif dalam kegiatan gotong royong dan 6 lainnya tidak aktif dalam kegiatan gotong royong (95,12%)	100 desa tidak aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan dan 23 lainnya aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan (18,69%)	Desa setidaknya memiliki 5 fasilitas kesehatan	terdapat 2 desa yang tidak memiliki sekolah jenjang SD dan SMP. Fasilitas pendidikan (SD dan SMP) berkisar 1-5 per desa
6	Batang	2018	239	690496	391449 (56,69%)	166 desa tidak memiliki koperasi dan	7	208 desa aktif dalam kegiatan gotong royong dan 31 lainnya tidak aktif dalam	206 desa tidak aktif dalam menjaga lingkungan dan 33	Desa setidaknya memiliki 2	Rata-rata desa memiliki fasilitas SD dan SMP.

No	Kabupaten	Tahun	Karakteristik Desa		Kemiskinan Tingkat Kemiskinan	Modal Sosial				Infrastruktur	
			Jumlah Desa	Jumlah Penduduk		Koperasi	Musyawarah	Partisipasi Gotong-royong	Partisipasi Menjaga Lingkungan	Kesehatan	Pendidikan
						sisanya 73 desa memiliki koperasi (30,54%)		kegiatan gotong royong (87,02%)	lainnya aktif dalam menjaga lingkungan (13,80%)	fasilitas kesehatan	Mayoritas desa memiliki 1-4 (SD dan SMP)
		2020	239	714043	381089 (53,37%)	191 desa tidak memiliki koperasi dan sisanya 48 desa memiliki koperasi (20,08%)	8	225 desa aktif dalam kegiatan gotong royong dan sisanya 14 desa tidak aktif dalam kegiatan gotong royong (94,14%)	215 desa tidak aktif dalam partisipasi menjaga lingkungan dan 24 lainnya aktif dalam menjaga lingkungan (10,04%)	Desa setidaknya memiliki 2 fasilitas kesehatan	terdapat 2 desa yang tidak memiliki sekolah jenjang SD dan SMP. Fasilitas pendidikan (SD dan SMP) berkisar 1-3 per desa

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2020, diolah

4.2 Hasil Analisis SEM-PLS

Penelitian ini mencakup penilaian terhadap model pengukuran (*outer model*) serta model struktural (*inner model*). Pengujian outer model bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai dalam merepresentasikan konstruk yang diteliti.

Penelitian ini memanfaatkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk menilai validitas konvergen dari konstruk yang digunakan, dengan tujuan mengukur sejauh mana variabel konstruk mampu menjelaskan varians dari indikator-indikatornya. Variabel yang dianalisis terdiri atas gabungan variabel teramati (*observed*) dan variabel laten yang dibentuk oleh sejumlah indikator. Fokus analisis diarahkan pada evaluasi model struktural (*inner model*) guna mengkaji hubungan kausal antara variabel *observed* dan variabel laten dalam kerangka SEM-PLS. Pengujian model struktural dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi penilaian koefisien determinasi (R^2), ukuran efek (f^2), relevansi prediktif (Q^2), serta uji signifikansi hubungan antarvariabel melalui koefisien jalur (*path coefficient*).

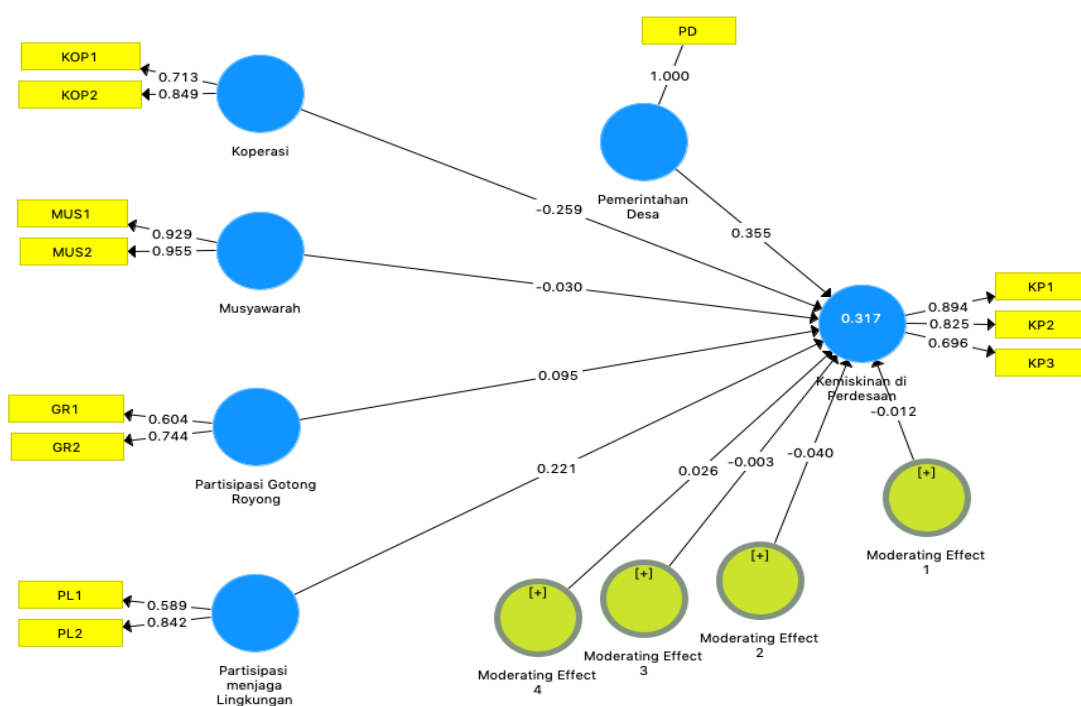
4.2.1 Uji *Average Variance Extracted* (AVE)

Tabel 4. 3 Hasil Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Indikator	AVE
Kemiskinan	0,654
Pemerintahan desa	1,000
Koperasi	0,614
Musyawarah	0,888
Partisipasi gotong royong	0,459
Partisipasi menjaga lingkungan	0,528

Sumber: Hasil estimasi, 2025

Menurut Hair *et al.* (2019), suatu konstruk dianggap memenuhi validitas konvergen apabila nilai AVE melebihi 0,50, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh varians indikator mampu dijelaskan oleh konstruk yang bersangkutan. Berdasarkan hasil tabel 4.3, sebagian besar konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria tersebut karena memiliki nilai AVE di atas batas yang ditentukan. Konstruk seperti kemiskinan, pemerintahan desa, koperasi, musyawarah, serta partisipasi dalam menjaga lingkungan dinilai telah valid, sehingga indikator-indikatornya mampu merefleksikan konstruk secara memadai. Sementara itu, nilai *loading factor* pada variabel partisipasi gotong royong sebesar 0,60 masih tergolong dapat diterima, meskipun isu validitas kerap muncul terutama pada model moderasi yang melibatkan konstruk formatif (Sholihin dan Ratmono, 2021).



Gambar 4. 1 Hasil Estimasi Model SEM-PLS Pengaruh langsung dan Efek Moderasi

Gambar 4.1 merupakan model struktural hasil pengolahan SEM-PLS yang mengilustrasikan keterkaitan antar konstruk dalam model sosial. Konstruk eksogen yang dianalisis meliputi koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, serta partisipasi dalam menjaga lingkungan, bersama dengan pemerintahan desa, yang dihubungkan dengan konstruk endogen berupa kemiskinan perdesaan di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus. Selain itu, model ini juga memasukkan pemerintahan desa sebagai variabel moderasi untuk menguji pengaruh hubungan antarvariabel. Penjelasan lebih lanjut mengenai model ini akan diuraikan secara rinci melalui hasil pengujian pada bagian berikut.

4.2.2 Uji *Collinearity* (VIF)

Tabel 4. 4 Evaluasi Kolinieritas (VIF)

Indikator	VIF
Penduduk miskin	1,540
Rata-rata KK	1,004
Aktif musyawarah	2,546
Gotong royong	1,007
Infrastruktur kesehatan	1,412
Infrastruktur pendidikan	1,898
Keberadaan TPS	1,004
Koperasi KUD	1,058
Koperasi simpan pinjam	1,058
Musyawarah	2,546
Pemerintahan desa	1,000
Ruang publik	1,007

Sumber: Hasil estimasi, 2025

Berdasarkan hasil pengujian *outer model* di tabel 4.4, seluruh indikator memiliki nilai VIF di bawah ambang batas 5. Temuan ini mengindikasikan tidak adanya gejala multikolinieritas antar indikator. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa setiap indikator bersifat saling independen dan layak digunakan dalam merepresentasikan konstruk yang diukur (Hair *et al.*, 2019).

4.2.3 Uji Discriminant Validity

Tabel 4. 5 Discriminant Validity

	Kemiskinan Perdesaan	Koperasi	Musyawahar	Partisipasi menjaga Lingkungan	Partisipasi Gotong Royong	Pemerintahan Desa
Kemiskinan Perdesaan	0,809					
Koperasi	-0,333	0,784				
Musyawahar	-0,052	0,009	0,943			
Partisipasi menjaga Lingkungan	0,287	-0,132	-0,011	0,726		
Partisipasi Gotong Royong	0,148	-0,067	-0,030	0,053	0,677	
Pemerintahan Desa	0,410	-0,096	-0,045	0,070	0,062	1,000

Sumber: Hasil estimasi, 2025

Tabel 4.5 menyajikan hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan pendekatan Fornell–Larcker. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE pada tiap konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasinya terhadap konstruk lain. Kondisi ini menegaskan bahwa setiap konstruk dalam model memiliki karakteristik yang berbeda secara jelas, sehingga persyaratan validitas diskriminan dapat dikatakan telah terpenuhi (Hair *et al.*, 2019).

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (*R-Squared*)

Tabel 4. 6 Hasil Koefisien Determinasi SEM

Construct	<i>R-Squared</i> (R^2)
Kemiskinan di perdesaan	0,317

Sumber: Hasil estimasi, 2025

Nilai *R-squared* pada kemiskinan di perdesaan pada tabel 4.6 adalah sebesar 0,317, artinya bahwa variabel modal sosial yang terdiri dari koperasi, musyawarah,

partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan melalui pemerintah desa dapat menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 31,7% dan sisanya 68,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.2.5 Effect Size (f^2)

Tabel 4. 7 Hasil f^2 SEM

Hubungan	f^2	Interpretasi
H1:Koperasi → kemiskinan	0,092	Sedang
H2:Musyawarah → kemiskinan	0,001	Lemah
H3:Partisipasi gotong royong → kemiskinan	0,013	Lemah
H4:Partisipasi menjaga lingkungan → kemiskinan	0,070	Sedang
H5:Pemerintahan Desa → kemiskinan	0,171	Sedang
H6:Pemerintahan desa*Koperasi → kemiskinan	0,000	Lemah
H7:Pemerintahan desa*Musyawarah → kemiskinan	0,002	Lemah
H8:Pemerintahan desa * Partisipasi gotong royong → kemiskinan	0,000	Lemah
H9:Pemerintahan desa*Partisipasi menjaga lingkungan → kemiskinan	0,001	Lemah

Sumber: Hasil estimasi, 2025

Berdasarkan hasil pengujian *effect size* (f^2) pada model SEM-PLS yang disajikan pada tabel 4.7, diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki tingkat kontribusi yang berbeda dalam menjelaskan variasi kemiskinan di wilayah perdesaan. Nilai f^2 mencerminkan besarnya kontribusi relatif variabel laten terhadap variabel endogen di struktur model.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pemerintahan desa memiliki kontribusi paling dominan dengan nilai f^2 sebesar 0,171 (kategori sedang). Dominasi ini tidak terlepas dari konstruksi indikator yang membentuk variabel tersebut, yaitu jumlah perangkat pemerintahan desa (PD). Indikator ini mencerminkan kapasitas kelembagaan desa dalam menjalankan fungsi administrasi, pelayanan publik, serta implementasi program pembangunan.

Semakin memadai jumlah perangkat desa, semakin besar potensi efektivitas koordinasi dan distribusi kebijakan yang berimplikasi pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi relatif yang lebih besar dari variabel ini dalam model dapat dipahami sebagai refleksi dari pentingnya kapasitas institusional dalam tata kelola pembangunan desa.

Selanjutnya, variabel koperasi menunjukkan nilai *effect size* sebesar 0,092 (kategori sedang), yang menandakan kontribusi moderat dalam model. Variabel ini dibentuk oleh indikator jumlah KUD aktif (KOP1) dan jumlah koperasi simpan pinjam aktif (KOP2). Kedua indikator tersebut merepresentasikan tingkat aktivitas ekonomi berbasis kelembagaan lokal. Keberadaan KUD dan koperasi simpan pinjam mencerminkan akses masyarakat terhadap layanan ekonomi produktif, seperti pembiayaan dan distribusi hasil usaha. Meskipun kontribusinya lebih rendah dibandingkan pemerintahan desa, keberadaan koperasi tetap menjadi elemen penting dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan.

Partisipasi menjaga lingkungan memiliki nilai f^2 sebesar 0,070 yang menunjukkan pengaruh kecil menuju sedang atau berada pada batas bawah kategori sedang. Variabel ini dibentuk oleh indikator jumlah rata-rata anggota keluarga (PL1) dan keberadaan pengelolaan sampah (PL2). Indikator PL2 secara khusus mencerminkan aspek kelembagaan lingkungan di tingkat lokal, sementara PL1 lebih menggambarkan karakteristik rumah tangga. Kombinasi kedua indikator ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan dan struktur rumah tangga memiliki kontribusi dalam model, meskipun masih relatif terbatas dalam menjelaskan variasi kemiskinan secara langsung.

Partisipasi gotong royong menunjukkan nilai f^2 sebesar 0,013 (kategori lemah), yang dibentuk oleh indikator keaktifan gotong royong (GR1) dan ketersediaan ruang publik (GR2). Keaktifan gotong royong merepresentasikan intensitas partisipasi sosial masyarakat, sedangkan ruang publik mencerminkan dukungan infrastruktur sosial. Nilai effect size yang rendah mengindikasikan bahwa meskipun interaksi sosial dan kohesi komunitas tetap ada, kontribusinya dalam menjelaskan variasi kemiskinan dalam model ini masih terbatas. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa partisipasi sosial belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Selanjutnya, musyawarah desa memiliki nilai f^2 sebesar 0,001 (kategori sangat lemah), yang dibentuk oleh indikator keaktifan dalam kegiatan musyawarah (MUS1) dan jumlah kegiatan musyawarah (MUS2). Kedua indikator ini mencerminkan intensitas proses deliberatif dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Namun, rendahnya kontribusi variabel ini dalam model menunjukkan bahwa keberadaan forum musyawarah belum secara efektif berpengaruh dalam menjelaskan variasi kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan dalam implementasi hasil musyawarah atau belum optimalnya kualitas partisipasi dalam proses tersebut.

Lebih lanjut, hasil pengujian efek moderasi yang melibatkan interaksi antara pemerintahan desa dengan variabel sosial (koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan) menunjukkan nilai *effect size* yang sangat lemah ($f^2 < 0,02$). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun masing-masing variabel sosial memiliki indikator yang merepresentasikan aktivitas dan

struktur sosial masyarakat, interaksi antarvariabel tersebut belum mampu secara signifikan memperkuat atau memperlemah hubungan antara pemerintahan desa dan kemiskinan dalam model yang digunakan.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa variabel dengan basis indikator yang bersifat struktural dan kelembagaan formal, seperti pemerintahan desa dan koperasi, cenderung memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan variabel yang berbasis partisipasi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kapasitas institusional dan akses ekonomi yang terukur melalui indikator-indikator konkret lebih berperan dalam menjelaskan variasi kemiskinan dibandingkan indikator yang bersifat partisipatif. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa interpretasi *effect size* pada penelitian ini terbatas pada kontribusi relatif variabel dalam model SEM-PLS. Dengan demikian, hasil ini tidak dapat diartikan sebagai hubungan sebab-akibat secara langsung, melainkan sebagai gambaran kekuatan peran masing-masing variabel dalam menjelaskan variasi kemiskinan berdasarkan konstruksi indikator yang digunakan.

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa seluruh interaksi antara variabel pemerintahan desa dengan koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, serta partisipasi dalam menjaga lingkungan menghasilkan nilai f^2 yang sangat rendah, yaitu berkisar antara 0,000 hingga 0,002, sehingga dapat dikategorikan sebagai efek yang lemah. Penelitian ini, pemerintahan desa diukur berdasarkan jumlah perangkat desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara kuantitatif, jumlah perangkat desa tidak memberikan peran moderasi yang signifikan dalam hubungan antara modal sosial dan tingkat kemiskinan.

Temuan ini perlu dicermati secara kritis karena menunjukkan bahwa penambahan jumlah perangkat desa tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas peran pemerintahan desa dalam mengelola dan memperkuat partisipasi masyarakat. Secara konseptual, pemerintahan desa diharapkan mampu memfasilitasi berbagai bentuk partisipasi masyarakat di perdesaan. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintahan desa yang tercermin dari jumlah keseluruhan perangkat desa belum cukup untuk menjalankan fungsi tersebut secara maksimal. Dengan demikian, lemahnya efek moderasi tidak hanya mencerminkan keterbatasan peran pemerintahan desa, tetapi juga mengindikasikan bahwa indikator yang digunakan (jumlah perangkat desa) belum mampu merepresentasikan secara utuh fungsi pemerintahan desa sebagai aktor pembangunan. Sementara itu, peran moderasi pemerintahan desa dalam menjelaskan hubungan modal sosial pada kemiskinan di perdesaan di model ini belum menunjukkan kontribusi yang berarti.

4.2.6 *Predictive Relevance (Q²)*

Pada tahap evaluasi model struktural, digunakan ukuran Stone-Geisser Q² sebagai indikator kemampuan prediksi di luar sampel (*out-of-sample predictive power*) atau relevansi prediktif model. Nilai Q² berfungsi untuk menilai sejauh mana model mampu memprediksi variabel endogen. Semakin mendekati angka 1, maka kemampuan prediktif model semakin baik. Dengan demikian, suatu model dikatakan memiliki validitas prediktif apabila nilai Q² lebih besar dari 0.

Tabel 4. 8 Hasil Q2 SEM

Construct	Q ²
Kemiskinan di perdesaan	0,199

Sumber: Hasil estimasi, 2025

Dengan demikian, model dalam penelitian ini tetap memiliki relevansi prediktif, meskipun kemampuan prediksinya masih terbatas dalam menjelaskan variasi kemiskinan perdesaan secara menyeluruh. Chin (1998) dan Hair *et al.* (2017) menyatakan bahwa nilai Q² yang rendah tidak serta-merta menunjukkan bahwa model tidak layak, tetapi lebih mencerminkan bahwa kontribusi prediktif dari variabel eksogen terhadap variabel endogen masih relatif kecil. Dalam konteks ini, hasil tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan perdesaan bersifat multidimensional, sehingga tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui faktor modal sosial dan pemerintahan desa.

Variabel pemerintahan desa dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah perangkat desa, yang lebih mencerminkan aspek kuantitatif aparatur daripada efektivitas fungsi pemerintahan desa itu sendiri. Oleh karena itu, masih sangat mungkin terdapat faktor-faktor lain di luar model yang turut menentukan tingkat kemiskinan, seperti pendidikan, kesempatan kerja, kepemilikan aset, kualitas infrastruktur, akses pasar, serta karakteristik geografis wilayah. Dengan demikian, keterbatasan daya prediksi model menunjukkan sepenuhnya menangkap keseluruhan determinan kemiskinan perdesaan.

4.2.7 Uji Signifikansi Pengaruh Langsung

Tabel 4. 9 Hasil Pengaruh Langsung

Hipotesis	<i>Path Coefficient</i>	t-Statistik	<i>p-value</i>	Keputusan
H1: Koperasi → kemiskinan	-0,259	13,261	0,000	Diterima
H2: Musyawarah → kemiskinan	-0,030	2,112	0,035	Diterima
H3: Partisipasi gotong royong → kemiskinan	0,095	6,006	0,000	Diterima
H4: Partisipasi menjaga lingkungan. → kemiskinan	0,221	14,424	0,000	Diterima
H5: Pemerintahan Desa → kemiskinan	0,355	18,283	0,000	Diterima

Keterangan: Tingkat signifikansi pada 5% dengan nilai t-statistik adalah 1,96

Sumber: Hasil estimasi, 2025

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel modal sosial yang diukur melalui indikator koperasi, kegiatan musyawarah, partisipasi gotong royong dan partisipasi menjaga lingkungan di perdesaan Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Batang, dan Kudus memiliki *p-value* kurang dari 0,05, sehingga semua variabel modal sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Secara detail, penjelasan berdasarkan hipotesis yang digunakan pada penelitian. Hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel koperasi memiliki nilai path coefficient sebesar $-0,259$, dengan t-statistik sebesar 13,261 dan p-value 0,000. Nilai t-statistik yang jauh melampaui batas kritis serta p-value yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa pengaruh koperasi terhadap kemiskinan signifikan secara statistik, sehingga H1 diterima. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan jumlah koperasi yang dikonstruksi dari jumlah KUD dan koperasi simpan pinjam berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi lokal mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dengan

demikian, semakin banyak koperasi yang tersedia di suatu wilayah, semakin besar peluang masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian, karena variabel koperasi diukur berdasarkan jumlah KUD dan koperasi simpan pinjam yang aktif, temuan ini lebih mencerminkan aspek kuantitas kelembagaan daripada efektivitas atau kualitas koperasi itu sendiri.

Hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel musyawarah memiliki nilai *path coefficient* sebesar -0,030, dengan nilai *t-statistik* sebesar 2,112 dan *p-value* sebesar 0,035. Hasil ini menunjukkan bahwa musyawarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga H2 diterima. Arah koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa peningkatan intensitas kegiatan musyawarah dan partisipasi aktif masyarakat cenderung berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, besaran koefisien yang relatif kecil menunjukkan bahwa kontribusi variabel ini dalam model bersifat terbatas. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa konstruk musyawarah dalam penelitian ini dibangun dari indikator jumlah kegiatan musyawarah dan tingkat partisipasi masyarakat, sehingga lebih merepresentasikan dimensi kuantitas dan keterlibatan partisipatif, bukan kualitas deliberasi atau efektivitas keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian, interpretasi hasil ini perlu dibatasi pada hubungan antara intensitas partisipasi dalam musyawarah dengan kemiskinan, tanpa menggeneralisasi pada mekanisme kausal yang lebih dalam.

Hipotesis 3 menunjukkan bahwa partisipasi gotong royong memiliki nilai *path coefficient* sebesar 0,095, dengan nilai *t-statistik* sebesar 6,006 dan *p-value*

sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga H3 diterima. Koefisien positif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi gotong royong berkaitan dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Namun demikian, interpretasi terhadap temuan ini perlu dilakukan secara hati-hati. Hubungan positif yang ditemukan tidak serta-merta menunjukkan bahwa gotong royong menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Sebaliknya, temuan ini dapat mengindikasikan adanya kemungkinan *reverse relationship*, di mana tingkat kemiskinan yang lebih tinggi justru mendorong meningkatnya praktik gotong royong sebagai mekanisme adaptif masyarakat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, partisipasi gotong royong dalam konteks ini dapat dipahami lebih sebagai respons sosial terhadap tekanan ekonomi daripada sebagai faktor yang secara langsung memperburuk kondisi kemiskinan.

Hipotesis 4 menunjukkan bahwa partisipasi dalam menjaga lingkungan memiliki nilai *path coefficient* sebesar 0,221, dengan nilai *t-statistik* sebesar 14,424 dan *p-value* sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga H4 diterima. Koefisien positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas menjaga lingkungan berkaitan dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Hubungan positif yang ditemukan tidak serta-merta menunjukkan bahwa partisipasi dalam menjaga lingkungan menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Sebaliknya, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi justru lebih terlibat

dalam aktivitas berbasis lingkungan sebagai bagian dari strategi adaptif atau karena keterbatasan akses terhadap alternatif kegiatan ekonomi yang lebih produktif (*reverse relationship*).

Hipotesis 5 menunjukkan bahwa variabel pemerintahan desa memiliki nilai *path coefficient* sebesar 0,355, dengan nilai *t-statistik* sebesar 18,283 dan *p-value* sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pemerintahan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 5%, sehingga H5 diterima. Koefisien positif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah perangkat desa berkaitan dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Pada penelitian ini, variabel pemerintahan desa dikonstruksi berdasarkan jumlah perangkat desa, sehingga lebih merepresentasikan kapasitas administratif secara kuantitatif, bukan kualitas tata kelola, efektivitas kebijakan, maupun kinerja program dalam menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, hubungan positif yang ditemukan tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemerintahan desa menyebabkan peningkatan kemiskinan. Sebaliknya, temuan ini dapat mengindikasikan adanya kemungkinan hubungan terbalik (*reverse relationship*), di mana desa dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi cenderung memiliki jumlah perangkat desa yang lebih banyak sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan sosial dan kebutuhan pelayanan publik. Selain itu, jumlah perangkat desa juga dapat mencerminkan ukuran dan kompleksitas desa, yang dalam beberapa kasus berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

4.2.8 Uji Signifikansi Pengaruh Jalur Moderasi

Tabel 4. 10 Hasil Jalur Moderasi

Hipotesis	Path Coefficient	t-Statistik	Keputusan
H6: Pemeritahan desa*Koperasi→ Kemiskinan	-0,012	0,682	Tidak diterima
H7: Pemerintahan desa*musyawarah → Kemiskinan	-0,040	1,922	Diterima
H8: Pemerintahan desa*Partisipasi gotong royong → Kemiskinan	-0,003	0,117	Tidak diterima
H9: Pemerintahan desa*Partisipasi menjaga lingkungan → kemiskinan	0,026	1,356	Tidak Diterima

Keterangan: Tingkat signifikansi pada 10% dengan nilai t-statistik adalah 1,64

Sumber: Hasil estimasi, 2025

Tabel 4.10 menyajikan hasil analisis model struktural menggunakan pendekatan SEM-PLS untuk menguji efek moderasi antara variabel pemerintahan desa dan berbagai dimensi modal sosial terhadap kemiskinan di perdesaan. Berdasarkan hasil estimasi, sebagian besar hubungan moderasi yang diuji tidak menunjukkan signifikansi pada tingkat signifikansi 5%. Secara khusus, interaksi antara pemerintahan desa dan musyawarah terhadap kemiskinan memiliki nilai *path coefficient* sebesar $-0,040$ dengan nilai *t-statistics* sebesar 1,922. Nilai ini berada di bawah ambang batas signifikansi 5% ($t < 1,96$), sehingga tidak signifikan pada tingkat tersebut. Namun demikian, jika menggunakan tingkat signifikansi 10% ($t > 1,64$), hubungan ini dapat dikategorikan sebagai signifikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa belum berfungsi secara efektif sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara modal sosial dan kemiskinan. Meskipun terdapat indikasi adanya efek moderasi pada hubungan antara musyawarah dan kemiskinan, pengaruh tersebut bersifat lemah dan tidak konsisten. Dalam penelitian ini, variabel pemerintahan desa dikonstruksi

berdasarkan jumlah perangkat desa, yang mencerminkan kapasitas sumber daya manusia dalam struktur pemerintahan desa. Oleh karena itu, interpretasi terhadap variabel ini lebih menekankan pada aspek kapasitas administratif, bukan pada kualitas kebijakan maupun efektivitas pelaksanaan program pembangunan secara keseluruhan.

Secara konseptual, kapasitas perangkat desa diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan koordinasi kegiatan ekonomi lokal, termasuk aktivitas koperasi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara jumlah perangkat desa dan koperasi tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah perangkat desa tidak secara langsung memperkuat peran koperasi dalam memengaruhi kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan perangkat desa lebih bersifat administratif dan tidak secara langsung meningkatkan efektivitas kelembagaan ekonomi lokal. Dengan demikian, hasil ini tidak menunjukkan bahwa koperasi tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa jumlah perangkat desa tidak berkontribusi dalam memperkuat hubungan antara koperasi dan kemiskinan dalam model yang digunakan. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan kondisi ini antara lain: (1) jumlah perangkat desa tidak selalu mencerminkan kapasitas fungsional atau kualitas kinerja, (2) pembagian tugas administratif yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal, serta (3) tidak adanya keterkaitan langsung antara jumlah perangkat desa dengan pengelolaan koperasi di tingkat operasional.

Pada hubungan moderasi lainnya, pemerintahan desa juga tidak terbukti berperan dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh partisipasi gotong

royong dan partisipasi menjaga lingkungan pada kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa variasi jumlah perangkat desa tidak memiliki keterkaitan yang kuat dengan dinamika partisipasi sosial masyarakat dalam konteks model ini.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas administratif yang direpresentasikan oleh jumlah perangkat desa tidak cukup untuk menjelaskan peran moderasi dalam hubungan antara modal sosial dan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain di luar jumlah perangkat desa, seperti kualitas kelembagaan, efektivitas koordinasi, dan kapasitas manajerial, menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Langsung Modal Sosial Terhadap Kemiskinan di Perdesaan

4.3.1.1 Pengaruh Koperasi terhadap Kemiskinan di Perdesaan

Berdasarkan hasil estimasi SEM-PLS pada tabel 4.9, dapat diketahui bahwa jumlah koperasi aktif memiliki nilai koefisien negatif dan signifikan signifikansi yang artinya bahwa keberadaan koperasi yang dikonstruksikan dengan jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang aktif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di perdesaan Kabupaten Banyumas, Brebes, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus. Temuan ini dapat dijelaskan melalui kondisi koperasi di wilayah perdesaan Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus yang memperlihatkan bahwa koperasi berpotensi menjadi instrumen penting dalam penguatan ekonomi masyarakat desa, meskipun tingkat keaktifan masih sangat bervariasi antar desa di

Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Batang dan Kudus. Keterbatasan variabel yang dikonstruksi untuk menjelaskan jumlah koperasi aktif di data Podes, kemudian diperkuat dengan observasi di lapangan. Hasil pengamatan menunjukkan juga hasil yang bervariasi atas kondisi koperasi di perdesaan. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada beberapa desa di Kabupaten Brebes, ditemukan bahwa peran koperasi belum berjalan secara baik dan bahkan cenderung tidak dirasakan oleh masyarakat miskin. Di Desa Pulosari, misalnya, disebutkan bahwa koperasi ada tetapi tidak aktif dan masyarakat tidak mengetahui secara pasti keberadaan maupun manfaat koperasi. Kondisi yang sama juga ditemukan di Desa Slati, masyarakat kategori miskin lebih memilih mengakses lembaga keuangan informal dibandingkan koperasi karena keterbatasan informasi dan akses.

Meskipun koperasi secara konseptual berperan sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan, temuan lapangan di beberapa desa menunjukkan bahwa peran tersebut belum sepenuhnya optimal. Di Desa Slati, misalnya, koperasi tidak aktif dan masyarakat tidak mengetahui secara pasti keberadaan maupun manfaat koperasi. Kondisi serupa juga ditemukan pada kelompok masyarakat miskin yang cenderung lebih memilih mengakses lembaga keuangan informal dibandingkan koperasi, yang disebabkan oleh keterbatasan informasi dan akses.

Berdasarkan perbandingan kondisi di beberapa desa tersebut, terlihat bahwa dalam praktiknya koperasi belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin secara merata. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya keterlibatan masyarakat miskin dalam struktur keanggotaan maupun kepengurusan koperasi. Rendahnya partisipasi tersebut menjadi salah satu

faktor yang menghambat efektivitas koperasi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut, temuan ini mengindikasikan bahwa koperasi di lokasi penelitian masih cenderung bersifat eksklusif dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan masyarakat miskin. Kondisi ini diperkuat oleh adanya pemisahan sosial-ekonomi, di mana kelompok masyarakat miskin tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan koperasi, baik sebagai anggota maupun sebagai pengelola.

Namun demikian, terdapat variasi kondisi antar wilayah. Di Desa Griting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, ditemukan adanya pemahaman yang lebih baik terkait koperasi, masyarakat berpartisipasi sebagai anggota dan memperoleh manfaat dari keberadaan koperasi. Sementara itu, di Desa Bogares Kidul, Kabupaten Tegal, keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Kredit Desa (BKD) yang berlokasi strategis di dekat balai desa memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pinjaman, baik untuk keperluan mendesak maupun dalam jumlah besar.

Di sisi lain, tidak semua desa memiliki akses yang sama terhadap lembaga koperasi. Di Desa Curug, Kabupaten Tegal, tidak terdapat KUD yang aktif, mengingat keberadaan KUD sebelumnya hanya berada pada tingkat kecamatan dan saat ini sudah tidak beroperasi (gulung tikar/bangkrut). Namun demikian, untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal tersebut, saat ini warga Desa Curug yang mengalami kesulitan keuangan difasilitasi oleh pemerintah desa melalui layanan simpan pinjam yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes). Keberadaan BUMDes ini menjadi alternatif akses pembiayaan bagi masyarakat, meskipun secara kelembagaan berbeda dengan koperasi.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan di lokasi penelitian belum menunjukkan hasil yang optimal. Keterbatasan akses, rendahnya partisipasi masyarakat miskin, serta belum meratanya keberadaan koperasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus, koperasi berperan dalam pemberian akses permodalan bagi pelaku UMKM. Menurut Dinas Koperasi Banyumas, pada 2022 jumlah koperasi aktif lebih dari 1.000 unit. Brebes dikenal dengan sektor pertanian bawang merah, memiliki koperasi tani dan koperasi wanita yang berperan dalam menyalurkan sarana produksi serta membantu pemasaran. Menurut laporan Dinas Koperasi dan UMKM Batang (2021), koperasi membantu petani dalam pengadaan pupuk, akses kredit, serta pemasaran produk, hal ini mendorong peningkatan produktivitas petani miskin. Koperasi berperan secara nyata dalam pengurangan kemiskinan pada tingkat lokal. Di Jawa Tengah, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi, sehingga penguatan koperasi di daerah-daerah penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan.

Kabupaten Banyumas memperlihatkan kondisi koperasi yang relatif lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Dominasi koperasi simpan pinjam mencerminkan fungsi koperasi sebagai penyedia layanan ekonomi dasar bagi

masyarakat desa. Peningkatan jumlah koperasi aktif dan kepatuhan terhadap pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) menunjukkan tata kelola yang lebih baik. Koperasi di Banyumas berpotensi kuat dalam menekan kemiskinan melalui mekanisme peningkatan daya beli, stabilisasi konsumsi rumah tangga, serta dukungan pembiayaan usaha kecil, sehingga mendukung temuan empiris bahwa koperasi berkontribusi menurunkan kemiskinan. Sebaliknya, kondisi koperasi di Kabupaten Pati dan Tegal memperlihatkan keterbatasan peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan akibat rendahnya tingkat keaktifan dan lemahnya tata kelola. Banyak koperasi tidak melaksanakan RAT dan tidak menjalankan usaha secara berkelanjutan, sehingga manfaat ekonomi bagi anggota menjadi minimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara statistik koperasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pengaruh tersebut sangat bergantung pada kualitas kelembagaan koperasi. Koperasi yang hanya berfungsi secara administratif tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di tingkat desa.

Di Kabupaten Batang, keberadaan koperasi di hampir seluruh desa menunjukkan cakupan kelembagaan yang luas, namun sebagian masih dihadapkan pada persoalan koperasi yang bermasalah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan koperasi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, koperasi yang berhasil dibina dan beroperasi dengan baik tetap memiliki potensi besar dalam menurunkan kemiskinan melalui penciptaan lapangan usaha, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan pendapatan anggota.

Sementara itu, di Kabupaten Kudus, jumlah koperasi desa yang banyak memberikan peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat desa, namun masih ditemukan koperasi yang tidak sehat. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas koperasi dalam menurunkan kemiskinan karena manfaat ekonomi tidak sepenuhnya dirasakan oleh anggota, khususnya rumah tangga miskin. Temuan ini memperkuat argumen bahwa dampak koperasi terhadap kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip keanggotaan dan tata kelola yang baik.

Berdasarkan hasil analisis SEM-PLS, koperasi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun demikian, hasil ini bersifat kontekstual dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di seluruh wilayah penelitian, mengingat adanya variasi implementasi koperasi di tingkat desa. Al Farisi *et al.* (2022) menyatakan bahwa koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Keberadaan UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, khususnya pada kelompok berpendapatan rendah. Kondisi ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, karena masyarakat memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Norhatan (2014) melakukan penelitian tentang koperasi di Indonesia. Salah satu indikator yang digunakan adalah jumlah koperasi aktif. Hubungan antara jumlah koperasi aktif dengan kemiskinan dianalisis secara mendalam berdasarkan

data pengamatan beberapa tahun yaitu 2007, 2008, 2010, dan 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat kemiskinan total dan kemiskinan di daerah perkotaan, khususnya pada tahun 2007, 2008, 2010, dan 2011. Peningkatan jumlah koperasi aktif pada periode tersebut cenderung diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin, baik secara nasional maupun di wilayah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan koperasi aktif dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, hubungan yang berbeda terlihat pada wilayah pedesaan. Korelasi antara jumlah koperasi aktif dan kemiskinan pedesaan relatif lebih lemah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun koperasi cukup banyak berkembang di daerah pedesaan dan menjadi salah satu pilihan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, efektivitasnya dalam menurunkan kemiskinan masih terbatas. Keterbatasan tersebut kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya kapasitas manajerial, keterbatasan akses pasar, serta kurangnya pelatihan dan penguatan kelembagaan. Selain itu, terdapat anomali pada tahun 2009, di mana seluruh variabel independen, termasuk jumlah koperasi aktif, menunjukkan hubungan positif dengan kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut koperasi tidak memberikan kontribusi signifikan dalam pengurangan kemiskinan, yang diduga kuat dipengaruhi oleh dampak krisis keuangan global 2008–2009 yang melemahkan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif berperan dalam menurunkan kemiskinan, terutama di tingkat nasional dan perkotaan. Namun, peran

tersebut lebih rendah di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan serta penguatan kapasitas koperasi agar dapat meningkatkan efektivitasnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, jumlah koperasi aktif dapat menjadi indikator penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, asalkan diiringi dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan operasional koperasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas, termasuk di daerah pedesaan.

Hasil penelitian Arestis dan Phelps (2025) menunjukkan bahwa kehadiran koperasi keuangan di Brasil memiliki kaitan signifikan dengan penurunan tingkat kemiskinan di berbagai negara bagian selama periode 2012 hingga 2022. Semakin padat jaringan cabang koperasi keuangan di suatu wilayah, semakin rendah prevalensi dan keparahan kemiskinan di wilayah tersebut, khususnya untuk tingkat kemiskinan moderat. Dampak pengurangan kemiskinan ini lebih kuat dirasakan di daerah-daerah yang memiliki tingkat eksklusi sosial yang tinggi, struktur pekerjaan yang lebih lokal, serta infrastruktur pendidikan publik yang kurang berkembang, yang mencerminkan orientasi sosial dan kehadiran lokal koperasi tersebut. Namun, koperasi keuangan kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, menunjukkan keterbatasan dalam menjangkau kelompok termiskin secara signifikan. Penetrasi fisik koperasi keuangan juga meningkat secara luas di hampir semua wilayah Brasil, meskipun kehadirannya masih lebih rendah di wilayah Utara dan Timur Laut yang umumnya lebih miskin dibandingkan wilayah Selatan dan Tenggara. Negara bagian dengan jumlah cabang koperasi yang relatif tinggi tidak hanya mengalami tingkat kemiskinan yang lebih rendah, tetapi juga fluktuasi

kemiskinan yang lebih terkendali selama dekade terakhir. Dengan demikian, keberadaan koperasi keuangan berperan penting dalam mitigasi kemiskinan dan pembangunan inklusif, terutama di wilayah yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi di Brasil.

Halilintar (2018) menyebutkan sebagian besar provinsi di Indonesia dengan proporsi koperasi aktif di atas 50 persen tergolong dalam kelompok berpendapatan rendah. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara tingginya jumlah koperasi aktif dan rendahnya tingkat pendapatan, sehingga koperasi cenderung lebih banyak berkembang di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa peran faktor penawaran yang tercermin dari adanya dorongan atau intervensi dalam pembentukan koperasi tampak lebih dominan dibandingkan dengan faktor permintaan pasar. Dengan demikian, tingginya jumlah koperasi tidak sepenuhnya mencerminkan respons terhadap peluang ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan atau upaya ekspansi koperasi di daerah berpendapatan rendah. Jumlah koperasi aktif tinggi di daerah berpendapatan rendah, hubungan ini akan memiliki hubungan secara langsung maka koperasi efektif dapat mengurangi kemiskinan jika ada dukungan indikator modal sosial lainnya seperti kejujuran, modal sumber daya manusia, modal keuangan dan sistem perekonomian yang baik.

Pollet (2009) menyatakan bahwa koperasi memiliki potensi besar sebagai model pembangunan di Afrika, khususnya melalui sektor simpan pinjam (SACCOs) yang berperan dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat, termasuk kelompok miskin dan yang kurang terlayani. Koperasi dinilai mampu

memberdayakan anggotanya melalui kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, penyediaan perlindungan sosial, serta fungsi advokasi, yang secara tidak langsung berkaitan dengan pengurangan kemiskinan. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa banyaknya koperasi terdaftar yang tidak aktif (*dormant*), dengan tingkat keaktifan yang hanya berkisar antara 20 hingga 80 persen. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi dan sosial, termasuk dalam upaya menurunkan kemiskinan.

Menurut Solomon (2023), koperasi memiliki peran strategis sebagai bentuk modal sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya melalui dua jenis kelembagaan utama, yaitu *Primary Cooperative Society for Marine* (PCSM) koperasi yang dibentuk oleh pemerintah dan *Patti Self-help Society* (PSS) koperasi yang tumbuh dari inisiatif komunitas lokal. Kedua bentuk koperasi tersebut berfungsi sebagai sumber daya material maupun nonmaterial yang membantu para nelayan dalam menghadapi tantangan ekonomi sehari-hari serta memperkuat posisi mereka dalam sistem produksi dan distribusi. Koperasi sebagai modal sosial, khususnya *bonding social capital* menjadi elemen kunci keberhasilan koperasi melalui peningkatan rasa saling percaya, solidaritas, serta kerja sama antaranggota. Namun demikian, efektivitas koperasi dalam mencapai tujuan sosial-ekonomi sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti intervensi politik, persyaratan keanggotaan yang ketat, dan struktur kekuasaan internal yang tidak merata. Hambatan-hambatan tersebut dapat membatasi pemanfaatan modal sosial secara optimal serta menyebabkan ketimpangan dalam distribusi manfaat di antara anggota dan komunitas. Meskipun menghadapi berbagai kendala, koperasi tetap

menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan nelayan dan melindungi nelayan dari praktik eksploitasi pihak perantara (*middlemen*). Dengan demikian, koperasi berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan secara tidak langsung. Namun, agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan, diperlukan dukungan kebijakan publik yang inklusif, serta pengelolaan koperasi yang transparan dan partisipatif di tingkat komunitas.

Studi literatur terkait hubungan koperasi dengan kemiskinan dilakukan oleh Kwapong & Hanisch (2013) di perdesaan Afrika, Asia (India, Bangladesh, Sri Lanka), Amerika Latin (Bolivia, Kolumbia) dan Eropa (Finlandia) memperkuat temuan penelitian. Di Afrika, koperasi mengalami perkembangan signifikan pasca liberalisasi ekonomi pada pertengahan 1990-an, terutama di negara-negara seperti Tanzania, Uganda, dan Kenya. Koperasi di wilayah ini berperan penting dalam menyediakan akses anggota terhadap aset dan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, koperasi mengintegrasikan kelompok miskin dan relatif lebih mampu sehingga membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial. Namun, pada masa sebelumnya, koperasi sering mengalami kegagalan akibat intervensi berlebihan pemerintah yang membatasi partisipasi anggota dan mengurangi otonomi organisasi. Keberhasilan koperasi di Afrika sangat tergantung pada pengelolaan yang baik, partisipasi anggota secara aktif, dan penghormatan pada prinsip koperasi.

Di Asia, khususnya di India, Bangladesh, dan Sri Lanka, koperasi menjadi instrumen yang efektif bagi pemberdayaan ekonomi kelompok miskin. Melalui koperasi, anggota mendapat kemudahan akses terhadap pasar, fasilitas kredit, dan

pelatihan keterampilan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Keberhasilan koperasi di kawasan ini bergantung pada kemandirian koperasi serta keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, dengan syarat nilai dan prinsip koperasi dihormati secara konsisten. Koperasi juga membantu pencapaian tujuan pembangunan seperti *Millennium Development Goals* (MDGs).

Di Amerika Latin, negara seperti Bolivia dan Kolombia menunjukkan bahwa keberadaan koperasi mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi produsen kecil dan petani dengan memperluas akses pasar dan kredit. Selain aspek ekonomi, koperasi di kawasan ini juga memainkan peran sosial penting melalui perlindungan sosial dan penguatan kapasitas anggota. Sementara itu, di negara maju dan Eropa, koperasi memiliki sejarah panjang dalam mendukung pemberdayaan anggota dan pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, integrasi antara hasil SEM-PLS dan observasi lapangan menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menurunkan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara kelembagaan, tetapi sangat bergantung pada kualitas tata kelola, tingkat inklusivitas keanggotaan, serta kemampuan koperasi dalam menjangkau dan melayani masyarakat miskin secara langsung. Selain itu, temuan lapangan juga mengindikasikan adanya perbedaan manfaat koperasi antar desa, pada desa-desa dengan koperasi yang aktif dan terkelola dengan baik, manfaat ekonomi relatif lebih dirasakan oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk akses permodalan dan dukungan usaha. Sebaliknya, pada desa-desa dengan koperasi yang tidak aktif atau kurang inklusif, masyarakat miskin cenderung tidak memperoleh

manfaat yang signifikan, bahkan tidak terjangkau oleh layanan koperasi sama sekali.

4.3.1.2 Pengaruh Musyawarah terhadap Kemiskinan di Perdesaan

Musyawarah pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perdesaan Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Batang dan Kudus. Temuan ini mengindikasikan semakin tinggi musyawarah dilakukan maka akan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Indikator musyawarah dikonstruksi dari variabel tingkat keaktifan dalam kegiatan musyawarah dan jumlah kegiatan musyawarah yang dilakukan di perdesaan Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Batang, dan Kudus. Hasil estimasi ini kemudian diperkuat dengan observasi lapangan di beberapa desa. Rata-rata frekuensi pertemuan dilakukan 2 kali dalam sebulan dengan melibatkan ketua Rukun Tetangga (RT) dan perangkat desa. Berdasarkan hasil pengamatan, materi yang dibahas dalam musyawarah desa di masih didominasi oleh isu-isu umum dan administratif desa. Pembahasan umumnya mencakup persoalan keamanan lingkungan, kebersihan, ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, musyawarah desa juga digunakan sebagai forum untuk perencanaan pembangunan desa, seperti penyusunan program infrastruktur, pembahasan anggaran termasuk Dana Desa, serta penentuan prioritas kegiatan tahunan. Dalam beberapa kasus, musyawarah juga berfungsi sebagai sarana distribusi dan sosialisasi bantuan sosial, termasuk penentuan dan validasi penerima manfaat. Meskipun demikian, pembahasan yang secara khusus diarahkan pada program pengentasan kemiskinan masih sangat terbatas, dan cenderung belum

menyentuh perancangan kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin. Pihak yang terlibat dalam musyawarah mulai dari kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai aktor formal utama, hingga perwakilan masyarakat seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Partisipasi masyarakat umum juga hadir, namun dengan tingkat keterlibatan yang bervariasi, sering kali bersifat pasif atau terbatas pada kehadiran saat undangan tertentu. Sementara itu, keterlibatan masyarakat miskin, cenderung rendah dan dalam banyak kasus hanya diwakili oleh pihak tertentu. Komposisi ini menunjukkan bahwa proses musyawarah desa masih didominasi oleh aktor formal dan elite lokal, sehingga ruang partisipasi masyarakat miskin dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi secara langsung menjadi terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun musyawarah desa telah berjalan sebagai mekanisme partisipatif secara formal, namun secara substantif belum sepenuhnya inklusif dan belum optimal dalam mengarahkan agenda pembangunan pada isu kemiskinan.

Variasi keaktifan dalam musyawarah juga terlihat di masing-masing perdesaan. Desa Pulosari Kabupaten Brebes, musyawarah yang dilakukan melalui rapat RT setiap dua bulan lebih banyak membahas persoalan lingkungan dan keamanan daripada program khusus untuk keluarga miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fokus pembahasan dalam musyawarah masih bersifat umum dan belum diarahkan secara spesifik pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Kondisi yang relatif berbeda terlihat pada beberapa desa lain di Kabupaten Brebes seperti Desa Grinting dan Desa Rengasbandung, masyarakat

menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam kegiatan musyawarah desa. Warga secara aktif menyampaikan usulan bantuan melalui RT, RW, dan kepala desa, serta terlibat dalam diskusi mengenai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa belum terdapat program desa yang secara khusus dirancang untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

Desa Sitanggal Kecamatan Larangan dan Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, pelaksanaan musyawarah belum berjalan secara baik dan tidak dilakukan secara rutin. Musyawarah desa sering kali hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan tidak memiliki jadwal yang jelas. Akibatnya, sebagian masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti keluarga miskin, tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, kehadiran peserta musyawarah cenderung didominasi oleh individu tertentu yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan dan Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, dimana kehadiran peserta musyawarah cenderung didominasi oleh individu tertentu yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa.

Di Desa Bogares Kidul Kecamatan Pangkah Kabupaten Brebes, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih tergolong rendah. Kehadiran dalam musyawarah biasanya hanya terjadi ketika ada undangan khusus dari ketua RT, dan sebagian warga hadir hanya untuk menerima informasi atau bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi musyawarah lebih bersifat informatif daripada partisipatif, sehingga masyarakat belum memiliki ruang yang cukup untuk

menyampaikan gagasan atau usulan secara aktif. Selain itu, kesibukan masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, seperti bekerja di sektor pertanian, juga menjadi salah satu hambatan dalam keterlibatan mereka dalam musyawarah desa. Sedangkan di Desa Curug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, pelaksanaan musyawarah desa berlangsung secara rutin namun lebih bersifat perwakilan. Desa Harjasari Kecamatan Suradadi, sebagian masyarakat menyatakan tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam kegiatan musyawarah desa. Informan menyampaikan bahwa musyawarah lebih sering dihadiri oleh perwakilan tertentu seperti ketua RW, ketua RT, dan perangkat desa, sehingga masyarakat umum merasa forum tersebut bersifat eksklusif. Kondisi ini menyebabkan munculnya sikap apatis di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai buruh harian dan memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan desa.

Di Kabupaten Banyumas, desa seperti Desa Pekuncen memperlihatkan praktik musyawarah yang relatif lebih inklusif dan terstruktur. Musyawarah desa dilaksanakan dengan mekanisme pencatatan aspirasi masyarakat, termasuk kelompok rentan (miskin), serta perencanaan program pemberdayaan ekonomi dan verifikasi validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kabupaten Pati, seperti yang terlihat di Desa Jembangan, musyawarah desa juga digunakan sebagai forum untuk penentuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Masyarakat miskin cenderung melakukan aduan kemudian aspirasi ini dibawa ke musyawarah desa. Desa Jembangan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati aktif melakukan kegiatan musyawarah. Di Kabupaten Tegal, Desa Balapulung Wetan merupakan salah satu desa dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Kelompok masyarakat miskin masih cenderung belum dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah desa. Aspirasi mereka terkait kebutuhan bantuan dari pemerintah umumnya hanya disampaikan melalui forum musyawarah desa oleh perwakilan tertentu, tanpa melibatkan secara langsung masyarakat yang bersangkutan.

Pada tahun 2020, pelaksanaan musyawarah desa di seluruh desa di Kabupaten Brebes, Banyumas, Batang, Pati, Tegal, dan Kudus dimanfaatkan terutama sebagai forum untuk menetapkan pengalihan anggaran pembangunan desa ke program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa serta kegiatan penanggulangan bencana. Musyawarah lebih berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas administratif dibandingkan sebagai ruang deliberasi ekonomi. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat miskin umumnya bersifat umum dan belum terarah pada upaya peningkatan pendapatan. Meskipun demikian, musyawarah desa tetap berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan desa, sehingga memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan.

Musyawarah desa di perdesaan Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus, umumnya dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini menjadi ruang formal bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk terkait program pengentasan kemiskinan seperti penentuan prioritas pembangunan, penyaluran bantuan sosial, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi. Keberadaan musyawarah tersebut secara konseptual mendukung penurunan

kemiskinan karena mendorong transparansi dan inklusivitas kebijakan di tingkat desa (BPS, 2020; Kementerian Desa PDTT, 2019).

Hasil penelitian di atas diperkuat dengan hasil penelitian Chen *et al.* (2024) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal mampu memperkuat kapasitas sosial dan mempercepat penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan. Selain itu, penelitian Osei dan Zhuang (2020) juga menunjukkan bahwa komunitas dengan tingkat deliberasi yang tinggi cenderung memiliki tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat miskin. Hasil penelitian mengindikasikan pengambilan keputusan yang tinggi mengindikasikan hubungan yang bersifat memperkuat atau memberikan pengaruh yang konstruktif terhadap upaya pengurangan kemiskinan. Dengan kata lain, partisipasi aktif masyarakat dan frekuensi kegiatan musyawarah yang relatif tinggi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan berpotensi meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan, memperkuat kepercayaan antarwarga maupun terhadap pemerintah desa, serta memastikan bahwa program yang dirumuskan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat. Partisipasi yang kuat dalam musyawarah juga berkontribusi pada efektivitas program dalam mengatasi penyebab kemiskinan secara lebih tepat sasaran di tingkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan secara langsung akan berpengaruh pada pengurangan kemiskinan (Behnke *et al.*, 2017 dan Arkorful *et al.*, 2021).

4.3.1.3 Pengaruh Partisipasi Gotong Royong terhadap Kemiskinan di Perdesaan

Hasil estimasi SEM-PLS menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam gotong royong berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya partisipasi dalam kegiatan gotong royong belum secara langsung berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Variabel gotong royong dalam penelitian ini dikonstruksi melalui dua indikator, yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan ketersediaan ruang publik sebagai sarana interaksi sosial. Kedua indikator tersebut merepresentasikan kuatnya kohesi sosial dalam masyarakat perdesaan.

Namun demikian, tingginya partisipasi sosial dan keberadaan ruang publik tidak serta-merta menghasilkan manfaat ekonomi. Sebaliknya, kondisi ini dapat mencerminkan bahwa masyarakat mengalokasikan waktu dan tenaga yang cukup besar untuk aktivitas sosial yang bersifat non-produktif secara ekonomi. Dalam konteks rumah tangga miskin, keterlibatan dalam gotong royong berpotensi mengurangi kesempatan untuk melakukan aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan. Sejalan dengan Chambers (1994), kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan pilihan dalam mengalokasikan sumber daya.

Pada perspektif teori modal sosial, Putnam (1993) menempatkan gotong royong sebagai bentuk modal sosial merupakan *bonding* yang berperan dalam membangun kepercayaan dan solidaritas sosial. Namun, dikritisi oleh Woolcock (1998) dan Portes (1998), modal sosial yang hanya bersifat *bonding* cenderung

terbatas pada hubungan internal dan belum mampu menghasilkan manfaat ekonomi tanpa adanya koneksi ke sumber daya yang lebih luas.

Di beberapa desa seperti Pulosari, Grinting, dan Rengasbandung, gotong royong menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif tinggi, baik dalam bentuk kerja bakti maupun kegiatan sosial tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat masih kuat. Namun demikian, aktivitas tersebut lebih bersifat sosial dan belum terorganisasi sebagai kegiatan ekonomi kolektif yang produktif. Bahkan di beberapa desa lain seperti Harjasari, terjadi penurunan partisipasi akibat tekanan ekonomi, yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi juga mempengaruhi dinamika modal sosial.

Dengan demikian, hubungan positif antara gotong royong dan kemiskinan tidak menunjukkan bahwa gotong royong memperburuk kemiskinan, melainkan mengindikasikan bahwa modal sosial tersebut belum berfungsi menjadi modal ekonomi produktif. Gotong royong dalam konteks ini dapat dipahami sebagai modal sosial yang sangat potensial, yaitu potensi kolektif yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Temuan ini diperkuat dari hasil temuan penelitian Kertanegara (2017) di desa Sriharjo Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan gotong royong belum mampu mengurangi kemiskinan di desa seperti Sriharjo. Salah satu penyebab utamanya adalah ketimpangan antara kewajiban dan manfaat yang muncul dari hubungan sosial yang tidak seimbang. Pada kondisi ini, tidak semua pihak memiliki kemampuan untuk membalas bantuan yang diterima,

sehingga solidaritas menjadi tidak merata dan justru berpotensi memperkuat ketimpangan sosial. Selain itu, akses terhadap praktik solidaritas ini cenderung terbatas dan selektif, sehingga kelompok miskin kesulitan untuk terlibat secara penuh maupun memperoleh manfaat yang setara. Partisipasi dalam gotong royong juga sering dipandang sebagai beban, terutama bagi masyarakat miskin yang harus menyediakan kontribusi tenaga atau materi di tengah keterbatasan ekonomi, misalnya dalam kegiatan ronda malam atau penyediaan konsumsi bagi pekerja. Perubahan sosial akibat modernisasi seperti migrasi, meningkatnya orientasi ekonomi berbasis uang, serta pergeseran nilai turut melemahkan peran gotong royong sebagai mekanisme utama dalam pengentasan kemiskinan. Di samping itu, konflik internal dan persoalan sosial, seperti yang terjadi setelah gempa 2006, memperburuk kondisi solidaritas akibat perselisihan dalam distribusi bantuan dan isu korupsi.

Bowen (1986) menjelaskan bahwa gotong royong tidak hanya merepresentasikan praktik resiprositas tradisional, tetapi juga telah menjadi instrumen mobilisasi tenaga kerja oleh negara melalui proses *misrecognition*, yaitu pengaburan antara kerja sukarela dan kerja berbasis kewajiban administratif. Partisipasi aktif yang tinggi tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan. Gotong royong dijadikan dasar ideologis untuk mobilisasi tenaga kerja gratis.

Nasution (2016), gotong royong merupakan salah satu dimensi penting dari modal sosial yang berperan dalam memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai bentuk modal sosial, gotong royong berfungsi sebagai jembatan sosial (*social bridge*) yang mendorong keterlibatan aktif warga dalam

berbagai program pembangunan desa, sekaligus mempererat ikatan sosial yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan kolektif. Keberadaan modal sosial yang kuat melalui praktik gotong royong menjadi faktor kunci agar program pembangunan dapat berjalan secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan gotong royong tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pembangunan desa secara keseluruhan.

Secara umum gotong royong telah mengakar dalam kehidupan di perdesaan Indonesia. Begitu juga halnya dengan perdesaan di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, Batang, dan Kudus. Gotong royong tetap menjadi praktik sosial yang hidup di perdesaan Kabupaten Brebes, Banyumas, Batang, Pati, Tegal, dan Kudus. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk kerja bakti perbaikan infrastruktur desa, kebersihan lingkungan, serta bantuan sosial informal antarwarga. Berbeda dengan mekanisme formal pemerintahan desa, gotong royong bersifat sukarela, tidak berupah, dan memungkinkan partisipasi langsung masyarakat, termasuk rumah tangga miskin. Jika gotong royong tidak hanya difungsikan sebagai aktivitas sosial, tetapi juga diarahkan pada kegiatan ekonomi kolektif seperti usaha bersama, pengelolaan sumber daya desa, atau kegiatan produktif berbasis komunitas maka modal sosial tersebut dapat ditransformasikan menjadi modal ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga penurunan kemiskinan dapat tercapai.

4.3.1.4 Pengaruh Partisipasi Menjaga Lingkungan terhadap Kemiskinan di Perdesaan

Partisipasi dalam menjaga lingkungan berpengaruh signifikan pada kemiskinan. Partipasi menjaga lingkungan dikonstruksi dari variabel jumlah anggota keluarga dan tempat pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi dalam menjaga lingkungan merupakan bentuk kepedulian sosial yang penting bagi keberlanjutan ekosistem desa, namun kegiatan tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Pada konteks perdesaan, partisipasi dalam pengelolaan sampah seringkali bersifat sukarela atau semi-sukarela, membutuhkan waktu dan tenaga kerja rumah tangga tanpa kompensasi ekonomi yang langsung, sehingga manfaat ekonominya belum segera dirasakan oleh masyarakat miskin.

Kegiatan pengelolaan sampah dan keterlibatan anggota keluarga di masing-masing desa di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang dan Kudus relatif bervariasi. Beberapa desa di Kabupaten Brebes, seperti Desa Pulosari kegiatan pengelolaan lingkungan masih terbatas dan belum melibatkan masyarakat secara luas. Desa ini belum memiliki program bank sampah, sehingga pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak tertentu saja. Partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan lingkungan juga belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena imbalan yang diterima hanya berupa penghargaan non-materi seperti ucapan terima kasih. Pemerintah desa telah menyediakan alat angkut sampah, namun belum mengembangkan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan

program terstruktur, partisipasi masyarakat sulit memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Berbeda dengan Desa Pulosari, di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba dan Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang, partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tergolong cukup baik. Program bank sampah telah berjalan dengan melibatkan masyarakat melalui koordinasi RT dan RW. Program ini memberikan insentif ekonomi berupa uang bagi keluarga miskin yang berpartisipasi, meskipun jumlahnya masih terbatas. Selain meningkatkan kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat. Keberadaan program semacam ini memperlihatkan bagaimana pengelolaan lingkungan terstruktur dapat mendorong partisipasi kolektif sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

Di Desa Slati Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes , pengelolaan lingkungan masih bersifat individual. Masyarakat mengelola sampah secara mandiri dengan menjual sampah plastik untuk ditukar dengan kebutuhan pokok seperti beras atau minyak goreng. Meskipun kegiatan ini memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat miskin, belum terdapat edukasi atau program pemberdayaan lingkungan yang dilakukan secara aktif oleh pemerintah desa. Sementara itu, di Desa Sitanggal Kecamatan Larangan dan Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembayaran iuran sampah secara rutin. Meski demikian, kondisi lingkungan masih menunjukkan adanya tumpukan sampah di beberapa titik jalan desa. Edukasi pengelolaan sampah lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata

(KKN), sedangkan peran aktif pemerintah desa dalam pemberdayaan lingkungan masih terbatas.

Di Kabupaten Tegal, beberapa desa menunjukkan perkembangan partisipasi masyarakat yang lebih baik. Di Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang, pengelolaan lingkungan telah dilakukan secara terorganisir melalui sistem Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R). Program ini tidak hanya meningkatkan kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat ekonomi rendah yang terlibat sebagai tenaga pengelola sampah. Selain itu, adanya edukasi pemilahan sampah membuat masyarakat memahami nilai ekonomis dari sampah yang dapat dijual kembali.

Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, merupakan pusat pengelolaan sampah terpadu melalui keberadaan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) “Rempoah” yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan sampah ini melibatkan perangkat desa dan partisipasi aktif masyarakat dari beberapa desa, yaitu Desa Rempoah, Desa Pamijen, Desa Kemutugkidul, Desa Kebumen, dan Desa Purwosari. Masyarakat dari desa-desa tersebut berperan sebagai penghasil sampah rumah tangga sekaligus sebagai pihak yang menyerahkan sampahnya ke TPST untuk dikelola secara terpadu. Sampah, khususnya sampah organik, kemudian diolah menjadi produk bernilai guna seperti maggot yang diproduksi dengan kapasitas kurang lebih 60 kilogram per hari. Keterlibatan masyarakat menunjukkan adanya kerja sama dalam pengelolaan sampah, yang tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah ke tempat

pembuangan akhir, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi desa dan masyarakat sekitarnya.

Sejumlah desa di Kabupaten Pati mulai menerapkan pengelolaan sampah berbasis lokal, di antaranya Desa Karaban di Kecamatan Gabus dan Desa Trangkil di Kecamatan Trangkil. Kedua desa tersebut aktif mengelola sampah di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan dan mendapat dukungan dari berbagai unsur masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sawitri *et al.* (2022) yang melibatkan masyarakat umum sebagai responden di Desa Kalisalak, Desa Proyonanggan Selatan, Desa Klidang Lor, dan Desa Karangasem Utara di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, uji beda Mann–Whitney, dan analisis model menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menguji hubungan antarvariabel perilaku pengelolaan sampah. Hasil analisis model menunjukkan bahwa perilaku memilah sampah secara signifikan diprediksi oleh intensi individu dalam melakukan pemilahan sampah. Pada model perilaku *recycle*, kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) terbukti berperan dalam membentuk intensi individu untuk melakukan *recycle*, yang selanjutnya mendorong terwujudnya perilaku *recycle* tersebut. Selanjutnya, pada model perilaku 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam penggunaan plastik. Temuan penelitian ini yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan perilaku 3R dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hasil uji beda dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa desa yang telah menerapkan

pengelolaan sampah secara masif memiliki perilaku pengelolaan sampah yang lebih baik dibandingkan dengan desa yang belum menerapkan pengelolaan sampah secara optimal. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa partisipan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki perilaku pengelolaan sampah yang lebih baik dibandingkan dengan partisipan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Kondisi ini sejalan dengan temuan dalam literatur pengelolaan lingkungan dan pembangunan perdesaan yang menekankan adanya *trade-off* jangka pendek antara partisipasi lingkungan berbasis komunitas dan aktivitas ekonomi rumah tangga, khususnya di kelompok berpendapatan rendah (Chambers, 1994; Wilson *et al.*, 2012). Kegiatan lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, atau konservasi sumber daya alam dilakukan secara sukarela tanpa imbalan ekonomi, bahkan terkadang memerlukan pengeluaran pribadi (biaya tenaga, waktu, atau peralatan). Berdasarkan pandangan World Bank (2004) dan UNDP (2023) yang menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan memerlukan keseimbangan antara tujuan lingkungan dan pengurangan kemiskinan. Ketika kebijakan lingkungan tidak diiringi dengan strategi peningkatan pendapatan, masyarakat miskin dapat mengalami *trade-off* antara menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penelitian Tomimi (2024) mengungkapkan bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis bank sampah di tingkat komunitas, khususnya di Desa Batugadang Kota Padang, sangat bergantung pada kekuatan modal sosial yang meliputi unsur kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial antarwarga. Modal

sosial ini menjadi landasan utama yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Tingkat kepercayaan yang tinggi antara anggota dan pengelola, disertai dengan penerapan norma sukarela, menumbuhkan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi secara konsisten dalam kegiatan pengolahan serta daur ulang sampah. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan akses dan pemahaman, keberadaan bank sampah telah terbukti meningkatkan kesadaran lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi warga. Dengan demikian, modal sosial terbukti menjadi faktor kunci yang memperkuat keberlanjutan program pengelolaan sampah dan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Pamilutsih, Sadono, dan Wahyuni (2020) melakukan penelitian di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat peserta bank sampah berada pada kategori sedang hingga cenderung tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan bank sampah mampu memberikan insentif ekonomi yang cukup nyata bagi masyarakat, khususnya melalui program tunjangan hari raya yang secara rutin diselenggarakan oleh pengurus. Insentif tersebut berperan sebagai faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Namun demikian, keberlanjutan bank sampah dari aspek sosial masih berada pada kategori sedang, yang mengisyaratkan bahwa manfaat sosial yang dirasakan masyarakat belum optimal. Meskipun pembentukan bank sampah telah mendorong peningkatan interaksi sosial, seperti melalui kegiatan penyetoran sampah secara

berkala setiap dua minggu, intensitas dan kualitas manfaat sosial yang dihasilkan masih bersifat terbatas. Interaksi tersebut memang membuka ruang bagi masyarakat dari dusun yang berbeda untuk saling berkenalan dan memperluas jejaring sosial di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi penguatan kohesi sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa penguatan dimensi sosial perlu menjadi perhatian utama agar keberadaan bank sampah tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan solidaritas dan partisipasi sosial masyarakat secara lebih mendalam.

Pola pengelolaan sampah dengan masyarakat hingga saat ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Meskipun pada beberapa wilayah, pengelolaan sampah seperti melalui bank sampah, mampu memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi masyarakat, manfaat tersebut masih bersifat terbatas dan belum menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Bahkan, di sejumlah desa pada enam kabupaten yang menjadi wilayah kajian, pengelolaan sampah belum terbentuk sama sekali. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penerapan sistem pengelolaan sampah antarwilayah, baik dari sisi kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dukungan kebijakan. Ketidadaan pengelolaan sampah di beberapa desa menunjukkan bahwa sampah masih dipandang sebagai beban lingkungan semata, bukan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Akibatnya, potensi ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah, seperti pemilahan, daur ulang, dan pengolahan berbasis komunitas, belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Situasi

ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas masyarakat, pendampingan berkelanjutan, serta integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan menjadi prasyarat penting agar pengelolaan sampah tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengendalian lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4.3.2 Pengaruh Langsung Pemerintahan Desa Terhadap Kemiskinan di Perdesaan

Berdasarkan hasil penelitian di tabel 4.9 menunjukkan bahwa pengaruh pemerintahan desa signifikan pada kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar peran dan aktivitas pemerintahan desa, dalam kondisi tertentu justru diikuti oleh meningkatnya tingkat kemiskinan. Secara teoritis, desentralisasi dan penguatan pemerintahan desa memang diharapkan mampu menurunkan kemiskinan karena pemerintah desa memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal (World Bank, 2004). Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai dan tata kelola yang baik, kegiatan yang berbasis komunitas berpotensi berhenti pada level administratif sehingga tidak mampu menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat di perdesaan.

Todaro dan Smith (2020), kelemahan kelembagaan lokal terutama dalam hal perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran dapat menyebabkan kegagalan kebijakan publik dalam mengurangi kemiskinan. Pada konteks

pemerintahan desa, keterbatasan sumber daya manusia (aparatur desa), rendahnya transparansi, serta lemahnya akuntabilitas berpotensi membuat program pembangunan desa tidak tepat sasaran, sehingga tidak mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin secara efektif.

Program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat* (PNPM) sejak tahun 2007, menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama melalui pemanfaatan modal sosial dan penguatan pembangunan ekonomi lokal (Hadi, 2010).

4.3.3 Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kemiskinan di Perdesaan Melalui Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil estimasi efek moderasi pada model SEM PLS di tabel 4.10 ditemukan bahwa hanya variabel musyawarah yang memiliki pengaruh pada kemiskinan melalui pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas, Brebes, Tegal, Pati, Batang dan Kudus, sedangkan koperasi, partisipasi gotong royong dan partisipasi menjaga lingkungan tidak berpengaruh pada kemiskinan melalui pemerintahan desa. Chen, *et al.* (2024) juga menemukan bahwa kebijakan pemerintah tidak memediasi hubungan antara sumber daya lokal, mobilisasi aset, dan partisipasi masyarakat dengan kemiskinan. Alasan utama mengapa variabel kebijakan pemerintah tidak menunjukkan efek moderasi yang signifikan pada hubungan antara sumber daya lokal dan pengurangan kemiskinan perdesaan, serta antara mobilisasi aset dan pengurangan kemiskinan, dapat dijelaskan melalui

beberapa faktor. Pertama, efektivitas kebijakan pemerintah dalam konteks tersebut mungkin belum cukup kuat atau tidak diterapkan secara optimal, sehingga dampaknya terhadap hubungan tersebut menjadi tidak signifikan. Kedua, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, budaya lokal, dan tingkat implementasi kebijakan yang berbeda-beda dapat mempengaruhi hasil, sehingga mengurangi kemungkinan adanya efek moderasi yang kuat. Selain itu, keterbatasan dalam penegakan aturan dan pengawasan kebijakan dapat menghambat kebijakan dari memberikan pengaruh yang diharapkan, sehingga menyebabkan hipotesis mengenai moderasi oleh kebijakan pemerintah tidak didukung secara statistik.

4.3.3.1 Pengaruh Koperasi Terhadap Kemiskinan di Perdesaan melalui Pemerintahan Desa

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa koefisien interaksi antara koperasi dan pemerintahan desa tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, peran pemerintahan desa tidak terbukti memperkuat pengaruh koperasi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Meskipun secara teoritis dukungan pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koperasi, hasil empiris tidak menunjukkan adanya dukungan terhadap asumsi tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suharto (2020) yang menyatakan bahwa peran pemerintah desa dalam mendukung kelembagaan ekonomi masyarakat, termasuk koperasi, sering kali tidak optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya pendampingan teknis, serta kompleksitas birokrasi.

Kabupaten Banyumas, Brebes, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus memiliki karakteristik sosial ekonomi perdesaan dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian dan perdagangan kecil. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah (2023), sebagian besar koperasi di keenam kabupaten tersebut masih tergolong koperasi skala kecil dengan struktur manajemen sederhana, dan hanya sebagian kecil yang aktif melakukan kegiatan simpan pinjam produktif. Koperasi masih bergantung pada dana bergulir pemerintah dan belum mampu memperluas jaringan pasar atau akses pembiayaan. Kebijakan penguatan ekonomi lokal di wilayah ini umumnya masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, pasar, dan saluran irigasi, misalnya Kabupaten Brebes dan Pati, dana desa sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan fisik dibandingkan pemberdayaan ekonomi produktif. Temuan ini mengindikasikan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan koperasi di wilayah penelitian belum berjalan optimal.

Putnam (1993) dan Grootaert (2001) menjelaskan bahwa efektivitas modal sosial kelembagaan sangat bergantung pada kapasitas pemerintahan lokal dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini, kapasitas pemerintahan desa direpresentasikan melalui jumlah perangkat desa sebagai indikator kuantitatif. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek tersebut belum secara signifikan memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan koperasi dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Hasil ini konsisten dengan pandangan Narayan dan Pritchett (1999) yang menekankan bahwa tanpa dukungan kelembagaan yang memadai dan partisipasi

masyarakat yang terarah pada kegiatan produktif, modal sosial kelembagaan seperti koperasi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin di perdesaan.

4.3.3.2 Pengaruh Musyawarah Terhadap Kemiskinan di Perdesaan melalui Pemerintahan Desa

Berdasarkan tabel 4.10, nilai koefisien interaksi musyawarah dan pemerintahan desa memiliki koefisien negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa berperan dalam memperkuat pengaruh musyawarah terhadap penurunan kemiskinan di perdesaan. Hal ini berarti semakin efektif pemerintahan desa dalam memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil musyawarah, semakin besar peluang proses musyawarah desa berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus, forum musyawarah desa sudah mulai berfungsi sebagai wadah partisipasi yang memberi ruang bagi masyarakat dalam proses pembangunan, meskipun kualitas partisipasinya masih beragam. Beberapa desa di Kabupaten Batang dan Kudus mulai melibatkan kelompok perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan kegiatan ekonomi produktif seperti pelatihan usaha mikro dan pengembangan BUMDes. Kegiatan seperti ini dapat mendorong ekonomi masyarakat yang ada di desa. Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam memperkuat fungsi musyawarah sebagai ruang deliberatif untuk mengurangi kemiskinan. Ketika pemerintah desa mampu menindaklanjuti hasil musyawarah dengan kebijakan yang

berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, maka pengaruh musyawarah terhadap penurunan kemiskinan dapat semakin nyata. Hal ini konsisten dengan pandangan Osei dan Zhuang (2020) dan World Bank (2004) yang menekankan pentingnya dukungan kelembagaan pemerintah lokal dalam menjembatani partisipasi masyarakat menuju hasil pembangunan yang inklusif.

Alatas *et al.* (2012) menyatakan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun musyawarah desa dapat meningkatkan legitimasi sosial dalam penentuan penerima bantuan, proses tersebut tetap rentan terhadap *elite capture* dan *favoritisme*, terutama dalam konteks masyarakat dengan jaringan kekerabatan yang kuat. Individu yang memiliki kedekatan keluarga atau hubungan sosial dengan tokoh masyarakat cenderung memiliki peluang lebih besar untuk direkomendasikan sebagai penerima bantuan. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Platteau (2002) yang menyatakan bahwa solidaritas sosial di masyarakat tradisional sering kali berjalan seiring dengan praktik *informal exclusion*, di mana distribusi bantuan lebih dipengaruhi oleh hubungan sosial daripada kebutuhan ekonomi murni.

4.3.3.3 Pengaruh Partisipasi Gotong Royong Terhadap Kemiskinan di Perdesaan melalui Pemerintahan Desa

Berdasarkan tabel 4.10, hubungan antara gotong royong dan tingkat kemiskinan yang dimoderasi oleh pemerintahan desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, peran pemerintahan desa belum mampu memperkuat hubungan antara aktivitas gotong royong dan penurunan kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan

Osei dan Zhuang (2020) serta Narayan dan Pritchett (1999) yang menyatakan bahwa aktivitas sosial seperti gotong royong dan pelestarian lingkungan berperan penting dalam membangun kohesi sosial, namun tidak secara langsung berdampak pada penurunan kemiskinan apabila tidak terintegrasi dengan kegiatan ekonomi yang produktif.

Di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus, gotong royong masih lebih banyak berfokus pada kegiatan fisik seperti kerja bakti memperbaiki jalan, membersihkan saluran air, memperindah lingkungan, atau pembangunan fasilitas umum desa. Kegiatan tersebut memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antarwarga, namun dampak ekonominya belum terasa langsung, terutama bagi rumah tangga miskin yang membutuhkan peningkatan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Pemerintah desa berperan penting sebagai fasilitator dalam mengarahkan kegiatan sosial agar memiliki nilai tambah ekonomi, misalnya melalui pembentukan kelompok usaha bersama, program padat karya produktif, atau kegiatan pengelolaan lingkungan yang menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan pandangan Grootaert (2001) bahwa modal sosial dalam bentuk partisipasi sosial baru akan berdampak pada kesejahteraan apabila didukung oleh kebijakan kelembagaan yang mampu mengubah kegiatan sosial menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

4.3.3.4 Pengaruh Partisipasi Menjaga Lingkungan Terhadap Kemiskinan di Perdesaan melalui Pemerintahan Desa

Berdasarkan tabel 4.10, partisipasi menjaga lingkungan terhadap kemiskinan melalui pemerintahan desa tidak signifikan. Berdasarkan data yang tersedia di Podes, partisipasi masyarakat di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pati, Tegal, Batang dan Kudus menunjukkan kondisi yang konsisten yaitu tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan telah banyak diakui sangat penting, namun penerapannya di wilayah perdesaan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama terletak pada perbedaan tingkat keterlibatan dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Pretty (1995b) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tidak selalu identik dengan pemberdayaan. Ia membedakan berbagai tipologi partisipasi, mulai dari partisipasi semu hingga partisipasi interaktif/aktif dan *self-mobilization*. Dalam banyak praktik pembangunan perdesaan, partisipasi berhenti pada level konsultatif atau partisipasi fungsional, di mana masyarakat dilibatkan untuk mendukung efisiensi program, namun tidak memiliki kendali substantif atas proses pengambilan keputusan maupun distribusi manfaat.

Xu dan Miao (2022) menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan, kemiskinan, dan peran pemerintah memiliki keterkaitan erat, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah di wilayah perdesaan. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat serta penguatan

modal sosial, yang pada gilirannya bergantung pada ketersediaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Keterbatasan sumber daya dan kemampuan ekonomi masyarakat perdesaan diakui sebagai faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang efektif. Partisipasi warga dalam kegiatan pengelolaan sampah juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti rasa saling percaya dan solidaritas antaranggota komunitas. Kedua aspek ini dapat diperkuat melalui keberadaan ruang publik yang memungkinkan interaksi sosial dan pembangunan modal sosial. Selain itu, dukungan pemerintah memegang peranan penting dalam menyediakan fasilitas publik dan menginisiasi program-program yang mendorong keterlibatan masyarakat. Peran aktif pemerintah desa maupun kabupaten dalam memberikan dukungan kelembagaan sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung solidaritas komunitas dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, peningkatan penguatan modal sosial berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, yang secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui pembangunan komunitas yang mandiri.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat kritik terhadap pendekatan fungsionalis dalam modal sosial yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Putnam, yang menekankan bahwa kepercayaan, partisipasi, dan kerja kolektif akan menghasilkan kinerja pemerintahan yang lebih baik. Perdesaan di Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus, modal sosial seperti koperasi, gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan memang hadir secara empiris, tetapi keberadaannya tidak cukup untuk menghasilkan dampak ekonomi yang terukur

terhadap kemiskinan, bahkan ketika difasilitasi oleh pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial tidak selalu bersifat produktif secara ekonomi, melainkan dapat berhenti pada fungsi sosial dan kultural semata. Studi berbasis *asset-based community development* menunjukkan bahwa modal sosial baru berdampak signifikan terhadap kesejahteraan ketika dimediasi oleh pemerintah desa yang mampu memfasilitasi mobilisasi aset, memperluas jaringan aktor, dan mengarahkan partisipasi masyarakat ke tujuan ekonomi produktif (Chen *et al.*, 2024).

Signifikannya jalur moderasi antara pemerintahan desa dan musyawarah di perdesaan Kabupaten Brebes, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa peran mediasi pemerintah paling efektif ketika berperan pada kondisi yang memiliki efek langsung pada pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Musyawarah desa menjadi instrumen yang berdampak karena ia menstrukturkan relasi kuasa, meningkatkan akuntabilitas, dan menentukan arah penggunaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa modal sosial hanya menghasilkan dampak distributif ketika dilekatkan pada mekanisme tata kelola yang memiliki kewenangan alokatif (Putnam, 1993; Bourdieu, 1986). Secara teoretis, rekomendasi ini menegaskan bahwa pemerintah desa harus berperan sesuai kapasitas untuk menghubungkan modal sosial dengan mekanisme ekonomi dan kebijakan distributif. Penguatan peran pemerintah desa tidak cukup dilakukan melalui penambahan perangkat atau peningkatan anggaran, tetapi memerlukan peningkatan kapasitas mediasi yang mencakup kemampuan mengarahkan aset komunitas, dan memastikan bahwa partisipasi sosial berujung

pada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, peran pemerintah desa sebagai mediator dapat berjalan semestinya dan berkontribusi secara nyata terhadap penurunan kemiskinan.

Chen *et al.* (2024) menyebutkan kebijakan pemerintah tidak terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara sumber daya lokal dan pengentasan kemiskinan perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan intensitas atau kualitas kebijakan pemerintah tidak secara otomatis memperkuat keterkaitan antara pemanfaatan sumber daya lokal dan upaya penurunan kemiskinan. Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat berbagai kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan perdesaan dalam praktiknya sering menghadapi kendala struktural, seperti birokrasi yang berbelit, keterbatasan pendanaan, serta persoalan tata kelola yang kurang akuntabel. Selain itu, tidak jarang kebijakan-kebijakan tersebut terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, sehingga implementasinya cenderung selektif dan tidak sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara luas. Kebijakan pemerintah tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara partisipasi masyarakat dan pengentasan kemiskinan perdesaan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kebijakan pemerintah tidak secara otomatis memperkuat keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan upaya pengurangan kemiskinan. Pada praktiknya, lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan program pengentasan kemiskinan di perdesaan sering kali tidak memberikan ruang yang memadai bagi para penerima manfaat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait arah dan strategi pembangunan komunitas mereka.

4.4 Logika Empiris Modal Sosial, Kemiskinan Desa, dan Peran Moderasi Pemerintahan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan modal sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, modal sosial direpresentasikan melalui empat dimensi utama, yaitu koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan. Keempat dimensi tersebut terbukti memiliki hubungan signifikan dengan kemiskinan desa. Namun, arah pengaruh yang berbeda menunjukkan bahwa masing-masing dimensi modal sosial bekerja melalui mekanisme empiris yang tidak sama, sehingga interpretasinya perlu disesuaikan dengan konteks sosial, karakteristik indikator, dan arah koefisien yang dihasilkan dalam model.

Koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi lokal terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa koperasi berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap permodalan, memperkuat kegiatan ekonomi produktif, serta meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah penguatan jaringan sosial, solidaritas antaranggota, dan pengembangan aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Dengan demikian, koperasi dapat dipahami sebagai dimensi ekonomi kolektif dari modal sosial desa yang berpotensi mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat.

Musyawarah desa juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses pengambilan keputusan yang partisipatif mampu meningkatkan efektivitas pembangunan desa karena program yang dirumuskan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musyawarah menjadi mekanisme penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, menentukan prioritas pembangunan. Dengan demikian, musyawarah dapat dipahami sebagai dimensi deliberatif dari modal sosial yang berperan dalam mendorong perencanaan pembangunan desa yang lebih responsif terhadap persoalan kemiskinan.

Partisipasi gotong royong menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini perlu ditafsirkan secara hati-hati agar tidak dimaknai secara sederhana bahwa gotong royong menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Hubungan positif tersebut dapat menunjukkan bahwa praktik gotong royong cenderung lebih kuat muncul pada desa-desa yang menghadapi keterbatasan sumber daya, tekanan sosial-ekonomi, atau kebutuhan pembangunan yang lebih besar. Dalam kondisi tersebut, masyarakat desa cenderung mengandalkan kerja sama kolektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Dengan demikian, gotong royong dapat dipahami sebagai mekanisme sosial adaptif yang muncul sebagai respons masyarakat terhadap kerentanan desa.

Partisipasi menjaga lingkungan juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini dapat dimaknai bahwa partisipasi lingkungan sering kali lebih menonjol pada wilayah yang menghadapi persoalan ekologis, keterbatasan infrastruktur dasar, atau kerentanan sumber penghidupan.

Oleh karena itu, partisipasi menjaga lingkungan tidak hanya menunjukkan kondisi sosial yang ideal, tetapi juga dapat mencerminkan respons masyarakat terhadap tekanan lingkungan dan sosial-ekonomi yang dihadapi desa. Dalam konteks ini, dimensi lingkungan dalam modal sosial perlu dipahami sebagai bagian dari strategi ketahanan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya lokal, mengurangi risiko lingkungan, dan memperkuat kualitas hidup masyarakat desa.

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa pemerintahan desa hanya terbukti memoderasi hubungan antara musyawarah dan kemiskinan, sedangkan pada hubungan koperasi, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan terhadap kemiskinan tidak ditemukan pengaruh moderasi yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peran pemerintahan desa lebih dominan sebagai fasilitator proses deliberatif masyarakat melalui musyawarah dibandingkan sebagai penguat seluruh dimensi modal sosial. Pemerintahan desa berperan dalam menyediakan ruang partisipasi, memfasilitasi proses perencanaan pembangunan, dan menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan desa. Dengan kata lain, efektivitas musyawarah dalam mendukung pengurangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pemerintahan desa. Namun, karena pengaruh moderasi tersebut signifikan pada taraf 10%, interpretasinya perlu dilakukan secara hati-hati.

Temuan moderasi tersebut memberikan pemahaman bahwa pemerintahan desa tidak dapat diposisikan sebagai penguat universal bagi seluruh dimensi modal sosial. Koperasi lebih banyak ditentukan oleh kapasitas kelembagaan ekonomi dan partisipasi anggota. Gotong royong lebih banyak dipengaruhi oleh norma sosial,

budaya kolektif, dan solidaritas masyarakat. Sementara itu, partisipasi menjaga lingkungan sangat terkait dengan kesadaran ekologis, kondisi lingkungan lokal, dan kebutuhan masyarakat dalam menjaga sumber daya desa. Oleh karena itu, pemerintah desa lebih efektif ketika berperan sebagai fasilitator musyawarah dan perencana pembangunan partisipatif, bukan sebagai satu-satunya penggerak seluruh aktivitas sosial masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dikembangkan. Pertama, pemerintah desa perlu memperkuat kualitas musyawarah desa melalui peningkatan partisipasi kelompok miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya sehingga proses perencanaan pembangunan menjadi lebih inklusif. Musyawarah desa tidak cukup hanya dipahami sebagai prosedur formal, tetapi perlu diarahkan sebagai forum deliberatif yang mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan menyusun prioritas pembangunan berbasis masalah nyata di desa.

Kedua, koperasi perlu diperkuat melalui dukungan regulasi, peningkatan kapasitas manajemen, perluasan akses permodalan, pendampingan usaha, dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Penguatan koperasi menjadi penting karena koperasi dapat berperan sebagai lembaga ekonomi kolektif yang membantu masyarakat mengakses sumber pembiayaan, memperkuat usaha produktif, dan mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan informal yang berisiko tinggi bagi kelompok miskin.

Ketiga, program pengentasan kemiskinan perlu diintegrasikan dengan kegiatan gotong royong masyarakat. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui

pembangunan infrastruktur lingkungan, perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi berbasis masyarakat, ketahanan pangan desa, dan kegiatan padat karya. Dengan cara ini, gotong royong tidak hanya dipertahankan sebagai nilai budaya, tetapi juga diarahkan menjadi instrumen pembangunan sosial yang mampu memperkuat kapasitas kolektif masyarakat dalam menghadapi keterbatasan sumber daya.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan perlu diperkuat melalui pengembangan program desa bersih, bank sampah, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, konservasi lingkungan, serta kegiatan padat karya lingkungan. Kebijakan ini penting karena kemiskinan desa sering kali berkaitan dengan kerentanan ekologis dan keterbatasan akses terhadap lingkungan yang sehat. Dengan demikian, penguatan partisipasi lingkungan dapat diarahkan tidak hanya pada aspek kebersihan, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial-ekologis masyarakat desa.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep modal sosial dalam konteks penurunan kemiskinan pedesaan di Indonesia. Literatur modal sosial yang berkembang selama ini banyak merujuk pada pemikiran Bourdieu (1986), Coleman (1988), Putnam (1993; 2000) yang menekankan unsur jaringan sosial, norma, kepercayaan, relasi sosial, serta kapasitas kolektif sebagai sumber daya yang dapat memengaruhi tindakan sosial dan pembangunan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, modal sosial dipahami sebagai aset sosial yang memungkinkan individu atau kelompok memperoleh manfaat melalui hubungan sosial, kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan kerja sama.

Meskipun pemikiran Bourdieu, Coleman, dan Putnam telah menjadi dasar penting dalam menjelaskan modal sosial, sebagian besar konseptualisasinya berkembang dari konteks masyarakat Barat. Penelitian ini memperluas konsep tersebut dengan memasukkan dimensi yang khas dalam konteks sosial budaya Indonesia, yaitu gotong royong dan musyawarah. Gotong royong merepresentasikan kemampuan masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif secara sukarela demi kepentingan bersama, sedangkan musyawarah mencerminkan kapasitas masyarakat dalam membangun kesepakatan dan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas konseptualisasi modal sosial dari konsep yang bersifat umum menuju model yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan di Provinsi Jawa Tengah. Modal sosial dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai konstruk multidimensi yang terdiri atas dimensi ekonomi kolektif melalui koperasi, dimensi deliberatif melalui musyawarah, dimensi aksi kolektif melalui gotong royong, dan dimensi tanggung jawab sosial-ekologis melalui partisipasi menjaga lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pengembangan “Model Modal Sosial Desa Indonesia”, yaitu model konseptual yang menempatkan gotong royong dan musyawarah sebagai dimensi khas dalam menjelaskan dinamika pembangunan dan pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Secara metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi melalui pemanfaatan data PODES tahun 2018 dan 2020 dalam analisis SEM-PLS. Penggunaan data sekunder berbasis wilayah menunjukkan bahwa konstruk sosial

dan kelembagaan desa dapat dianalisis secara empiris pada level desa/kelurahan. Pendekatan ini memperluas penggunaan SEM-PLS yang tidak hanya dapat diterapkan pada data survei individu atau rumah tangga, tetapi juga pada data agregat wilayah sepanjang indikator yang digunakan memiliki dasar teoritis dan kesesuaian dengan karakteristik konstruk yang dianalisis.

Secara empiris, penelitian ini memberikan bukti bahwa modal sosial dan pemerintahan desa memiliki keterkaitan dengan kemiskinan antarwilayah desa. Temuan bahwa pemerintahan desa hanya memoderasi hubungan musyawarah terhadap kemiskinan memperkaya literatur mengenai hubungan antara modal sosial, pemerintahan desa, dan pembangunan pedesaan di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan desa tidak cukup hanya bertumpu pada intervensi ekonomi, tetapi juga membutuhkan penguatan kelembagaan sosial, praktik deliberatif, aksi kolektif, dan pemerintahan desa yang partisipatif.

BAB V

SIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis pengaruh langsung dan tidak langsung modal sosial terhadap kemiskinan perdesaan di Kabupaten Banyumas, Brebes, Tegal, Pati, Batang, dan Kudus, serta pengaruh pemerintahan desa terhadap kemiskinan, hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan beberapa temuan utama yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi modal sosial memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kemiskinan perdesaan, yang tercermin dari masing-masing indikator variabel. Dimensi koperasi, yang diukur melalui jumlah KUD aktif (KOP1) dan jumlah koperasi simpan pinjam aktif (KOP2), menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya jumlah KUD aktif dan koperasi simpan pinjam aktif berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan. Dimensi musyawarah, yang diukur melalui keaktifan dalam kegiatan musyawarah (MUS1) dan jumlah kegiatan musyawarah (MUS2), juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, meskipun dengan tingkat pengaruh yang relatif lebih kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa berkaitan dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebaliknya, dimensi partisipasi gotong royong, yang diukur melalui keaktifan gotong royong (GR1) dan keberadaan ruang publik (GR2), menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap

kemiskinan, namun tidak berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas sosial tersebut belum secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Demikian pula, dimensi partisipasi menjaga lingkungan, yang diukur melalui jumlah rata-rata anggota keluarga (PL1) dan keberadaan pengelolaan sampah (PL2), menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, namun belum berkaitan dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintahan desa, yang dalam penelitian ini direpresentasikan melalui jumlah perangkat pemerintahan desa (PD), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan perdesaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah perangkat desa belum secara langsung berkaitan dengan penurunan kemiskinan, sehingga peran pemerintahan desa dalam konteks ini masih terbatas dalam mendukung pengentasan kemiskinan.
3. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa peran pemerintahan desa dalam memperkuat hubungan antara modal sosial dan kemiskinan tidak terjadi secara konsisten pada seluruh dimensi. Interaksi antara pemerintahan desa (PD) dan dimensi koperasi (KOP1, KOP2), partisipasi gotong royong (GR1, GR2), serta partisipasi menjaga lingkungan (PL1, PL2), tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah perangkat desa belum mampu memperkuat hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kondisi kemiskinan. Sementara itu, interaksi antara pemerintahan desa (PD) dan dimensi musyawarah (MUS1, MUS2)

menunjukkan pengaruh yang signifikan, meskipun dengan tingkat signifikansi yang relatif terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran pemerintahan desa lebih terlihat dalam mendukung proses partisipatif melalui musyawarah desa dibandingkan pada dimensi modal sosial lainnya.

5.2 Saran

1. Pemerintah desa perlu memperkuat modal sosial masyarakat melalui program yang lebih konkret dan terarah. Dalam aspek musyawarah, pemerintah desa perlu membangun forum musyawarah desa yang lebih inklusif dengan melibatkan kelompok miskin, perempuan, petani kecil, pelaku usaha mikro, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Forum ini tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi perlu diarahkan untuk memetakan kebutuhan warga miskin, menentukan prioritas program penurunan kemiskinan, serta memastikan alokasi anggaran desa lebih tepat sasaran. Selain itu, partisipasi gotong royong dan menjaga lingkungan dapat diarahkan pada kegiatan padat karya desa, perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan, bank sampah, serta perbaikan fasilitas umum yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin.
2. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas program pengurangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. Langkah nyatanya dapat dilakukan dengan memperbarui data keluarga miskin secara berkala, melakukan verifikasi data melalui musyawarah dusun, dan menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah desa juga perlu mengalokasikan APBDes untuk

program pemberdayaan ekonomi, bantuan modal produktif, pelatihan keterampilan, serta kegiatan padat karya desa. Agar pelaksanaannya lebih terukur, pemerintah desa dapat membentuk tim khusus pengentasan kemiskinan desa yang bertugas merancang program, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil program secara terbuka kepada masyarakat.

3. Pemerintah desa perlu berperan aktif dalam memfasilitasi kekuatan sosial masyarakat dengan kebijakan pengurangan kemiskinan. Pemerintah desa dapat memperkuat koperasi desa dan BUMDes melalui dukungan regulasi desa, bantuan legalitas kelembagaan, pelatihan pengelolaan koperasi, pendampingan usaha, akses permodalan, serta kerja sama pemasaran produk lokal. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pemerintah desa juga perlu menjadikan hasil musyawarah inklusif sebagai dasar penyusunan APBDes, sehingga modal sosial yang ada di masyarakat dapat dimediasi melalui kebijakan desa yang lebih nyata dan berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder Potensi Desa (PODES) tahun 2018 dan 2020. Data PODES bersifat agregat karena disusun pada level desa/kelurahan, bukan pada level individu atau rumah tangga. Artinya, data ini menggambarkan kondisi umum suatu wilayah, seperti keberadaan koperasi,

kegiatan musyawarah, partisipasi gotong royong, partisipasi menjaga lingkungan, pemerintahan desa, dan kondisi kemiskinan di desa. Karena data yang digunakan bersifat agregat, hasil penelitian ini hanya dapat menjelaskan hubungan antarvariabel pada tingkat desa/kelurahan. Hasil penelitian tidak dapat langsung digunakan untuk menjelaskan perilaku, pengalaman, atau kondisi setiap individu dan rumah tangga miskin di dalam desa. Dengan kata lain, jika suatu desa memiliki koperasi atau kegiatan gotong royong, hal tersebut belum tentu berarti seluruh masyarakat miskin di desa tersebut memperoleh manfaat yang sama. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu ditafsirkan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan dari data wilayah ke data individu.

2. Data PODES lebih banyak menggambarkan keberadaan fasilitas, kelembagaan, dan aktivitas di desa, tetapi belum menjelaskan kualitas dan efektivitasnya secara mendalam. Misalnya, data PODES dapat menunjukkan ada atau tidaknya koperasi, musyawarah desa, kegiatan gotong royong, atau partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tetapi data PODES tidak menyediakan informasi kualitas dari koperasi tersebut.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melengkapi temuan kuantitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui etnografi desa, studi kasus, observasi lapangan, atau wawancara mendalam dengan perangkat desa, pengurus koperasi, tokoh masyarakat, kelompok miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana

koperasi, musyawarah, gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan benar-benar berjalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Penelitian kualitatif juga dapat membantu menjelaskan hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh data PODES. Misalnya, bagaimana proses pengambilan keputusan dalam musyawarah desa berlangsung, siapa saja yang benar-benar terlibat, apakah kelompok miskin memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, bagaimana koperasi membantu masyarakat miskin, serta bagaimana gotong royong dan kegiatan lingkungan berperan dalam menghadapi persoalan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Hakim, R. *et al.* (2010). Does Social Capital Reduce Poverty? A Case Study of Rural Households in Terengganu, Malaysia. *European journal of social sciences*, 14(4), 556-566.
- Ahmad, A. (2016). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Alatas, V., *et al.* (2012). Targeting the poor: Evidence from a field experiment in Indonesia. *American Economic Review*, 102(4), 1206–1240.
- Ali, I., & Pernia, E. M. (2003). Infrastructure and Poverty Reduction — What is the Connection? *Asian Development Bank .ERD Policy Brief No. 13*, 13.
- Aker, C. J. (2007). Social Networks and Household Welfare in Tanzania: Working Together to Get Out of Poverty. University of California-Berkeley.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and Multidimensional Poverty Measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487.
- Alesina, A., & Ferrara, E. L. (1999). Participation in heterogeneous communities: *National bureau of economic research*.
- Alvarez, R. M., & Glasgow, G. (1999). Two-stage estimation of non-recursive choice models. *Political Analysis*, 8(2), 147-165.
<http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.pan.a029810>
- Amemiya, T. (1978). The estimation of a simultaneous equation generalized probit model. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 1193-1205.
<http://dx.doi.org/10.2307/1911443>
- Andriani, D. N., Wibawa, R. P., & Wihartanti, L. V. (2019). Selection of Poverty Reduction Program through Community-Based Economic Empowerment in Madiun City. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 4(1), 7-13.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative governance in theory and practice*. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia.

https://www.researchgate.net/publication/296627892_Village_Governance_Community_Life_and_the_2014_Village_Law_in_Indonesia, 1-23.

Arisukwu, O., *et al.* (2020). Community Participation in Crime Prevention and Control in Rural Nigeria. *Heliyon*, vol 6, Issue 9, E05015.

Arkorful, V. E., Lugu, B. K., Hammond, A., & Basiru, I. (2021). Decentralization and citizens' participation in local governance: Does trust and transparency matter? – An empirical study. *Forum for Development Studies*, 48(2), 199–223. <https://doi.org/10.1080/08039410.2021.1872698>.

Arestis, P. and Phelps, P. (2025) Financial cooperatives and poverty mitigation during Brazil's lost decade. *World Development*, 191. 106995. ISSN: 0305-750X.

Arsyad, L. (2005). Institution Do Really Matter. Important Lesson from Village Credit Insititutions of Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2 pp 105 – 119.

Asenbaum, *et al.* (2024). Can deliberative democracy be decolonized? A debate. *Working paper series of the Centre for Deliberative Democracy and Global Governance*.

Asian Development Bank. (2007). *Rural Poverty Reduction and Inclusive Growth*. September.

Azwar, S. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi edisi 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Axinn, G. *et al.* (1976). *Toward a Strategy of International Interaction in Non-formal Education*, Michigan State University, East Lansing.

Bactiar, P. (2019). Studi Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Laporan Endline*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Bappeda.jatengprov.go.id. (2020). 14 Daerah Termiskin Jadi Prioritas Musrenbang Jawa Tengah bappeda.jatengprov.go.id/14-daerah-termiskin-jadi-prioritas-musrenbang-jawa-tengah/. Diunduh 20 Maret 2021.

Badan Pusat Statistik. (2020). www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html. Diunduh pada tanggal 30 april 2021.

Balisacan, A., Edillon, R., & Piza, S. F. (2005). Rural Poverty in Southeast Asia: Issues, Policies, and Challenges. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 2(1–2), 25–38.

- Baltagi, H. B. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*, Ed.3, John Wiley & Sons, Ltd, England.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2006). The economic lives of the poor. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 141–167
- Bastiaensen, J., De Herdt, T., & Vaessen, J. (2002). *Poverty, Institutions and Interventions A framework for an institutional analysis of poverty and local anti-poverty interventions*. January 2002, 1–48.
- Bastiaensen, J., & D'Exelle, B. (2000). To Pay or Not to Pay? Local Institutional Differences and The Viability of Rural Credit in Nicaragua. *Journal of Microfinance*, 4(2), 31–56.
- Bastiaensen, J., De Herdt, T., & D'Exelle, B. (2005). Poverty reduction as a local institutional process. *World Development*, 33(6), 979–993.
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). Decentralization and accountability in infrastructure delivery in developing countries. *The Economic Journal*, 116(508), 101–127.
- Beard, V. (2007). Household contributions to community development in Indonesia. *World Development*, 35(4).
- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2004). Village politics, culture and community-driven development: Insights from Indonesia. *Progress in Development Studies*, 4(3), 187–205.
- Behnke, N. L., Klug, T., Cronk, R., Shields, K. F., Lee, K., Kelly, E. R., Allgood, G., & Bartram, J. (2017). Resource mobilization for community-managed rural water systems: Evidence from Ghana, Kenya, and Zambia. *Journal of Cleaner Production*, 156, 437–444. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.016>
- Birchall, J. (2013). *Resilient enterprises: Cooperatives in the face of crisis*. International Labour Office.
- Blank, M. R. (2005). Poverty, Policy and Place: How Poverty and Policies to Alleviate Poverty Are Shaped by Local Characteristics. *International Regional Science Review*, 28, 4: 441–464.

- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital. Handbook of theory and research for the sociology of education*, (pp. 241–258). New York: Greenwood Publications Group.
- Booth, A. (1993). Counting the Poor in Indonesia. *Buletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 29 No.1.
- Bowen, J. (1986). On the political construction of tradition: gotong royong in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 45(3).
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Cahyadi, A., Sriati, S., & Al Fatih, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga. *Demography Journal Of Sriwijaya (Dejos)*, 2(2), 20-24.
- Cahyono, H. and Aziz, N.L.L. (2020). *Pengelolaan dana desa: Studi dari sisi demokrasi dan kapasitas pemerintahan desa*. Jakarta: LIPI Press.
- Chambers, R. (1987). Sustainable Livelihoods, Environment and Development: Putting Poor Rural People First. 30.
- Chambers, R. (1994). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience*. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- Chaundri, E. *et al.* (2019). Decentralisation and Poverty Reduction: The Role of Local Economies and Institutional Capacity in Indonesia. *Working Paper*, TN2PK and Australian Government.
- Chaundry, S. *et al.* (2006). Rural Poverty in Pakistan Some Related Concepts, Issues and Empirical Analysis. *Pakistan Economic and Social Review*. Volume 44, No. 2, pp. 259-276.
- Chen, S. & Ravallion, M. (2008). The Developing World is Poorer Than We Thought, but NoLess Successful in the Fight Against Poverty. *World Bank Policy Research Working Paper*, 4703. World Bank.
- Chen, H., Xu, Y., Tackie, E. A., & Ahakwa, I. (2024). *Assessing the Impact of Asset-Based Community Development Approach on Rural Poverty Alleviation in Ghana: The Moderating Role of Government Policies*. *SAGE Open*, 14(1).

- Chin, W. W., & Wynne, W. J. (1999). *An introduction to Partial Least Squares Analysis*. In Modern Methods for Business Research. Lawrence Erlbaum Associates.
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling*. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern Methods for Business Research (pp. 295–336). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Chong, A., & Calderon, C. (2000). Causality and feedback between institutional measures and economic growth. *Economics & Politics*, 12(1), 69–81.
- Crandal, S. M., & Weber, A. B. (2004). Local Social and Economic Conditions, Spatial Concentrations of Poverty, and Poverty Dynamics. *American Journal of Agricultural Economics*, Dec., 2004, Vol. 86, No. 5, pp. 1276–128.
- Coleman, S. J. (1988). Social capital in the creation of human capital. *The American Journal of Sociology*, 94, S9.
- Dasgupta, P., & Serageldin, I. (1999). *Social capital: a multifaceted perspective*. World Bank Group.
- Dao, M. Q. (2004). Rural poverty in developing countries: An empirical analysis. *Journal of Economic Studies*, 31(6), 500–508.
- Deolalikar, A. B., *et al.* (2002). Poverty reduction and the role of institutions in developing Asia. *ERD Working Paper Series*, 10, 1–67.
- Dewi, A. S., Fitriani, E., & Amelia, L. (2022). Modal Sosial Tradisi Rewang pada Masyarakat Jawa Desa Beringin Talang Muandau Riau. In A. S. Dewi, E. Fitriani, & L. Amelia, *Culture & Society Journal of Anthropological Research* (Vol. 4, Issue 1, p. 19)
- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Batang. (2021). *Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Batang Tahun 2021*. Batang: Pemerintah Kabupaten Batang.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Profil Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*. Semarang: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

- Durlauf, S. and Fafchamps, M. (2005) Social Capital. In: Aghion, P. and Durlauf, S., Eds., *Hand-Book of Economic Growth*, Vol. 1, Ch. 26, Elsevier, Amsterdam, 1639-1699.
- Dutta. Swati, & Kumar, L. (2013). Poverty Dynamics in Rural India: An Asset-Based Approach. *The Journal of Applied Economic Research*, 7 : 4 : 475–506. Sage Publications.
- Fang, C. *et al.* (2020). The Experience of Poverty Reduction in Rural China. *Sage Open*.
- Fafchamps, M., & Lund, S. (2003). Risk-sharing networks in rural Philippines. *Journal of Development Economics* , 71 (2), 261-287.
- Fernandez, R. M., & Harris, D. (1992). Social isolation and the underclass. In A. V. Harrell, & G. E. Peterson (Eds.), *Drugs, crime and social opportunity: Barriers to urban opportunity* (pp. 257–293). Washington, DC: Urban Institute Press.
- Fitriani, N. (2021). Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai instrumen perencanaan partisipatif. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101–112.
- Flora B.C., *et al.* (n.d.) Community Capitals: A Tool for Evaluating Strategic Interventions and Projects. Iowa State University, North Regional Centre for Rural Development. Available at: <http://www.iastate.edu>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50.
- Fukuyama, F. (1997). Social Capital. *The Tanner Lectures on Human Values*. Oxford University.
- Fukuyama, F. (2002). Social Capital and Development: The Coming Agenda. *SAIS Review*, Volume 22, Number 1, Winter-Spring 2002, pp. 23-37 (Article) Published by Johns Hopkins University Press.
- Garba, I. S., & Haruna, M. (2024). *Informal sector solid waste management and community poverty reduction in Gwagwalada and Kuje Area Councils of Federal Capital Territory, Abuja, Nigeria*. *International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research*, 12(3), 1–18.

- Gaventa, J. (2004). *Towards participatory governance: assessing the transformative possibilities*. In S. Hickey & G. Mohan (Eds.), *Participation: From tyranny to transformation? Exploring new approaches to participation in development* (pp. 25–41). London: Zed Books.
- Ghozali, I. (2018). *Structural Equation Modeling: Konsep dan aplikasi dengan program SmartPLS 3.0*. Semarang: UNDIP Press. (Catatan: Tambahan opsional untuk memperkuat rujukan SEM-PLS)
- Gujarati, N. D. (2004). *Basic Econometrics*. Mc. Graw Hill Company, New York.
- Grootaert, C. (1998). Social Capital: The Missing Link? The World Bank Social Development Family, Environmentally, and Socially Sustainable Development Network, Social Capital Initiative. *Working Paper* No. 3.
- Grootaert, C. (1999). Social capital, household welfare and poverty in Indonesia. *Policy Research Working Paper* ;pp 79.
- Grootaert, C., & van Bastelaer, T. (2002). *The Role of Social Capital in Development: An Empirical Assessment* (Cambridge University Press)
- Grootaert, C. & Narayan, D. (2004). Local Institutions, Poverty and Household Welfare in Bolivia. *World Development* Vol. 32, No. 7, Pp. 1179–1198. Elsevier.
- Hadi, A. P. (2010). Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia (Overview of Various Program for Community Empowerment in Indonesia). Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA) (Agribusiness Foundation/Center for Community Development Agrikarya (PPMA)).
- Halilintar, M. (2018). Cooperatives and economic growth in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 21(2), 611–622.
- Hassan, R. & Birungi, P. (2011). Social Capital and Poverty in Uganda. *Development Southern Africa*, 28(1), 19-37.
- Haghton, J., & Khandor, R. S. (2009). *Handbook on Poverty and Equality*. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Hair, J. F. et al. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage Publications.

- Harrison, J. L., Montgomery, C. A., & Jeanty, P. W. (2019). A spatial, simultaneous model of social capital and poverty. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78(September 2018), 183–192.
- Heliandi, A. (2022). Collaborative governance dalam pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 12(1), 44–56.
- Hendar, & Kusnadi. (2017). *Ekonomi koperasi dan UMKM: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based SEM. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135.
- Hodge, I., & Midmore, P. (2008). Models of Rural Development and Approaches To Analysis Evaluation And Decision-Making. *Économie Rurale*, 307, 23–38.
- Hodgson, G. M. (2006). What are institutions? *Journal of Economic Issues*, 40(1), 1–25.
- Hodriani, Hodriani, Halking, & Ivana, J. (2019). The Culture of Gotong Royong the Multiethnic Society in North Sumatera: How to Introduce It to Students through Civic Education? <https://doi.org/10.2991/icssis-18.2019.69>
- Humas. jatengprov.go.id. (2020). Musrenbang Tahun Ini, 14 Kabupaten Termiskin di Jateng Siap Ditangani. Diakses pada tanggal 12 September 2021.
- Hoe, C. K. *et al.* (2017). Community participation for rural poverty alleviation: A case of the Iban community in Malaysia. *International Social Work*, Vol. 61(4) 518–536. 2018.
- International Labour Organization. (2012). *Resilient enterprises: Better employment and social outcomes through responsible workplace practices*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. (2020). *Cooperatives and employment: A global report*. ILO Publications.
- Jalan, J. & Ravallion, M. 2000. Is Transient Poverty Different? Evidence for Rural China. *The Journal Development Studies*, 36 (2), 82 -89.

- Juliansyah, F. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Koperasi di Era Digital. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 6(1), 34-48.
- Kadam, P. V. (2024). *Cooperatives: Linking with rural livelihoods*. *REDVET – Revista electrónica de Veterinaria*, 25(1S). Retrieved from <https://veterinaria.org/index.php/REDVET/article/download/965/637>
- Kadekodi, K. G. (1992). A Model of Sustainable Village Development: The Case of Peoples' Participation. *Indian Economic Review*, New Series, Vol. 27, Special Number in Memory of Sukhamoy Chakravarty, pp. 439-450.
- Kawamura, Y., (1978). Urbanization, Part-Time Farm Households and Community Agriculture: Japan's Experience after World War II. Ph.D. Thesis, Cornell University .
- Keyes, *et al.* (1996). Networks and nonprofits: Opportunities and challenges in an era of federal devolution. *Housing Policy Debate*, 7(2), 21–28.
- Keshk, O. M. (2003). CDSIMEQ: A program to implement two-stage probit least squares. *The Stata Journal*, 3(2), 1-11.
- Knack, S., & Keefer, P. (1997). Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation. *Quarterly Journal of Economics*, 112(4), 1251–1288.
- Khan, H. R. T. (2016). Women's Participations in Economic and NGO Activities in Bangladesh: An Empirical Study on The Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS). *Int. J. Sociol. Soc. Policy* 36(7/8), 491–515.
- Khan, M. H. (2000). Rural Poverty in Developing Countries: Issues and Policies. *IMF Working Papers*.
- Khan, M. H. (2001). Rural Poverty in Developing Countries: Implications for Public Policy. *Economic Issue*, No. 26, IMF, Washington DC.
- Khan, N. A., & Sultana, N. (2020). *Natural Resource Management: An Approach to Poverty Reduction*. Dhaka: University Press Limited.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. UI Press.
- Kutanegara, P. M. (2017). *Poverty, Crises and Social Solidarity in Sriharjo, Rural Java*. Yogyakarta: Pustaka Kanisius.

- Kusuma, A. R., & Kurniawan, T. (2021). Pengaruh kualitas kepala desa terhadap kinerja tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 145–158.
- Kwapong, N. A., & Hanisch, M. (2013). Cooperatives and poverty reduction: A literature review. *Journal of Rural Cooperation*, 41(2), 114–146.
- Liu, J., Dietz, T., Carpenter, S. R., *et al.* (2008). Complexity of Coupled Human and Natural Systems. *Science*, 317(5844), 1513–1516.
- Low, S., & Smith, N. (Eds.). (2006). *The Politics of Public Space*. Routledge
- Majee, W., & Hoyt, A. (2011). Cooperatives and Community Development: A Perspective on the Use of Cooperatives in Development. *Journal of Community Practice*, 19(1), 48-61.
- Malik, A. (1984). *Kemiskinan struktural dan perubahan struktur masyarakat Indonesia, dalam kemiskinan structural: suatu bunga rampai* (ED. Selo Soemardjan, Alfian, Mely G, Tan), pp14-19. Jakarta. PT. Sangkala Pulsar.
- Malik, S. (1996). Determinants of Rural Poverty in Pakistan : A Micro Study. *The Pakistan Development Review* , Summer 1996 , Vol . 35 , No . 2 (Summer 1996).
- Manjaro, E. A. (2017). Theories of Poverty Reduction as They Apply to the Gorongosa – Case Study in Alleviating Poverty Through Local Resources and Initiatives. *Confrence Paper*.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington, DC: The World Bank.
- Mantra, Ida Bagoes dan Kasto. (1981). Penentuan Sampel, dalam Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian (Penyunting), *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, hal. 105-129
- Mardiana, I. (2020). Peran PKK dalam pemberdayaan ekonomi keluarga: Studi pada desa binaan. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 5(1), 33–45.
- Markelova, H., Meinzen-Dick, R., Hellin, J., & Dohrn, S. (2009). Collective action for smallholder market access. *Food Policy*, 34(1), 1–7.
- McFadyen, M. A., & Cannella, A. A. (2004). Social Capital and Knowledge

Creation: Diminishing Returns of the Number and Strength of Exchange Relationships. *Academy of Management Journal*, 47(5), 735–746.

Milonakis, D., & Fine, B. (2009). *From Political Economics to Economics: Method, The Social and the Historical in the Evolution of Economic Theory*. London & New York: Routledge.

Mouw, T. (2006). Estimating the causal effect of social capital: A review of recent research. *Annual Review of Sociology*, 32, 79–102.

Murjoko, K. M., & Ferichani, M. (2020). Analisis Efisiensi dan Kebutuhan Investasi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Provinsi. *Agrista : Vol . 8 No. 1* , pp 8-17 ISSN : 2302-1713.

Muyeba, S. (2019). Institutional Capital, Urban Poverty and Household Wealth in Cape Town. *World Development Perspectives*, 16.

Nasution, A. (2016). Peranan Modal Sosial dalam Pengurangan Kemiskinan Rumah Tangga di Perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 2.

Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Hadi, S. (2015). Two-way causality between social capital and poverty in rural Indonesia. *Asian Social Science*, 11(13).

Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Hadi, S. (2014). *Dampak partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan terhadap pendapatan rumah tangga perdesaan di Indonesia*. *Sosiohumaniora*, 16(3), 222-227.

Narayan. (1997). *Voices of The Poor: Poverty and Social Capital in Tanzania*. Washington, D.C., USA: World Bank.

Narayan, D., & Pritchett, L. (1997). Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania. . *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 1796. Washington DC: World Bank.

Narayan, D., & Cassidy, M. F. (2001). A dimensional approach to measuring social capital: development and validation of a social capital inventory. *Current sociology*, 49(2), 59-102.

Nugroho, S. S. (2015). The Roles of Basic Infrastructure on Poverty Alleviation in Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 19(1), 27

- Nugroho, R. (2020). *Public policy: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Norhatan, H. (2014). Cooperative Movement Impacts on Poverty Eradication in Indonesia: 2007-2011 Archival Research. *Master's Theses*. 69.
- North, C. D. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- North, D. C. (1991). Institutions. *The Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97-112.
- Nyangena, W., & Sterner, T. (2008). Environment for Development Social Capital and Institutions in Rural Kenya Is Machakos Unique ? *Differences, March*.
- Opore, S. (2007). Strengthening community-based organizations for the challenges of rural development in Ghana. *Community Development Journal*, 42(2), 251–264
- Osei, D. C., & Zhuang, J. (2020). Rural Poverty Alleviation Strategies and Social Capital Link: The Mediation Role of Women Entrepreneurship and Social Innovation. *SAGE Open*, 1–11.
- Osmani, A. S. R., The, S., June, N., & Latif, M. A. (2013). The Pattern and Determinants of Poverty in Rural Bangladesh : 2000-2010. *The Bangladesh Development Studies*, 2000-2010. 36(2), 1–41.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2009). *A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems*. Science.
- Pamilutshih, K., Sadono, D., & Wahyuni, E. S. (2020). Tingkat partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan bank sampah di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 4(5), 663–667.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9. 2015*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

- Platteau, P. J., & Abraham, A. (2002). Participatory Development in The Presence of Endogenous Community Imperfections. *Journal of Development Studies*, 39(2), 104–136.
- Pollet, I. (2009). Cooperatives in Africa: The age of reconstruction – Synthesis of a survey in nine African countries. Working Paper No. 7. International Labour Organization (ILO)
- Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 24, 1 - 24.
- Putnam, R. D. (1993). Making democracy work. *The Civil Society Reader*, 322–327.
- Putnam, R. (1993). The Prosperous Community. *The American Prospect*, vol. 4 no. 13.
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schurster.
- Pretty, J., & Smith, D. (2004). Social Capital in Biodiversity Conservation and Management. *Conservation Biology*, 18(3), 631-638.
- Pretty, J. (1995b). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Probosiwi, R. (2016). Otonomi dan Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(3), 287–298.
- Robison, J. L., *et al.* (2002). Social Capital and Poverty Reduction: Toward a Mature Paradigm. Department of Agricultural Economics, Michigan State University: *Research Report*, No. 13.
- Rodrik, D., & Subramanian, A. (2003). The Primacy of Institutions (and what this does and does not mean). *Finance and Development*, 40 (2):31-34.
- Rustiadi, E., & Nasution, A. (2017). Can Social Capital Investment Reduce Poverty in Rural Indonesia? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 109.

- Rutherford, M. (2001). Institutional Economics: Then and Now. *Journal of Economic Perspectives*, Volume 15, Number 3 3, Pages 173–194.
- Ryan Nehring, C. U. and A. P. de la O. C. (2019). Rural poverty reduction in the 21st century. *A Publication of The International Policy Centre for Inclusive Growth*, 16(1), 1–56. www.ipcig.org.
- Sachs, J. D. (2003). Institutions don't Rule: Direct effect of geography on Per Capita Income, *NBER Working Paper Series*, Working Paper 9490.
- Samuelson, P., & Nordhaus, W. (1998). *Economics*. Singapore: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–59.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2011). *PLS-SEM: A powerful method in marketing research*. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152.
- Sawitri, D. R., et al. (2022). Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang: Tantangan, strategi, dan rekomendasi. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi*, 7(1), 61–71.
- Sembiring, E., & Nitivattananon, V. (2010). Sustainable solid waste management toward an inclusive society: Integration of the informal sector. *Resources, Conservation and Recycling*, 54(11), 802–809.
- Sen, A. (1985). Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984. *The Journal of Philosophy*, 82(4), 169–221.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Shammas, V. L. (2024). The global hinterland of social democracy. *Nordic Welfare Res* 9, 66–83. doi: 10.18261/nwr.9.1.5.
- Sholihin, M., and Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Penerbit Andi.
- Skerratt, S., & Hall, C. (2011). *Management of community-owned facilities post-acquisition: Brokerage for shared learning*. Local Economy.

- Smith, K. B., & Stone, L. (1989). Rags, Riches, and Bootstraps: Beliefs About the Causes of Wealth and Poverty. *The Sociology Quarterly*, Vol.30.No 1(Spring,1989), pp.93-107.
- Solomon, P. (2023). Can cooperatives be a tool for poverty reduction? Social capital perspectives of fisher's cooperatives in India. *Marine Policy*, 147, 105373.
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32.
- Spellerber, A. (2001). Framework for the Measurement Social Capital in New Zealand. *Research and Analytical Report*, 14.
- Streiner, D.L. (2005). Finding our way: an introduction to path analysis. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 50(2), 115-122.
- Suharko. (2010). Peran Koperasi dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 11(1), 53–64.
- Suharto, E. (2020). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Mengkaji Peran dan Strategi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Alfabeta.
- Sujati, S. (2020). Validitas dan reliabilitas dalam SEM-PLS. *Media Statistika*, 13(2), 81–94.
- Sumarto, R. H., & Dwiantara, L. (2019). *Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa* : 2(2), 65–74.
- Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat & JPS. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 14(3)(3), 138–139.
- Sunil K. and Pradyot, R.J. (2019). Switch in livelihood strategies and social capital have a role to play in deciding rural poverty dynamics: Evidence from Panel Data Analysis from Eastern India. *Journal of Asian and African Studies*, 1(19).
- Suryahadi, A., Yumna, A., Raya, U. R., & Marbun, D. (2010). Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies, and Programs in Indonesia. *Research Report, SMERU Research Institute, October*, 1–43.

- Suttie, D. (2016). Overview: Rural Poverty in Developing Countries: Issues, Policies and Challenges. *Investing in Rural People*, 1–23.
- Tahmasebi, A.; Askaribezayeh, F. Microfinance and Social Capital Formation—A Social Network Analysis Approach. *Socio-Econ. Plan. Sci.* **2021**, *76*, 100978.
- Taylor, J. E. (2009). Rural Poverty and Markets. *Agricultural Development Economics Division*.
- Tebaldi, E., & Mohan, R. (2010). Institutions and poverty. *Journal of Development Studies*, *46*(6), 1047–1066.
- Tentama, F., & Anindita, R. (2020). Composite reliability analysis in SEM. *Indonesian Journal of Statistics*, *9*(1), 12–20.
- Tenzin, G., *et al.* (2013). Impact of Social Capital on Poverty: A Case of Rural Households in Eastern Bhutan. Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS), Working Paper Series RWP-13.004.
- The World Bank. (2002). Building Institutions for Markets. In *World Development Report*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Tomimi, Z. M. (2024). Waste banks: Social capital in community-based sustainable waste management efforts in Padang City. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik (JAKP)*, *9*(2)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- United Nations Development Programme. (2021). *Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives*. UNDP.
- UNDP. (2021). *Community-based development and poverty alleviation*. UNDP Report.

- United Nations Development Programme. (2024). *UNDP Annual Report 2023: Transforming sustainable development and building a better world for all*. New York: UNDP.
- Uphoff, N. (1986). *Decentralization and Good Governance: a Framework of Decentralization for Sustainable Community Development*. 48–62.
- Uphoff, N. (1992). Local Institutions and Participation for Sustainable Development: An Analytical Sourcebook with Cases. *Gatekeeper Series No.SA31, January 1992*.
- Verhofstadt, E., & Maertens, M. (2015). Can Agricultural Cooperatives Reduce Poverty? Heterogeneous Impact of Cooperative Membership on Farmers' Welfare in Rwanda. *Applied Economic Perspectives and Policy*, volume 37, number 1, pp. 86 – 106.
- Vinti, G., & Vaccari, M. (2022). *Solid waste management in rural communities of developing countries: An overview of challenges and opportunities*. *Clean Technologies*, 4(4), 1138–1151.
- Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J., & Wang, H. (2010). *Handbook of Partial Least Squares*. Springer.
- Vipriyanti, U. N. (2011). *Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah: Mengkaji success story Pembangunan di Bali*. Cetakan Pertama, Universitas Brawijaya Press, ISBN: 978-602-203-105-5.
- Wahyudi, A. (2019). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 3(1), 55–68.
- Wang, J., Xiao, H., & Liu, X. (2023). *The Impact of Social Capital on Multidimensional Poverty of Rural Households in China*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 217.
- Wang, Y. (2020). Institutional interaction and decision making in China's rural development. *Journal of Rural Studies*, vol 76, pp. 111–119.
- Wanyama, F. O., Develtere, P., & Pollet, I. (2008). Encountering the Evidence: Cooperatives and Poverty Reduction in Africa. *Journal of Co-operative Studies*, December 2008
- Wanyama, F. O., Develtere, P., & Pollet, I. (2011). Encountering the Evidence: Cooperatives and Poverty Reduction in Africa. *SSRN Electronic Journal*.

- Ward, S. P. (2015). Transient Poverty, Poverty Dynamics, and Vulnerability to Poverty: An Empirical Analysis Using a Balanced Panel from Rural China. *World Development*, Vol. 78, pp. 541–553.
- Whiteley P. F. (2000). Economic Growth and Social Capital. *Political Studies*, 48: 443–466.
- Wikaningrum, A. T., & Mas'ud, B. F. (2020). Value-Based Social Capital: An Overview of Social Exchange Theory. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 115, Proceedings of the 19th International Symposium on Management (INSYMA 2022), <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200127.014>
- Williamson, O. (1993). Calculativeness, Trust, and Economic Organization. *Journal of Law and Economics*.
- Williamson, O. (1993). The Evolving Science of Organization. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*. 149: 36-63.
- Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2012). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International*, 30(4), 797–808.
- Wooldridge, J.M., (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Massachusetts: The MIT Press.
- Woolcock, M. (2001). *The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes*. Development Research Group, The World Bank and Kennedy School of Government, Harvard University.
- Woolcock, M. (2010). The rise and routinization of social capital. *Annual Review of Political Science*, 13, 469–487.
- World Bank, (1997), 'Social capital: the missing link?', *Expanding the Measure of Wealth: indicators of environmentally sustainable development*, Washington DC.
- World Bank Organization. (2000). World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. In *Oxford University Press*.
- World Bank. (2004). *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*. Oxford University Press.

- World Bank. (2021). *Poverty and shared prosperity 2021: Reversals of fortune*. The World Bank.
- World Bank. (2022). *Local governance and poverty reduction*. The World Bank Group.
- Xu, Z. & Miao, S. (2022). Effect of Public Space on Collective Action for Rural Waste Management and the Mediating Effects of Social Capital. *Agriculture*, 12, 1020. <https://doi.org/10.3390/agriculture12071020>
- Yang, D. T., Wang, H., & Liu, S. (2006). The Impact of Environmental Degradation on Rural Poverty in China. *China Economic Review*, 17(1), 52–66.
- Yamauchi, F., *et al.* (2010). Are Schooling and Roads Complementary? Evidence from Rural Indonesia. JICA Research Institute Working Paper, 10.
- Yuliani, F., & Ismail, M. (2019). *Peran koperasi dalam meningkatkan pendapatan petani di pedesaan*. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 3(2), 250–259.
- Yusuf, S. (2008). Social Capital and Household Welfare in Kwara State, Nigeria. *Journal of Human Ecology*, 23(3), 219–229.
- Zhu, X., & Wang, G. (2024). *Impact of agricultural cooperatives on farmers' collective action: A study based on the socio-ecological system framework*. *Agriculture*, 14(1), 96.
- Zuhri, M. (2020). Penguatan Modal Sosial Kelembagaan dalam Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Di Pantai Utara Dan Pantai Selatan. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 18(1), 121–130.
- Zurbrügg, C., Gfrerer, M., Ashadi, H., Brenner, J., Kühr, R., & Magalang, A. (2012). Determinants of sustainability in solid waste management – The Gianyar Waste Recovery Project in Indonesia. *Waste Management*, 32(11), 2126–2133.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Kuesioner Podes

Kemiskinan

- Jumlah Penduduk Miskin
- Fasilitas Kesehatan

704	Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan			
Sarana kesehatan	Jumlah sarana kesehatan di desa/kelurahan	Jika tidak ada sarana kesehatan di desa/kelurahan [kolom (2) terisi 0], jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan terdekat		
		Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]	
(1)	(2)	(3)	(4)	
a. Rumah sakit		.		
b. Rumah sakit bersalin		.		
c. Puskesmas dengan rawat inap		.		
d. Puskesmas tanpa rawat inap		.		
e. Puskesmas pembantu		.		
f. Poliklinik/balai pengobatan		.		
g. Tempat praktik dokter		.		
h. Rumah bersalin		.		
i. Tempat praktik bidan		.		
j. Poskesdes (pos kesehatan desa)		.		
k. Polindes (pondok bersalin desa)		.		
l. Apotek		.		
m. Toko khusus obat/jamu		.		
Kode kolom (4): Sangat mudah = 1 Mudah = 2 Sulit = 3 Sangat sulit = 4				
705	Jumlah posyandu/posbindu menurut kegiatan/pelayanan selama setahun terakhir:			
a.	Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali:		unit	
b.	Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih:		unit	
c.	Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu):		unit	

- Fasilitas Pendidikan

701	Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan				
	Jenis/jenjang pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan		Jika tidak ada lembaga pendidikan di desa/kelurahan (kolom (2) dan kolom (3) terisi 0), jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana pendidikan terdekat	
		Negeri	Swasta	Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)			.	
	b. TK/RA/BA			.	
	c. SD/MI			.	
	d. SMP/MTs			.	
	e. SMU/MA			.	
	f. SMK			.	
	g. Akademi/Perguruan Tinggi			.	
	h. SDLB				
	i. SMPLB				
	j. SMALB				
	k. Pondok Pesantren				
	l. Madrasah Diniyah				
	m. Seminari/sejenisnya				
	Kode kolom (5): Sangat mudah = 1 Mudah = 2 Sulit = 3 Sangat sulit = 4				
702	a. Kegiatan pemberantasan buta aksara/keaksaraan fungsional (KF) selama 3 tahun terakhir: Ada = 1 Tidak ada = 2 b. Kegiatan pendidikan Paket A/B/C selama setahun terakhir: Ada = 3 Tidak ada = 4 c. Kelompok Bermain (Play Group) : Ada = 5 Tidak ada = 6 d. Taman Penitipan Anak (TPA) : Ada = 7 Tidak ada = 8 e. Taman Pendidikan Al-Qur'an: Ada = 1 Tidak ada = 2 f. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) : Ada = 3 Tidak ada = 4				

Korepasi

- Jumlah KUD

1204	Jumlah KUD di desa/kelurahan	
	a. KUD yang beroperasi:	unit
	Jika tidak ada KUD (R1204a = 0) → R1205	
	b. KUD yang membeli/menjual hasil/produksi pertanian	unit
	c. KUD yang menyediakan Kredit Usaha	unit
	d. KUD yang melakukan kegiatan lainnya	unit

- Jumlah Koperasi Simpan Pinjam

1205	a. Jumlah koperasi (selain KUD) yang masih aktif/beroperasi:	unit
	1. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)/Usaha mikro	unit
	2. Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	unit
	3. Koperasi lainnya (tuliskan, misalnya koperasi: serbausaha, konsumsi.)	unit

Musyawarah

302	a. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R303	
	b. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK):	
	c. Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2017:	

Partisipasi Gotong Royong

809	a. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas (seperti: kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll) selama 1 tahun terakhir: Ada, sebagian besar warga terlibat - 1 Ada, sebagian kecil warga terlibat - 2 Tidak ada kebiasaan - 3	
	b. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah (seperti kematian, kesakitan, kecelakaan, dll) selama 1 tahun terakhir: Ada, sebagian besar warga terlibat - 1 Ada, sebagian kecil warga terlibat - 2 Tidak ada kebiasaan - 3	

Partisipasi Menjaga Lingkungan

504	a. Tempat buang sampah keluarga:			
	1. Tempat sampah, kemudian diangkut	Ya - 1	Tidak - 2	1.
	2. Dalam lubang atau dibakar	Ya - 3	Tidak - 4	2.
	3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut	Ya - 5	Tidak - 6	3.
	4. Drainase (got/selokan)	Ya - 7	Tidak - 8	4.
	5. Lainnya	Ya - 1	Tidak - 2	5.
	(tuliskan)			
	b. Tempat buang sampah sebagian besar keluarga (Pilih salah satu kode pada R504a yang dijawab "Ya"):			
	c. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS): Ada, digunakan - 1 Ada, tidak digunakan - 2 Tidak ada - 3			

514	Kegiatan pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah selama 3 tahun terakhir	
	Jenis Kegiatan	Ada, sebagian warga terlibat - 1 Ada, warga tidak terlibat - 2 Tidak ada kegiatan - 3
	(1)	(2)
	a. Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya	
	b. Pengolahan/daur ulang sampah/limbah (reuse, recycle)	

Pemerintahan Desa

1702	Jumlah aparatur pemerintahan:	
	a. Sekretariat Desa/Kelurahan (bendahara, dll.)	
	b. Pelaksana Teknis (kaur, kasi, dll.)	
	c. Pelaksana Kewilayahan (kadus, ketua RT, ketua RW, dll.) d. Pegawai Desa/Kelurahan lainnya (hansip, dll.)	

LAMPIRAN 2. Dokumen Penelitian

2.1. Permohonan Data di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS EKONOMI Gedung L1 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telepon 024-86008700 Ext 700, Fax : 024 8508015 Laman: http://fe.unnes.ac.id, Surel: fe@mail.unnes.ac.id
---	---

Nomor : B / 15223 / UN37 .1.7 / TU / 2022 14 Desember 2022
Hal. : Permohonan Data Penyusunan Disertasi

Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
 Jl. Pahlawan No.12, Pleburan, Kec. Semarang Sel.,
 Kota Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan disertasi yang berjudul "Pengaruh Otonomi, Pembangunan dan Kualitas Kelembagaan Desa Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". Tenaga pendidik yang bernama Lesta Karolina Br Sebayang bermaksud melaksanakan kegiatan pengumpulan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yaitu berupa permohonan akses data jumlah penduduk miskin tahun 2014 dan 2018 di 292 desa di Kabupaten Brebes, 301 desa di Kabupaten Banyumas, 281 desa di Kabupaten Tegal, 401 desa di Kabupaten Pati, 123 desa di Kabupaten Kudus, dan 239 desa di Kabupaten Batang. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk diberikan izin akses data yang dibutuhkan dalam penyusunan disertasi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Prof. Hani Yanto, M.B.A., Ph.D.
 NIP. 196307181987021001

2.2. Permohonan Data di Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Batang dan Kudus



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI

Gedung L1 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon 024-86008700 Ext 700, Fax : 024 8508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, Surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B / 15220 / UN37.1.7 / TU / 2022

29 Desember 2022

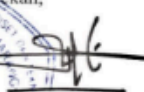
Hal. : *Permohonan Data Penyusunan Disertasi*

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Kabupaten Brebes
Jl. Proklamasi No.77, Silenggang, Pasarbatang
Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52211

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan disertasi yang berjudul "Pengaruh Otonomi, Pembangunan dan Kualitas Kelembagaan Desa Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". Tenaga pendidik yang bernama Lesta Karolina Br Sebayang bermaksud melaksanakan kegiatan pengumpulan data dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Brebes yaitu berupa permohonan permintaan data jumlah penduduk miskin di 292 desa yang ada di Kabupaten Brebes tahun 2014 dan 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon diberikan izin untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan disertasi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Dekan,

UN Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196307181987021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI

Gedung L1 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon 024-86008700 Ext 700, Fax : 024 8508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, Surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B / 15224 / UN37.1.7 / TU / 2022

14 Desember 2022

Hal. : *Permohonan Data Penyusunan Disertasi*

Yth. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Banyumas
Jl. Pemuda No.24, Kober, Kec. Purwokerto Bar.,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53131

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan disertasi yang berjudul "Pengaruh Otonomi, Pembangunan dan Kualitas Kelembagaan Desa Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". Tenaga pendidik yang bernama Lesta Karolina Br Sebayang bermaksud melaksanakan kegiatan pengumpulan data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yaitu berupa permohonan akses data jumlah penduduk miskin di 301 desa yang ada di Kabupaten Banyumas tahun 2014 dan 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk diberikan izin akses data yang dibutuhkan dalam penyusunan disertasi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Pt. Dekan,

Prof. H. Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196307181987021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI

Gedung L1 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon 024-86008700 Ext 700, Fax : 024 8508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, Surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B / 15217 / UN37.1.7 / TU / 2022

14 Desember 2022

Hal. : *Permohonan Data Penyusunan Disertasi*

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Jl. Raya Sel. Banjaran No.3, Procot, Kec. Slawi,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52412

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan disertasi yang berjudul "Pengaruh Otonomi, Pembangunan dan Kualitas Kelembagaan Desa Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". Tenaga pendidik yang bernama Lesta Karolina Br Sebayang bermaksud melaksanakan kegiatan pengumpulan data dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal yaitu berupa permohonan akses data jumlah penduduk miskin di 281 desa yang ada di Kabupaten Tegal tahun 2014 dan 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk diberikan izin akses data yang dibutuhkan dalam penyusunan disertasi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Pia Dekan,

Prof. Heni Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196307181987021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI

Gedung L1 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon 024-86008700 Ext 700, Fax : 024 8508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, Surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B / 15222 / UN37.1.7 / TU / 2022

14 Desember 2022

Hal. : *Permohonan Data Penyusunan Disertasi*

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati
Jl. Ki Juru Mertani, Cengklok, Sidoharjo, Kec. Pati,
Kabupaten pati, Jawa Tengah 59117

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan disertasi yang berjudul "Pengaruh Otonomi, Pembangunan dan Kualitas Kelembagaan Desa Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". Tenaga pendidik yang bernama Lesta Karolina Br Sebayang bermaksud melaksanakan kegiatan pengumpulan data dari Dinas Sosial Kabupaten Pati yaitu berupa permohonan akses data jumlah penduduk miskin di 401 desa yang ada di Kabupaten Pati tahun 2014 dan 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk diberikan izin akses data yang dibutuhkan dalam penyusunan disertasi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIDN-196307181987021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI

Gedung L1 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon 024-86008700 Ext 700, Fax : 024 8508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, Surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B / 15220 / UN37.1.7 / TU / 2022

27 Desember 2022

Hal. : Permohonan Data Penyusunan Disertasi

Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Kabupaten Batang
Jl. Brigjend Katamso No. 17, Batang, Proyonanggan Tengah,
Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan disertasi yang berjudul "Pengaruh Otonomi, Pembangunan dan Kualitas Kelembagaan Desa Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". Tenaga pendidik yang bernama Lesta Karolina Br Sebayang bermaksud melaksanakan kegiatan pengumpulan data dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Batang yaitu berupa permohonan permintaan data BDT tahun 2015 di Kabupaten Batang. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon diberikan izin untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan disertasi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Pir. Dekan,

Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196307181987021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI

Gedung L1 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon 024-86008700 Ext 700, Fax : 024 8508015
Laman: <http://fe.unnes.ac.id>, Surel: fe@mail.unnes.ac.id

Nomor : B / 15221 / UN37.1.7 / TU / 2022

14 Desember 2022

Hal. : Permohonan Data Penyusunan Disertasi

Yth. Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus
Jl. Mejubo No.99, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319

Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyusunan disertasi yang berjudul "Pengaruh Otonomi, Pembangunan dan Kualitas Kelembagaan Desa Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". Tenaga pendidik yang bernama Lesta Karolina Br Sebayang bermaksud melaksanakan kegiatan pengumpulan data dari Dinas Sosial, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus yaitu berupa permohonan akses data jumlah penduduk miskin di 123 desa yang ada di Kabupaten Kudus tahun 2014 dan 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk diberikan izin akses data yang dibutuhkan dalam penyusunan disertasi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ph. Dekan,

Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIR 196307181987021001



**UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

Jalan Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp: +62 274 548510, +62 274 548508
Faks: +62 274 563212, Website: <http://www.feb.ugm.ac.id>, E-mail: dekan.feb@ugm.ac.id

Nomor : 3356/UN1/EK.MD/KM/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Komunitas Masyarakat Desa di Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal

Dengan hormat,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

nama : Lesta Karolina Br Sebayang
NIM : 19/450157/SEK/00629
program studi : Doktor Ilmu Ekonomi
PENGARUH MODAL SOSIAL DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN
topik : PERDESAAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN BREBES, BANYUMAS, PATI,
TEGAL, BATANG, DAN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH
dosen pembimbing : Lincoln Arsyad, Prof. Dr., M.Sc.

terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 dan mengajukan permohonan izin untuk melakukan penelitian dan memperoleh data di institusi Bapak/Ibu. Untuk komunikasi lebih lanjut staf Bapak/Ibu dapat menghubungi mahasiswa di email lesta.sebayang@mail.ugm.ac.id dan nomor telpon 081328403182.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

5 Desember 2025

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D.

NIP 197805202005011002



**UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**

Jalan Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp: +62 274 548510, +62 274 548508
Faks: +62 274 563212, Website: <http://www.feb.ugm.ac.id>, E-mail: dekan.feb@ugm.ac.id

Nomor : 3357/UN1/EK.MD/KM/2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Komunitas Masyarakat Desa di Kabupaten Brebes
Kabupaten Brebes

Dengan hormat,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

nama : Lesta Karolina Br Sebayang
NIM : 19/450157/SEK/00629
program studi : Doktor Ilmu Ekonomi
PENGARUH MODAL SOSIAL DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN
topik : PERDESAAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN BREBES, BANYUMAS, PATI,
TEGAL, BATANG, DAN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH
dosen pembimbing : Lincoln Arsyad, Prof. Dr., M.Sc.

terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Semester GasalTahun Akademik 2025/2026 dan mengajukan permohonan izin untuk melakukan penelitian dan memperoleh data di institusi Bapak/Ibu. Untuk komunikasi lebih lanjut staf Bapak/Ibu dapat menghubungi mahasiswa di email lesta.sebayang@mail.ugm.ac.id dan nomor telpon 081328403182.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

5 Desember 2025

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Bayu Sutikno, S.E., M.S.M., Ph.D.

NIP 197805202005011002

LAMPIRAN 3. Hasil Analisis SEM-PLS

3.1. Path Coefficient (Direct Effect)

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Koperasi -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,259	-0,256	0,020	13,221	0,000
Moderating Effect 1 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,012	-0,013	0,015	0,761	0,447
Moderating Effect 2 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,040	-0,038	0,023	1,775	0,077
Moderating Effect 3 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,003	-0,009	0,025	0,109	0,914
Moderating Effect 4 -> Kemiskinan di Perdesaan	0,026	0,023	0,018	1,417	0,157
Musyawarah -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,030	-0,028	0,014	2,140	0,033
Partisipasi menjaga Lingkungan -> Kemiskinan di Perdesaan	0,221	0,221	0,015	14,767	0,000
Partisipasi Gotong Royong -> Kemiskinan di Perdesaan	0,095	0,097	0,016	5,804	0,000
Pemerintahan Desa -> Kemiskinan di Perdesaan	0,355	0,355	0,020	17,643	0,000

Confidence Intervals

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	5.0%	95.0%
Koperasi -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,259	-0,256	-0,290	-0,223
Moderating Effect 1 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,012	-0,013	-0,038	0,013
Moderating Effect 2 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,040	-0,038	-0,071	0,002
Moderating Effect 3 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,003	-0,009	-0,054	0,030
Moderating Effect 4 -> Kemiskinan di Perdesaan	0,026	0,023	-0,008	0,054
Musyawarah -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,030	-0,028	-0,051	-0,008
Partisipasi menjaga Lingkungan -> Kemiskinan di Perdesaan	0,221	0,221	0,194	0,246
Partisipasi Gotong Royong -> Kemiskinan di Perdesaan	0,095	0,097	0,072	0,127
Pemerintahan Desa -> Kemiskinan di Perdesaan	0,355	0,355	0,322	0,387

Confidence Intervals Bias Corrected

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Bias	5.0%	95.0%
Koperasi -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,259	-0,256	0,003	-0,297	-0,229
Moderating Effect 1 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,012	-0,013	-0,002	-0,034	0,017
Moderating Effect 2 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,040	-0,038	0,002	-0,071	0,003
Moderating Effect 3 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,003	-0,009	-0,006	-0,043	0,037
Moderating Effect 4 -> Kemiskinan di Perdesaan	0,026	0,023	-0,003	-0,001	0,058
Musyawarah -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,030	-0,028	0,001	-0,055	-0,012
Partisipasi menjaga Lingkungan -> Kemiskinan di Perdesaan	0,221	0,221	-0,001	0,196	0,246
Partisipasi Gotong Royong -> Kemiskinan di Perdesaan	0,095	0,097	0,002	0,069	0,124
Pemerintahan Desa -> Kemiskinan di Perdesaan	0,355	0,355	0,000	0,324	0,388

3.2. Total Effects

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Koperasi -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,259	-0,256	0,020	13,221	0,000
Moderating Effect 1 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,012	-0,013	0,015	0,761	0,447
Moderating Effect 2 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,040	-0,038	0,023	1,775	0,077
Moderating Effect 3 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,003	-0,009	0,025	0,109	0,914
Moderating Effect 4 -> Kemiskinan di Perdesaan	0,026	0,023	0,018	1,417	0,157
Musyawarah -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,030	-0,028	0,014	2,140	0,033
Partisipasi menjaga Lingkungan -> Kemiskinan di Perdesaan	0,221	0,221	0,015	14,767	0,000
Partisipasi Gotong Royong -> Kemiskinan di Perdesaan	0,095	0,097	0,016	5,804	0,000
Pemerintahan Desa -> Kemiskinan di Perdesaan	0,355	0,355	0,020	17,643	0,000

Confidence Intervals

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	5.0%	95.0%
Koperasi -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,259	-0,256	-0,290	-0,223
Moderating Effect 1 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,012	-0,013	-0,038	0,013
Moderating Effect 2 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,040	-0,038	-0,071	0,002
Moderating Effect 3 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,003	-0,009	-0,054	0,030
Moderating Effect 4 -> Kemiskinan di Perdesaan	0,026	0,023		0,054
Musyawarah -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,030	-0,028	-0,051	-0,008
Partisipasi menjaga Lingkungan -> Kemiskinan di Perdesaan	0,221	0,221	0,194	0,246

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	5.0%	95.0%
Partisipasi Gotong Royong -> Kemiskinan di Perdesaan	0,095	0,097	0,072	0,127
Pemerintahan Desa -> Kemiskinan di Perdesaan	0,355	0,355	0,322	0,387

Confidence Intervals Bias Corrected

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Bias	5.0%	95.0%
Koperasi -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,259	-0,256	0,003	-0,297	-0,229
Moderating Effect 1 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,012	-0,013	-0,002	-0,034	0,017
Moderating Effect 2 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,040	-0,038	0,002	-0,071	0,003
Moderating Effect 3 -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,003	-0,009	-0,006	-0,043	0,037
Moderating Effect 4 -> Kemiskinan di Perdesaan	0,026	0,023	-0,003	-0,001	0,058
Musyawarah -> Kemiskinan di Perdesaan	-0,030	-0,028	0,001	-0,055	-0,012
Partisipasi menjaga Lingkungan -> Kemiskinan di Perdesaan	0,221	0,221	-0,001	0,196	0,246
Partisipasi Gotong Royong -> Kemiskinan di Perdesaan	0,095	0,097	0,002	0,069	0,124
Pemerintahan Desa -> Kemiskinan di Perdesaan	0,355	0,355	0,000	0,324	0,388

3.3. Outer Loadings

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Partisipasi menjaga Lingkungan * Pemerintahan Desa <- Moderating Effect 4	1,055	1,055	0,032	32,725	0,000
PL1 <- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,589	0,594	0,046	12,780	0,000

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
MUS1 <- Musyawarah	0,929	0,896	0,224	4,153	0,000
GR1 <- Partisipasi Gotong Royong	0,604	0,618	0,128	4,704	0,000
KP2 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,825	0,818	0,014	58,022	0,000
KP3<- Kemiskinan di Perdesaan	0,894	0,893	0,007	120,545	0,000
PL2 <- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,842	0,836	0,030	28,096	0,000
KOP1 <- Koperasi	0,713	0,710	0,035	20,585	0,000
KOP2 <- Koperasi	0,849	0,849	0,024	34,983	0,000
MUS2<- Musyawarah	0,955	0,922	0,252	3,787	0,000
PD <- Pemerintahan Desa	1,000	1,000	0,000		
PD * MUS1 <- Moderating Effect 2	0,901	0,823	0,314	2,871	0,004
PD * GR1 <- Moderating Effect 3	-0,284	0,332	0,529	0,537	0,591
PD * KOP1 <- Moderating Effect 1	0,988	0,970	0,211	4,684	0,000
PD * KOP2 <- Moderating Effect 1	1,184	1,175	0,209	5,672	0,000
PD * MUS2 <- Moderating Effect 2	0,968	0,838	0,369	2,621	0,009
PD * GR2 <- Moderating Effect 3	0,996	0,355	0,727	1,371	0,171
KP1 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,696	0,708	0,024	28,894	0,000
GR2 <- Partisipasi Gotong Royong	0,744	0,714	0,118	6,325	0,000

Confidence Intervals

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	5.0%	95.0%
Partisipasi menjaga Lingkungan * Pemerintahan Desa <- Moderating Effect 4	1,055	1,055	1,001	1,109
PL1 <- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,589	0,594	0,518	0,669
MUS1 <- Musyawarah	0,929	0,896	0,885	0,953
GR1 <- Partisipasi Gotong Royong	0,604	0,618	0,404	0,821
KP2 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,825	0,818	0,792	0,839
KP3 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,894	0,893	0,880	0,905

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	5.0%	95.0%
PL2 <- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,842	0,836	0,785	0,881
KOP1 <- Koperasi	0,713	0,710	0,650	0,765
KOP2 <- Koperasi	0,849	0,849	0,806	0,888
MUS2 <- Musyawarah	0,955	0,922	0,930	0,979
PD <- Pemerintahan Desa	1,000	1,000	1,000	1,000
PD * MUS1 <- Moderating Effect 2	0,901	0,823	0,230	1,008
PD * GR1 <- Moderating Effect 3	-0,284	0,332	-0,516	1,016
PD * KOP1 <- Moderating Effect 1 1<- Moderating Effect 1	0,988	0,970	0,583	1,235
PD * KOP2 <- Moderating Effect 1	1,184	1,175	0,822	1,518
PD * MUS2 <- Moderating Effect 2	0,968	0,838	-0,053	1,000
PD * GR2 <- Moderating Effect 3	0,996	0,355	-0,859	1,026
KP1 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,696	0,708	0,666	0,747
GR2 <- Partisipasi Gotong Royong	0,744	0,714	0,496	0,878

Confidence Intervals Bias Corrected

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Bias	5.0%	95.0%
Partisipasi menjaga Lingkungan * Pemerintahan Desa <- Moderating Effect 4	1,055	1,055	0,000	1,005	1,109
PL1 <- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,589	0,594	0,004	0,505	0,658
MUS1 <- Musyawarah	0,929	0,896	-0,034	0,888	0,953
GR1 <- Partisipasi Gotong Royong	0,604	0,618	0,014	0,377	0,789
KP2 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,825	0,818	-0,007	0,807	0,848
KP3 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,894	0,893	-0,001	0,882	0,906
PL2 <- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,842	0,836	-0,005	0,795	0,886
KOP1 <- Koperasi	0,713	0,710	-0,002	0,652	0,767
KOP2 <- Koperasi	0,849	0,849	0,001	0,804	0,884
MUS2<- Musyawarah	0,955	0,922	-0,033	0,926	0,978
PD <- Pemerintahan Desa	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
PD1 * MUS1 <- Moderating Effect 2	0,901	0,823	-0,078	-0,180	0,991
PD * GR1 <- Moderating Effect 3	-0,284	0,332	0,616	-0,903	0,301

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Bias	5.0%	95.0%
PD * KOP1 <- Moderating Effect 1	0,988	0,970	-0,018	0,469	1,172
PD * KOP2 <- Moderating Effect 1	1,184	1,175	-0,009	0,834	1,518
PD * MUS2 <- Moderating Effect 2	0,968	0,838	-0,130	0,942	1,040
PD * GR2 <- Moderating Effect 3	0,996	0,355	-0,642	0,868	1,059
KP1 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,696	0,708	0,012	0,646	0,722
GR2 <- Partisipasi Gotong Royong	0,744	0,714	-0,030	0,539	0,896

3.4. Outer Weights

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Partisipasi menjaga Lingkungan * Pemerintahan Desa <- Moderating Effect 4	1,000	1,000	0,000		
PL1 <- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,541	0,546	0,046	11,848	0,000
MUS1 <- Musyawarah	0,471	0,450	0,124	3,783	0,000
GR1 <- Partisipasi Gotong Royong	0,671	0,683	0,121	5,567	0,000
KP2 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,472	0,462	0,021	22,036	0,000
KP3 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,503	0,495	0,018	28,239	0,000
PL2 <- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,809	0,804	0,034	23,655	0,000
KOP1 <- Koperasi	0,544	0,541	0,039	13,798	0,000
KOP2 <- Koperasi	0,722	0,723	0,034	21,210	0,000
MUS2 <- Musyawarah	0,589	0,572	0,223	2,637	0,009
PD <- Pemerintahan Desa	1,000	1,000	0,000		
PD * MUS1<- Moderating Effect 2	0,367	0,429	0,437	0,841	0,401
PD * GR1 <- Moderating Effect 3	-0,213	0,356	0,499	0,427	0,670

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
PD * KOP! <- Moderating Effect 1	0,527	0,508	0,156	3,377	0,001
PD * KOP2 <- Moderating Effect 1	0,685	0,688	0,127	5,416	0,000
PD * MUS2<- Moderating Effect 2	0,686	0,510	0,554	1,238	0,216
PD * GR2 <- Moderating Effect 3	0,962	0,371	0,692	1,391	0,165
KP1 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,232	0,253	0,031	7,604	0,000
GR2 <- Partisipasi Gotong Royong	0,800	0,771	0,107	7,462	0,000

Confidence Intervals

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	5.0%	95.0%
Partisipasi menjaga Lingkungan * Pemerintahan Desa <- Moderating Effect 4	1,000	1,000	1,000	1,000
Rata_KK <- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,541	0,546	0,470	0,621
aktif_musyawarah <- Musyawarah	0,471	0,450	0,305	0,568
gotroyong_skala <- Partisipasi Gotong Royong	0,671	0,683	0,478	0,869
infrs_kesehatan <- Kemiskinan di Perdesaan	0,472	0,462	0,428	0,502
infrs_pendidikan <- Kemiskinan di Perdesaan	0,503	0,495	0,462	0,521
keberadaan_tps <- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,809	0,804	0,745	0,857
kop_kud_invers <- Koperasi	0,544	0,541	0,474	0,607
kop_simpan_invers <- Koperasi	0,722	0,723	0,664	0,777
musyawarah <- Musyawarah	0,589	0,572	0,467	0,728
pemdes_skala <- Pemerintahan Desa	1,000	1,000	1,000	1,000
pemdes_skala * aktif_musyawarah <- Moderating Effect 2	0,367	0,429	-0,250	1,243
pemdes_skala * gotroyong_skala <- Moderating Effect 3	-0,213	0,356	-0,464	0,996
pemdes_skala * kop_kud_invers <- Moderating Effect 1	0,527	0,508	0,272	0,742
pemdes_skala * kop_simpan_invers <- Moderating Effect 1	0,685	0,688	0,483	0,893

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	5.0%	95.0%
pemdes_skala * musyawarah <- Moderating Effect 2	0,686	0,510	-1,064	1,107
pemdes_skala * r_publik_invers <- Moderating Effect 3	0,962	0,371	-0,805	1,000
ppdk_miskin <- Kemiskinan di Perdesaan	0,232	0,253	0,207	0,309
r_publik_invers <- Partisipasi Gotong Royong	0,800	0,771	0,573	0,918

Confidence Intervals Bias Corrected

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Bias	5.0%	95.0%
Partisipasi menjaga Lingkungan * Pemerintahan Desa <- Moderating Effect 4	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
PL1<- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,541	0,546	0,005	0,462	0,606
MUS1<- Musyawarah	0,471	0,450	-0,021	0,318	0,576
GR1<- Partisipasi Gotong Royong	0,671	0,683	0,012	0,435	0,842
KP2<- Kemiskinan di Perdesaan	0,472	0,462	-0,010	0,451	0,517
KP3<- Kemiskinan di Perdesaan	0,503	0,495	-0,008	0,480	0,535
PL2<- Partisipasi menjaga Lingkungan	0,809	0,804	-0,005	0,755	0,862
KOP1 <- Koperasi	0,544	0,541	-0,003	0,478	0,612
KOP2 <- Koperasi	0,722	0,723	0,001	0,658	0,774
MUS2 <- Musyawarah	0,589	0,572	-0,017	0,467	0,724
PD <- Pemerintahan Desa	1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
PD * MUS1 <- Moderating Effect 2	0,367	0,429	0,062	-1,334	0,625
PD * GR1 <- Moderating Effect 3	-0,213	0,356	0,569	-0,928	0,380
PD * KOP1 <- Moderating Effect 1	0,527	0,508	-0,018	0,315	0,777
PD * KOP2 <- Moderating Effect 1	0,685	0,688	0,003	0,480	0,888
PD * MUS2 <- Moderating Effect 2	0,686	0,510	-0,176	0,429	1,523
PD * GR2 <- Moderating Effect 3	0,962	0,371	-0,591	0,613	1,006

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Bias	5.0%	95.0%
KP1 <- Kemiskinan di Perdesaan	0,232	0,253	0,021	0,172	0,259
GR2 <- Partisipasi Gotong Royong	0,800	0,771	-0,029	0,608	0,929

LAMPIRAN 4. Observasi Lapangan



Musyawarah Desa Curug



Musyawarah Desa Balapulang Wetan



Pengambilan Data Wawancara



Pengambilan Data Wawancara



Pengambilan Data Wawancara Desa Slati Kabupaten Brebes



Tempat pengolahan sampah di Balapulang Wetan



Fasilitas pengambilan sampah dari pemerintah desa Balapulang Wetan



Pengolahan sampah di Desa Bogares Kidul